



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

KARYA & KINERJA¹⁷ ANGGOTA

LEMBAGA
SENSOR FILM
REPUBLIK
INDONESIA
PERIODE
2020 - 2024



EDITOR :
NOORCA M. MASSARDI

KARYA & KINERJA

17
ANGGOTA
LEMBAGA
SENSOR FILM
REPUBLIK
INDONESIA
PERIODE
2020 - 2024

ISBN:

JUDUL: KARYA & KINERJA 17 ANGGOTA LSF 2020-2024

EDITOR: NOORCA M. MASSARDI

PENULIS:

Ahmad Yani Basuki, Andi Muslim, Arturo Gunapriatna, Ervan Ismail, Fetrimen, Hafidha Farwa, Joseph Samuel Krishna, Kuart Prihatin, Mukayat Al-Amin, Nasrullah, Naswardi, Rita Sri Hastuti, Rommy Fibri Hardiyanto, Roseri Rosdy Putri, Saptari Novia Stri, Tri Widyatuti Setyaningsih

DESAIN/LAYOUT: Selo Sumarsono

PENERBIT: (C) Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI)

ALAMAT: Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta-10270

Email: sekretariat@lsf.go.id

Fax : 021-2529285 Telp : 021-2524845

Website: lsf.go.id IG: instagram.com/lsf_ri X: twitter.com/lsf_ri

FB: fb.com/LembagaSensorFilmRI Tiktok: @lsf_ri

YouTube: Lembaga Sensor Film RI wa.me/6281188808622

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KARYA DAN KINERJA LSF - 2020 - 2024



KARYA & KINERJA

17 ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2020 - 2024

Editor: Noorca M. Massardi

KARYA DAN KINERJA LSF - 2020 - 2024

Ahmad Yani Basuki

Andi Muslim

Arturo Gunapriatna

Ervan Ismail

Fetrimen

Hafidhah

Joseph Samuel Krishna

Kuat Prihatin

Mukayat Al-amin

Naswardi

Nasrullah

Noorca M. Massardi

Rita Sri Hastuti

Roseri Rosdy Putri

Rommy Fibri Hardiyanto

Saptari Novia Stri

Tri Widyastuti Setyaningsih

SAMBUTAN

Pembuatan dan penerbitan buku ini, tentu bukan untuk membanggakan diri. Buku *Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024* yang berisi profil 17 Anggota LSF ini juga merupakan bagian dari tekad LSF untuk menjadi lembaga independen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan informatif. Tekad yang kemudian terbukti telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dua kali dari Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga dengan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Desember 2022 dan Desember 2023, serta penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Menuju Informatif.



Sejak dilantik Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim, pada Jumat, 8 Mei 2020, kami bertujuhbelas, dipersatukan oleh tugas dan fungsi sebagai anggota Lembaga Sensor Film (LSF), sesuai amanah Undang Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Berada di dalam sebuah lembaga independen untuk menganalisis, menilai, dan mengklasifikasikan film dan iklan film sebelum dipertunjukkan ke khalayak umum, tentu memerlukan kerjasama dan saling pengertian, serta kesamaan pandangan dalam menafsirkan pasal-pasal dan ayat-ayat, yang menjadi pedoman dalam penyensoran. Tidak hanya yang diamanahkan UU 33/2009, tetapi juga yang diatur Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang LSF, dan Permendikbud No 14, Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.

Rommy Fibri Hardiyanto
Ketua LSF 2020-2024



Mengingat ke-17 Anggota LSF berasal dari pelbagai latar pendidikan, profesi, organisasi, lembaga, suku, agama, dan minat serta bakat yang berbeda, tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu serta proses, untuk dapat saling memahami dan saling menghormati pandangan dan pendapat subyektif satu sama lain. Alhamdulillah, seiring waktu, kami bisa menemukan dan mencapai kesamaan, kebersamaan, kesehatan, dan keseimbangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota LSF yang solid, kohesif dan obyektif.

Penulisan dan penyusunan buku *Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024* yang dikoordinasikan dan diedit oleh Noorca M. Massardi, Anggota dan Ketua Subkomisi Dialog, ini membuktikan, di antara kami, telah terjalin adanya keterbukaan informasi tentang karya, kinerja, riwayat hidup, riwayat pendidikan, serta pengalaman anggota, yang ditulis sendiri oleh setiap Anggota. Dengan demikian, para pemangku kepentingan, kementerian, lembaga, dan masyarakat umum yang terkait dengan pelayanan dan kinerja LSF, diharapkan dapat lebih mengenal, apa, siapa dan bagaimana karya dan kinerja 17 Anggota LSF periode 2020-2024 ini. Baik sebelum maupun sesudah bergabung di LSF. Termasuk mengapa dan bagaimana suatu kebijakan LSF diproses dan diputuskan.

Bila buku ini baru diterbitkan pada tahun terakhir pengabdian para Anggota LSF, ini juga merupakan salah satu pertanggungjawaban kami kepada publik, yang telah berupaya melayani sepenuh hati dan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana, alhamdulillah, telah mendapatkan apresiasi dari lembaga negara lain: Ombudsman dan KIP.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Rommy Fibri Hardiyanto

PENGANTAR EDITOR

Pelantikan 17 Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) Periode 2020-2024 dilakukan secara *hybrid*, pada Jumat, 8 Mei 2020. Sebagian Anggota berada di ruang sidang LSF di Gedung Film, Jl. MT Haryono, Jakarta Timur, dan sebagian berada di rumah masing-masing. Sementara Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim, memberikan amanah, membacakan sumpah jabatan, dan melantik Anggota LSF atas nama Presiden Republik Indonesia, dari dalam ruang kerjanya. Semua itu bisa terjadi, karena acara pelantikan itu dilakukan di tengah masa pandemi, setelah Pemerintah secara resmi mengakui “kehadiran” Covid-19 di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Dan, sejak April 2020, untuk menekan penularan virus Covid-19, pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Wabah itu sendiri baru dinyatakan berakhir melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia.

Adanya PSBB dan kemudian PPKM, yang baru resmi dicabut pada Jumat 30 Desember 2022, itu mengakibatkan jadwal kerja Anggota LSF wajib mengikuti pelbagai tahapan kebijakan, baik yang diterapkan Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk penetapan sebagian bekerja dari rumah (*work from home / WFH*) dan sebagian bekerja di kantor (*work from office / WFO*). Selain itu,



Noorca M. Massardi
Anggota - Ketua Subkomisi Dialog LSF
2020-2024



giliran bekerja di kantor juga ditentukan tidak hanya diselang-seling berdasarkan hari, tetapi juga disesuaikan dengan nomer kendaraan ganjil / genap Anggota, mengingat kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan “ga-ge” tetap diberlakukan oleh Pemprov DKI.

Dinamika Anggota LSF dalam menunaikan tugas dan fungsinya sesuai amanah UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang LSF, serta Permendikbud No 14, Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran, juga sempat terkendala ketika pada Oktober 2020, atap Gedung Film di Jl. MT Haryono, roboh. Sehingga dua lantai teratas tempat bekerja Anggota, Sekretariat, dan Tenaga Sensor (TS) tidak bisa dipakai. LSF pun sementara pindah ke Kompleks Kemendikbud Cipete di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, sambil menyiapkan tempat baru di Gedung F Lantai 6 Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, selesai dirombak sesuai kebutuhan minimal, dan bisa ditempati hingga hari ini.

Akibat situasi pandemi, penjadwalan tugas, dan kepindahan kantor tersebut, sejak dilantik Mei 2020, rasanya belum cukup bagi sesama anggota yang bertujuhbelas, untuk bisa bersosialisasi dan saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Setelah wabah Covid-19 dinyatakan berakhir pada 31 Desember 2022, baru per Januari 2023 lah, di gedung yang baru, LSF sebagai lembaga negara independen, dapat bekerja

dan bersosialisasi satu sama lain, dengan lebih santai dan leluasa. Seluruh Anggota, Sekretariat, dan Tenaga Sensor, bisa bertatap muka tanpa masker, duduk dan berbicara dalam jarak normal, ngopi dan makan bareng, serta olahraga bersama tanpa kekhawatiran.

Keakraban, persahabatan, saling pengertian dan saling menghormati satu sama lain itulah, yang memungkinkan Anggota LSF pada akhirnya memiliki komitmen dan tekad bersama sepenuhnya, untuk menjadikan LSF sebagai lembaga negara independen, yang bersifat terbuka, transparan, akuntabel dan informatif.



Terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam melayani semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Baik para pelaku perfilman (rumah produksi, lembaga penyiaran televisi, jaringan bioskop) maupun para pegiat perfilman (para sineas, artis dan teknisi), serta para (calon) penonton, media massa (cetak / elektronik / online), maupun kementerian / lembaga negara terkait. Dan, yang lebih utama, dalam menjalankan tugas dan fungsi LSF untuk melakukan penelitian, penilaian serta penetapan penggolongan usia bagi film / iklan film yang akan dipertunjukkan ke khalayak umum. LSF dapat memberikan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) secara obyektif, dengan argumen yang solid dan kohesif. Termasuk ketika harus mengembalikan materi film / iklan film yang diberi catatan rekomendasi untuk direvisi pada adegan tertentu, agar sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.



Mengingat pelbagai dinamika di atas, serta masa bakti dan sosialisasi antaranggota yang “tahu-tahu” sesuai SK Presiden sudah akan berakhir pada Mei 2024, itulah maka menjelang akhir periode ini, LSF memutuskan untuk “mengabadikan” *Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024* dan menerbitkannya sebagai sebuah buku. Mengutip pernyataan Ketua LSF (2020-2024) Rommy Fibri Hardiyanto dalam kata sambutannya: “Pembuatan dan penerbitan buku ini, tentu bukan untuk membanggakan diri. Buku *Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024* yang berisi profil 17 Anggota LSF ini juga merupakan bagian dari tekad LSF untuk menjadi lembaga independen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan informatif. Tekad yang kemudian terbukti telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dua kali dari Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga dengan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Desember 2022 dan Desember 2023,

serta penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi “Menuju Informatif.”

Sehubungan rencana pembuatan karya dan kinerja itu, pada rapat Pleno LSF, saya ditetapkan untuk merancang isi dan desain buku tersebut, serta sebagai editor utama, termasuk mengumpulkan semua naskah, dan menjadi koordinator bersama Sekretariat LSF, hingga buku bisa segera dicetak/diterbitkan/diedarkan. Keputusan itu mungkin diberikan, karena saya baru saja meluncurkan buku biografi Menko Marinvet Luhut Binsar Pandjaitan berjudul *Luhut* yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, pada September 2022. Berdasarkan amanah tersebut, dalam Sidang Pleno 17 Juni 2023 di Bogor, saya memaparkan rancangan isi, tema dan fokus buku tersebut, agar tampil dengan sebaik-baiknya. Antara lain:



Semua ditulis bebas oleh setiap Anggota, sesuai gaya dan karakter masing-masing. Diharapkan, setiap Anggota dapat menggambarkan latar belakang pribadi / keluarga, pendidikan, karir / profesi / organisasi sebelum menjadi Anggota LSF, serta apa dan bagaimana pengalaman pertama terkait film / televisi, serta kapan dan mengapa tertarik untuk berkiprah di LSF.

Alhamdulillah, pada deadline pertama Agustus 2023, sesuai ketetapan Sidang Pleno, sebanyak 6 (enam) Anggota mampu memenuhi tenggat dan langsung diproses sehingga tampil sebagai *dummy* buku yang bersih dan rapi. Namun, karena pelbagai kendala, tugas rutin, serta harus melakukann literasi, sosialisasi dan pemantauan ke luar kota, luar daerah, luar pulau dan luar negeri, akhirnya *deadline* kedua ditetapkan pada akhir Desember 2023.



Syukurilah pada akhir Desember 2023, sesuai tenggat, semua teks dan foto dapat dituntaskan. Dan, saya harus mendedikasikan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023, dengan mengambil cuti khusus tugas editing buku ini. Saya juga berhubungan permanen dengan desainer buku Selo Sumarsono, baik secara daring, melalui pesan whatapps serta email, untuk dapat menata letak teks dan foto dengan sebaik-baiknya. Dan terus berjaga dalam 24 jam.



Selama menyelesaikan buku ini, kendalanya memang bukan sekadar teknis dan tenggat. Melainkan bagaimana setiap Anggota harus berkenan “membuka diri” sebagai bagian dari pejabat negara yang melayani kepentingan publik. Dengan demikian, publik harus tahu apa, siapa, dan bagaimana pejabat publik yang telah

diberi amanah oleh peraturan dan perundangan terkait, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film, Tujuh Belas Anggota Lembaga Sensor Film periode 2020-2024, dalam berkarya dan melakukan kerjanya selama bertugas di LSF.

Memang, awalnya ada rasa *ewuh pakewuh* (*reluctant*) ketika setiap Anggota harus menuliskan karya dan kerjanya sendiri sebagai orang pertama (aku/saya).



Ada hambatan psikologis, terutama bagi yang merasa bentuk aku/saya itu sebagai seolah ingin menonjolkan diri atau terlalu individualistis. Sementara karya dan kinerja di LSF merupakan hasil dari filosofi kerja kolektif kolegial. Namun, dengan persuasif dan sambil memberikan contoh-contoh penulisan prosa, baik fiksi maupun biografi, yang akan terasa lebih akrab dan intim bila menggunakan orang pertama aku/saya, akhirnya, ketujuhbelas Anggota ikhlas juga menyetujui konsep penulisan semacam minibiografi ini. Bagi yang tetap berkeberatan akhirnya harus rela dan *legowo*, ketika saya kemudian mengeditnya menjadi “saya.” Alhamdulillah.



Bagi yang tidak terbiasa menulis prosa (artikel atau *features*), saya juga memberikan kebebasan untuk menulis sesuai kemauan dan kemampuannya. Dengan syarat, versi akhirnya akan terpulang pada saya, yang telah diberi mandat Sidang Pleno sebagai editor terakhir. Sehingga, teks yang versi “makalah ilmiah” sedapat dan sebagus mungkin saya upayakan dialihkan ke versi populer sebagaimana ketentuan teknis yang sudah saya jelaskan di atas.



Tentu, karena sejak awal panjang tulisan tidak dibatasi, kecuali batas minimal 10 (sepuluh) halaman, akhirnya ada yang menulis lebih singkat ada pula yang lebih panjang dibanding yang lain. Yang pasti sejumlah elemen dasar wajib tetap disertakan: jati diri, riwayat pendidikan, pengalaman, penghargaan dan daftar karya.

Alhamdulillah, sebagai editor “pengepul” saya semakin paham ihwal latar belakang, karakter pribadi, hobi, pengalaman, pendidikan, serta keluarga para kolega di LSF ini. Sesuatu yang tidak sempat kita ketahui dan alami, sehubungan faktor pandemi dan banyaknya kegiatan di luar jadwal penyensoran di dalam studio: rapat-rapat, sosialisasi, dan literasi di dalam kota, luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri.

Saya pribadi merasa bersyukur, telah mengenal dan bergaul dengan para kolega,

termasuk bagaimana masing-masing berusaha “mengelola” pelbagai dinamika yang muncul, akibat perbedaan karakter, latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman, profesi, suku, bahkan agama. Terutama ketika harus memutuskan dan menetapkan penggolongan usia film / iklan film yang tengah disensor. Dinamika yang sering terjadi di dalam studio, setelah kita meneliti dan menilai film / iklan film dengan kaca mata “subyektif” masing-masing, kemudian dapat secara aklamasi mencapai keputusan final yang solid, obyektif, dan kohesif, menjadi keputusan Lembaga. Baik di dalam studio itu sendiri, atau di dalam rapat Komisi I Bidang Penyensoran, maupun di dalam forum Dialog dengan pemilik film / iklan film yang dalam proses sensor. Yang menarik, sepanjang periode 2020-2024 ini, tidak ada sebuah film / iklan film yang penetapan klasifikasi usianya harus diputuskan melalui Sidang Pleno.



Sebagai penutup, izinkan saya berterima kasih kepada seluruh Anggota LSF, yang pada akhirnya, masing-masing mampu menyelesaikan penulisan naskah *Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024* ini. Terutama bagi Anggota yang terus terang mengaku terbantu, berterima kasih, bahkan terilhami untuk menulis lebih panjang, setelah “berjuang” menyelesaikan “tugas akhir” ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Tenaga Sensor yang sempat direpotkan untuk penulisan buku ini, serta bagian dokumentasi foto di Sekretariat LSF. Wabil khusus, terima kasih kepada Kepala Biro Tata Usaha LSF, Mas Abu Hanifah, yang tetap bersabar menantikan penyelesaian buku yang sudah dianggarkan sejak awal 2023 ini.



Kepada para pembaca, para pemangku kepentingan, kementerian / lembaga terkait, juga Anggota LSF periode 2025-2029, semoga buku ini bermanfaat, menjadi rujukan bagi keterbukaan dan transparansi Lembaga dan Anggotanya, serta kiranya dapat diteruskan pada periode selanjutnya. Sehingga, pemberian penghargaan dari Komisi Informasi Pusat kepada LSF, pada Desember 2023, dengan kualifikasi “Menuju Informatif,” dapat ditingkatkan menjadi “Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif.”

Jakarta, 31 Desember 2023

Noorca M. Massardi

Editor

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua LSF	8
Pengantar Editor	10
Ahmad Yani Basuki ANTARA GURU, TENTARA, DAN SINEMA	14
Andi Muslim ADAPTIF DAN KOLABORATIF	56
Arturo Gunapriatna DARI FILM UNTUK FILM	70
Ervan Ismail KEHADIRAN LSF PADA ERA DIGITAL TETAP STRATEGIS	92
Fetrimen FILM MEDIA EFEKTIF BAGI PEMBELAJARAN	106
Hafidhah INGIN MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK	122
Joseph Samuel Krishna APRESIASI FILM & PROGRAM TV SEBAGAI KARYA SENI	140
Kuat Prihatin DARI BIROKRAT KE LEMBAGA SENSOR FILM	160

Mukayat Al-amin KONTRIBUSI UNTUK PERFILMAN DAN MASYARAKAT	178
Naswardi HADIR WUJUDKAN TONTONAN RAMAH ANAK	192
Nasrullah MENILAI FILM JANGAN MENGGUNAKAN ANALISIS FIQH	210
Noorca M. Massardi JATUH CINTA DARI FILM KE FILM	224
Rita Sri Hastuti <i>JOURNALISM IS MAY PASSION</i>	272
Roseri Rosdy Putri MENJADI “ORANG FILM” DI LEMBAGA SENSOR FILM	298
Rommy Fibri Hardiyanto WARTAWAN PERANG YANG DIPERCAYA MENJADI KETUA LSF	320
Saptari Novia Stri MERANCANG PP TENTANG LSF DAN DIMINTA MENJADI ANGGOTA	340
Tri Widyastuti Setyaningsih FILMORFOSA	354



ANTARA GURU, TENTARA, DAN SINEMA

Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si.
Ketua Bidang Pemantauan,
Hukum dan Advokasi

Waktu kecil, profesi yang paling saya kagumi adalah Guru. Maka, menjadi guru adalah cita-cita saya sejak dulu. Tidak ada pilihan lain. Tapi, perjalanan waktu ternyata telah menghadirkan tantangan dan pilihan baru. Cita-cita awal menjadi guru pun berubah: menjadi Tentara. Dan ternyata, tentara telah membawa jalan hidup saya menjelajah ke mana-mana. Termasuk, akhirnya mengantarkan saya menyelami lorong sinema.

Saya lahir di Blitar pada Senin, 5 Maret 1956. Tepatnya di desa Mangunan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Waktu saya kecil, kampung itu sering dilanda banjir. Termasuk gedung Sekolah Rakyat (SR), tempat saya belajar di sekolah dasar. Saat itu, bersama teman-teman, kami yang masih kecil, harus mengangkat meja kursi sekolah untuk dipindahkan ke ke balai rumah penduduk, tempat sementara kami belajar. Boyongan pindah tempat sekolah seperti itu bukan hanya sekali terjadi. Namun semua itu tidak pernah mengurangi keceriaan dan kelancaran studi kami. Saya pun patut bersyukur, karena pada akhir ujian nasional, saya mendapat nilai terbaik di sekolah. *Alhamdulillah.*

Tamat dari SR, tidak ada pilihan lain kecuali berjuang untuk dapat diterima di SMP Negeri. Satu-satunya SLTP Negeri yang ada, dengan lokasi di Kawedanan Srengat, tujuh kilometer dari rumah. Maka mendaftarkan saya di sekolah itu, bersaing dengan para pendaftar lain, yang datang dari beberapa desa dan kecamatan di Kawedanan Srengat. *Alhamdulillah,* saya lulus seleksi, dan diterima di sekolah tersebut. Ada kegembiraan, tapi sekaligus kesedihan. Karena dari beberapa teman satu SR yang mendaftar, hanya saya sendiri yang lulus dan diterima.



Terbayang betapa sepi dan sedihnya, jika nanti setiap pagi saya harus naik sepeda ke sekolah, tanpa teman satu angkatan dari kampung saya.

Ketika kegiatan orientasi dan pelajaran awal sudah saya ikuti, dan saya mulai akrab dengan dengan teman-teman baru. Sayangnya, saya terpaksa harus meninggalkan SMP Negeri itu. Dengan berat hati tentu. Sebab, saya terpikat pada edaran baru yang dibawa teman. Surat edaran itu berisi pengumuman tentang Penerimaan Siswa Baru untuk sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN). Saya berpikir, pintu saya untuk menjadi guru, sesuai cita-cita, telah hadir dan terbuka untuk saya. Selain itu, hati saya juga tergelitik, karena di surat edaran itu juga disebutkan, bagi siswa yang berprestasi, akan mendapatkan Ikatan Dinas (beasiswa), dan dijamin akan diangkat menjadi guru (Pegawai Negeri). Terpikir pula, bila saya berhasil mendapatkan uang Ikatan Dinas, itu saya akan dapat meringankan beban orang tua. Sebab, Ayah saya yang berprofesi sebagai seorang penjahit, harus membesarkan dan membiayai pendidikan enam putra-putrinya.

Bak kata pepatah, pucuk dicinta ulam tiba. Akhirnya, diam-diam saya pun mendaftar di Sekolah PGAN 4 Tahun, Blitar, tanpa sepengetahuan guru dan teman-teman SMP saya. Awalnya, orangtua saya juga keberatan pada niat saya itu. Sebab, perjuangan untuk dapat diterima di SMP Negeri itu sesungguhnya tidak mudah. Kenapa justru harus ditinggalkan? Lagipula, lokasi Sekolah PGAN berada jauh jauh dari kampung saya. Konsekuensinya, saya harus kost. Jadi, akan tambah biaya. Namun, karena kemauan saya yang keras, akhirnya orangtua saya memahami dan merestui. Kebetulan orang tua kami memang tergolong gigih dalam mengurus pendidikan bagi putra-putrinya.

Saya pun dapat mengikuti seleksi dan lulus serta diterima di PGAN itu, bersama seorang teman dari desa saya. Setelah yakin diterima, saya pun menghadap Kepala Sekolah SMP Negeri, untuk berpamitan dengan baik-baik. Juga kepada beberapa orang teman dekat. Saya lihat ada ekspresi terkejut dan menyayangkan dari wajah-wajah mereka. Tapi saya dapat menjelaskan alasan saya kepada mereka. Saya pun gembira ketika kemudian saya mendengar bahwa bangku kosong yang saya tinggalkan, dapat diisi oleh teman yang semula lulus sebagai cadangan.

Setelah mulai mengikuti pendidikan Sekolah PGAN 4 Tahun di kota Biltar, saya bersama teman-teman pun menunggu-nunggu pengumuman ihwal siapa yang berhak mendapatkan Ikatan Dinas (beasiswa). Namun, baru setahun kemudian, menjelang kami naik ke kelas dua, berita gembira itu pun datang. Alhamdulillah, saya termasuk 40 dari 120 orang seangkatan, yang terpilih dan berhak menerima Ikatan Dinas (ID).

Ada kenangan yang tidak terlupakan, saat saya menerima uang ID untuk yang pertama kalinya. Sebab, yang kami terima adalah uang rapel selama satu tahun, sehingga jumlahnya cukup lumayan. Dan, sebagai seorang pelajar SLTP, nilainya



sangat berarti bagi saya. Untuk mengambilnya pun harus didampingi orang tua. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita, uang tersebut kemudian saya serahkan sepenuhnya kepada orang tua saya.

Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi hari libur, saya diajak Ayah pergi ke Pasar Sepeda. Pada waktu itu belum ada toko khusus sepeda, kecuali di kota. Yang ada Pasar Sepeda. Itu pun hanya buka pada hari-hari tertentu (hari pasaran). Di Pasar Sepeda itu Ayah menyuruh saya memilih sepeda yang dibeli dengan uang Ikatan Dinas saya. Dengan perasaan suka cita, saya naiki sepeda baru itu, dari pasar menuju rumah. Sementara Ayah mengiringi dari belakang, dengan wajah yang tampak ceria. Sejujurnya, ada perasaan berbunga-bunga di dalam hati saya.



Suasana santai dg teman-teman kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya

Maklum, waktu itu sepeda merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam keluarga. Ketika kami kembali masuk sekolah setelah menjalani hari libur, ternyata ada perasaan dan suasana batiniah yang sama di antara 40 orang penerima ID. Kami pun saling bercerita tentang kisah penggunaan uang ID itu. Dan, hampir semua ternyata dipakai untuk membeli sepeda baru. Maka di antara kami pun bisa saling berbagi info tentang sepeda baru masing-masing. Indah rasanya.

Lulus dari PGAN 4 Tahun, ternyata tidak serta merta diangkat menjadi guru, dan tidak ada keharusan untuk menjadi guru. Sementara saya sendiri merasa belum pantas menjadi guru, selain juga belum ingin bekerja. Saya pun kemudian memilih melanjutkan sekolah ke PGAN 6 Tahun di Tulungagung, lanjutan dari



Bersama-sama Pengurus KMA-PBS Perguruan Tinggi lain mendapat kesempatan mengunjungi Istana Negara dan juga Istana Bogor

PGAN 4 Tahun, dengan status masih sebagai Siswa Ikatan Dinas. Lulus dari PGAN 6 Tahun, juga ternyata tidak ada kewajiban menjadi guru. Dan, saya juga belum ingin menjadi guru. Maka saya memilih melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Semula saya ingin masuk ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), sesuai cita-cita semula untuk menjadi guru. Tetapi akhirnya saya tertarik dan memutuskan masuk Fakultas Dakwah IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel, di Surabaya. Di kampus itu keberuntungan ternyata masih menyertai. Saya termasuk salah seorang dari sejumlah mahasiswa yang berhak memperoleh Beasiswa Supersemar. Jika sewaktu di SMP saya bisa membeli sepeda "onthel" sendiri dari uang Ikatan Dinas, di kampus ini saya mampu membeli sepeda motor sendiri dari uang Beasiswa Supersemar, serta dari honor kegiatan les privat agama. Selain itu, saya juga sesekali mendapatkan honor dari tulisan saya yang dimuat di harian *Surabaya Pos* dan *Memorandum* waktu itu.

Saat di kampus, dibentuklah ikatan Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS), sebagaimana di kampus-kampus lainnya. Saya terpilih menjadi Ketua Umum yang pertama di kampus itu. Berkat jabatan itulah untuk pertama kalinya saya berkesempatan masuk Komplek Istana Kepresidenan (1981), bersama teman-teman KMA PBS dari pelbagai kampus di tanah air. Ke-



giatan lain saya adalah aktif sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Kampus dan Senat Mahasiswa. Karena tulisan kritis saya waktu itu, saya sempat berurusan dengan salah seorang pimpinan lembaga di kampus. Saya pun menghadap untuk menerima teguran, sekaligus menyampaikan jawaban. *Alhamdulillah* urusan selesai.

Lulus pada 1982, saya diterima menjadi dosen di almamater saya, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Masih sejalan dengan cita-cita awal menjadi guru, saya sempat menjadi Asisten Prof. Dr. Salahuddin Hardy (alm.) di Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan di Perguruan Tinggi Swasta lainnya. Selain menjadi dosen, saya pernah mengajar di SMA Taman Pendidikan Putri (TPP) Khadijah, Surabaya, yang muridnya putri semua. Di sekolah itulah, Nurul Fauzah,

salah seorang siswinya, kelak saya persunting sebagai istri.



Mampir foto bersama di bawah Patung Kuda

Setelah dua tahun menjalani karir sebagai dosen, beredar panggilan penerimaan Sekolah Perwira Wajib Militer (Sepa Wamil) ABRI (sekarang TNI). Saya pun tertantang untuk mencoba ikut seleksi. Sebenarnya, waktu itu, banyak teman dan bahkan saya sendiri berpikir, bahwa saya tidak memiliki postur atau tampilan untuk menjadi tentara. Sementara dari 11 orang alumni IAIN Sunan Ampel yang ikut seleksi, 80 persennya memiliki *background* sebagai aktivis Resimen Mahasiswa (Menwa). Tentu mereka sudah terlatih. Namun, meski awalnya coba-coba, begitu menghadapi ujian seleksi, saya tetap menganggapnya sebagai tantangan dan uji kompetensi. Tidak ada lagi kata coba-coba. Karena itu

saya pun serius mempersiapkan diri. Baik secara fisik, mental maupun akademis. Di luar dugaan, dari 11 orang teman IAIN Sunan Ampel, hanya saya sendiri yang lolos dan diterima. Dari situ saya merenung dan bertanya-tanya, benarkah saya sungguh-sungguh hendak menggeser cita-cita awal sebagai *Guru (Dosen)* menjadi Tentara? Akhirnya, dengan *bismillah*, pendidikan itu saya jalani. Walau agak berat, *alhamdulillah* selesai juga.

Lulus pada Jumat, 22 Juni 1984, saya dilantik sebagai perwira dengan pangkat



Letnan Satu Corp Ajudan Jenderal (Lettu CAJ). Saya memulai karir militer dengan jabatan Perwira Pembina Mental Batalyon Kavaleri V Serbu Kodam II Sriwijaya (Pa Bintal Yonkav- 5 Dam II/SWJ) di Desa Karangendah, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Inilah untuk pertama kalinya saya merantau cukup jauh dari kampung halaman.

Sesungguhnya ada perasaan berat jauh meninggalkan Ibu yang sudah ditinggal



Kenangan bersama siswa Sepa Wamil 1983/1984

wafat Ayah. Tapi demi menjalankan tugas, saya harus tegar. Di situ, saya mulai merasakan adanya ujian mental untuk menyesuaikan kehidupan militer, yang kesehariannya jauh berbeda dengan sewaktu saya di Surabaya sebagai masyarakat sipil. Kehidupan di batalyon yang begitu disiplin, ketat dan kadang terasa keras, seakan menegaskan bahwa 90 persen hidup kami memang milik TNI-untuk negeri. Sejak subuh sampai malam, kegiatan hidup kami diatur oleh Dinas. Meski berat, saya pun sadar memang harus begitu di batalyon, dan saya harus bangga dengan itu. Pada akhirnya, pengalaman tugas di batalyon, itu menjadi kenangan indah dan membanggakan bagi saya sebagai seorang Prajurit.

Setelah dua tahun di Yonkav-5, saya mutasi jabatan sebagai Pa Bintal Denma Resimen Induk Infanteri Kodam II/SWJ (Rinifdam II/SWJ), di Muara Enim, Sumsel. Selain sebagai Pa Bintal, saya juga diberi jabatan dan tugas rangkap di bidang Personalia dan Guru Militer, untuk mengampu beberapa mata pelajaran. Salah satu tugas pokok satuan Rinifdam ini memang sebagai Lembaga Pendidikan TNI di Kodam. Menindaklanjuti ST dari Pangdam II/SWJ, yang meminta nominasi kinerja personel/prajurit di satuan itu, saya dipromosikan sebagai Perwira Berprestasi Menonjol.



Dua tahun kemudian, saya pindah tugas ke Dinas Pembinaan Mental Kodam II SWJ di Palembang dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Tradisi dan Kejuangan (Kaur Trajuang), merangkap jabatan sebagai Ketua Primer Koperasi. Dari situ, pada 1991, saya mendapat panggilan tugas Operasi Seroja di Timor Timur, dengan jabatan sebagai Pa Bintal Yonif 412/6/2 Kostrad, yang juga diberi tugas rangkap sebagai Perwira Seksi Teritorial Terbatas. Tugas Operasi itu mengharuskan saya berpisah dengan istri dan dua putra-putri saya. Yang pertama masih kecil dan yang bungsu masih bayi. Suka duka pisah dengan keluarga memang cukup terasa. Tetapi hikmahnya juga nyata. Istri saya lebih terlatih untuk tegar dan mandiri.



Operasi Seroja di Timor-Timur 1991



Menyatu dengan masyarakat Timor-Timur, 1991



Menerima penghargaan sebagai pemenang Juara-I Lomba Karya Tulis Sospol ABRI 1994/1995 dari Kasospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid

Sepulang dari Timor Timur, saya mendapat kesempatan Sekolah Lanjutan Perwira II (Suslapa II), pada 1994. Sekolah itu membuka pintu kesempatan untuk pindah, dan berkarir di Ibukota (*tour of area*). Setamat dari Suslapa II, saya mendapat tugas di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan jabatan sebagai Kasipers Bagpers Info Dispenad. Tugas itulah yang mengawali saya bersentuhan dengan dunia media, atau berkawan dengan banyak wartawan. Berikutnya, saya diberi jabatan sebagai Perwira Staf Ahli Karya Tulis Dispenad, yang memungkinkan saya terlibat langsung dalam penyusunan dan penulisan naskah-naskah pidato dan ceramah pimpinan TNI Angkatan Darat (KASAD). Pada masa-masa itulah saya mulai aktif lagi dengan hobby menulis. Beberapa tulisan saya, selain dimuat di media publikasi internal jajaran TNI, juga di koran-koran Nasional. Melalui tulisan kritis dalam Lomba Karya Tulis Sospol ABRI (1994/1995), saya mendapat penghargaan sebagai Juara I.

Pada 1997, saya memperoleh kesempatan mengikuti seleksi dan berhasil lulus mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Sesko). Waktu itu sungguh tidak mudah untuk bisa lolos masuk Sekolah itu. Pada akhir sekolah tertinggi di Angkatan Darat itu, *alhamdulillah* saya memperoleh penghargaan *Karya Wira Jati*, sebagai Penulis Kertas Karya Perorangan (Taskap)



Terbaik. Selesai Pendidikan Sesko, saya sempat ditarik kembali bertugas di Dinas Penerangan TNI-AD. Dan, ketika mantan atasan saya diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI, saya pun ditarik pindah ke Puspen TNI. Beberapa jabatan yang pernah saya jalani selama di Pusat Penerangan TNI antara lain, Kepala Dinas Analisa Penerangan (Kadislisapen), Kepala Dinas Penerangan Umum (Kadispenum), dan Sekretaris Puspen TNI.

Saat menjabat Kadislisapen Puspen TNI, pada 2003, saya mendapat panggilan tugas operasi sebagai Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) / Juru Bicara Komando Operasi TNI (Jubir Koops TNI), dalam Operasi Pemulihan Keamanan (Opslihkam) Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dengan tugas itu, saya kembali harus berpisah dengan istri dan putra-putri saya. Saya juga harus meninggalkan kuliah S3 di FISIP Universitas Indonesia yang baru



Mengikuti Pendidikan SESKO TNI - AD 1997

satu tahun lebih saya jalani. Tantangan dalam tugas itu memberi pengalaman yang sangat berharga, karena Opslihkam itu bukan hanya menjadi perhatian di dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Sebagaimana diketahui, sejak Opslihkam belum diberlakukan, sampai dengan Operasi itu dilaksanakan, hotel-hotel di Aceh, khususnya di Lhokseumawe (Aceh Utara), dipenuhi oleh para wartawan dari dalam dan luar negeri. Mereka sangat antusias hendak meliput pelaksanaan operasi di daerah konflik itu. Begitu Opslihkam Darurat Militer dinyatakan diberlakukan oleh Presiden Ibu Megawati (melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), maka kontak tembak antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun terjadi di pelbagai tempat. Korban kontak tembak mulai berjatuhan.

Sejak saat itu, saya mulai kurang tidur. Selain tidak henti-hentinya menyampaikan informasi tentang jalannya operasi, saya juga harus menjawab perta-



nyaan/konfirmasi para pewarta yang bisa datang setiap saat. Begitu intensnya pelaksanaan operasi waktu itu, sehingga dalam sehari saya bisa dua kali menggelar jumpa pers. Tidak jarang pula, saya harus mengklarifikasi pemberitaan yang disampaikan pihak GAM, yang memang harus diluruskan. Saat itu interaksi intens dengan media harus saya lakukan. Hampir setiap hari, baik media cetak maupun elektronik (televisi) memberitakan dan menayangkan pernyataan saya, yang bagaimana pun menuntut saya untuk bekerja dengan *proper*, karena bersentuhan dengan konflik yang rawan dengan isu HAM.

Perhatian media massa juga ditandai dengan seringnya ada permintaan wawancara khusus baik dari media dalam maupun luar negeri, serta adanya kunjungan para Pemimpin Redaksi (Pemred). Di antaranya kunjungan rombongan Pemimpin Redaksi Media Massa Ibukota, baik dari majalah, koran, televisi maupun radio, yang ingin melihat langsung situasi lapangan. Jika saya melihat nama-namanya (waktu itu), mereka pada umumnya adalah *top leader* dan Redaktur Senior dari masing-masing media tersebut. Karena jumlah mereka cukup banyak, dan akan memasuki daerah konflik yang masih rawan, kedatangan dan kepulangan mereka difasilitasi dengan Pesawat Hercules TNI dari Bandara Halim PK, Jakarta. Karena hotel-hotel di Lhokseumawe sudah penuh oleh pewarta peliput yang menetap di Aceh, dan juga mengingat faktor keamanan, seringkali



para pimpinan media massa itu bermalam ditampung di instalasi militer Koops TNI, yang tersebar di beberapa lokasi, tentu dengan fasilitas yang sangat terbatas.

Ada kejadian yang menarik. Pada suatu malam, ada beberapa sosok jenazah prajurit TNI yang gugur akibat terlibat kontak tembak dengan GAM. Seperti lazimnya, sebelum dikirim ke Kesatuan asal, harus diadakan upacara militer terlebih dulu. Sebelum diupacarakan, pada malam harinya, jenazah itu disemayamkan di Aula Kodim Lhokseumawe. Begitu juga pada tengah malam itu. Jenazah yang gugur disemayamkan di Aula Kodim, yang sebagian ruangnya sudah ditempati beberapa orang Pemred yang baru datang dari Jakarta, dan tidur di atas velbed. Meskipun petugas jenazah sudah bekerja sesenyap mungkin, akhirnya para Pemred itu terusik dan terbangun juga karenanya. Maka dalam sekejap



terjadilah kegaduhan. Banyak di antara mereka yang mengaku tidak bisa tidur di dekat jenazah. Petugas pun membantu mereka pindah ruang tidur dan bergabung di ruangan lain, yang kebetulan kosong.

Yang menarik, ada dua orang yang nampak tegar, dan sama sekali tidak terusik meskipun tahu ada jenazah di samping tempat tidurnya. Padahal saya tahu, kedua orang tersebut adalah Direktur dan Pemred Media yang cukup terkenal. Pertama, Dirut *LKBN Antara*, Pak Mohamad Sobary, dan kedua, Pemred Majalah *Berita Forum Keadilan*, Noorca M. Massardi. (Tak terbayangkan bahwa 17 tahun kemudian, saya dan Pak Noorca dipertemukan dalam tugas yang sama sebagai Anggota *LSF RI (2020-2024)*. Ketika kami bersama-sama mengenang dan



memperbincangkan peristiwa waktu itu, di antara komentar kami adalah: "Seandainya waktu itu sudah ada teknologi selfie-selfian, pasti banyak foto yang disimpan Pak Noorca."

Begitu besarnya perhatian media terhadap operasi militer ini, maka apa pun yang saya sampaikan dan diberitakan media-massa, harus dapat dipertanggung jawabkan. Baik kepada internal TNI maupun kepada publik. Apa pun statemen saya tentang dinamika yang terjadi dalam Opslihkam, akan berdampak pada penilaian publik terhadap Kinerja Koops TNI khususnya, maupun pada citra TNI pada umumnya. Jika pernyataan-pernyataan saya baik dan benar, pasti membawa manfaat dan aman. Sebaliknya, jika pernyataan-pernyataan saya buruk dan tidak benar, pasti akan dipersoalkan dan mendatangkan mudharat dan kegaduhan. Sementara Opslihkam ini merupakan operasi yang berkaitan dengan kedaulatan Negara, yang tentu juga pasti akan ada risiko pada jabatan. Sementara saya juga merasakan adanya beragam sikap, kebutuhan dan kepentingan dari beberapa media, yang semuanya dapat terbaca dari pola bertanya dan pemberitaan oleh pewarta dan medianya. Oleh karena itu, menyampaikan berita dengan baik, benar dan bertanggungjawab, menjadi keharusan sebagai komitmen yang sungguh-sungguh saya jadikan pedoman.

Prinsip utamanya jangan bohong, dan bersikap bijak itu perlu. Prinsip itu saya peroleh dan saya pelajari dari bincang-bincang dengan teman-teman pewarta



senior. Alhamdulillah, amanah itu dapat saya laksanakan sebagaimana mestinya, hingga akhir masa tugas. Setidaknya, saya mencatat pernyataan *Media Watch* waktu itu, bahwa pemberitaan Opslihkam di Provinsi NAD dikuasai oleh TNI. Saya memaknai positif pernyataan itu. Setidaknya, saya telah melaksanakan tugas setahun lebih (2003-2004), sebagai Dansatgaspen / Jubir Koops TNI dengan aman sampai selesai.

Pada akhir masa tugas saya, Opslihkam sendiri belum selesai. Dan, suasana konflik masih terjadi meski intensitasnya sudah jauh menurun dan situasi kian membaik. Dalam perjalanan pulang, saya berdoa semoga konflik di Provinsi NAD dapat segera



Mendapat tugas sebagai *Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) / Jubir Koops TNI* dalam Ops Darurat Militer di Propinsi NAD 2003



Doorstop dengan berbagai media yang senantiasa siap meliput Ops Darmil di Propinsi NAD

diselesaikan. Alhamdulillah, pada akhirnya konflik itu telah berlalu. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), telah menjadi provinsi yang maju pesat dan penuh kedamaian, sebagai bagian utuh dari NKRI, sebagaimana yang kita saksikan dan rasakan saat ini.

Beberapa waktu setelah purna tugas sebagai Dansatgaspen/Jubir Koops TNI, saya mendapat anugerah kenaikan pangkat, dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel, karena syaratnya memang sudah terpenuhi. Jabatan saya pun berganti dari Kadislisapen menjadi Kepala Dinas Penerangan Umum (Kadispenum) Puspren TNI. Masih satu level.

Ada kenangan yang tak terlupakan. Beberapa hari setelah ditetapkan naik pangkat, pimpinan saya, Kapuspren TNI, tidak serta merta menyematkan tanda pangkat baru saya. Sampai kemudian saya mendapat tugas mendampingi beliau, bersama beberapa orang pejabat Mabes TNI lain, dalam kunjungan kerja ke Koops TNI di Provinsi NAD, tempat tugas yang belum lama saya tinggalkan. Tanpa diberitahu sebelumnya, dalam sebuah acara nonformal di Markas



Lapran Kenaikan Pangkat

Komando Operasi TNI itu, Kapuspen TNI, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (terakhir berpangkat Letjen dengan jabatan Wamenhan), menyematkan tanda pangkat baru saya, disaksikan beberapa pejabat yang hadir di situ. *Surprise* rasanya.

Dengan telah kembali bertugas di Jakarta, saya memperoleh kembali kesempatan melanjutkan program studi S3 saya di FISIP Universitas Indonesia, yang selama satu tahun lebih saya tinggalkan. Akhirnya, Program S-3 tersebut dapat saya selesaikan dan saya dinyatakan lulus pada 2007. Tak lama setelah itu, saya mendapat promosi jabatan sebagai Sekretaris Pusat Penerangan TNI. Itulah

jabatan terakhir saya di Mabes /Puspen TNI.

Suatu hari, ketika saya baru keluar dari rumah dan hendak berjalan-jalan pada hari libur bersama istri dan anak-anak, termasuk anak saya yang masih Taruna Akmil, tiba-tiba HP saya berdering. Awalnya saya merespon dengan santai panggilan tersebut, sambil tetap mengemudikan mobil. Tetapi ketika yang menelepon saya menyebutkan namanya, saya pun sontak bersikap sempurna, dan menjawab *SIAAP!!* sambil menepikan mobil ke tempat yang aman. Yang menelepon saya adalah Mayjen TNI Budiman, Sekretaris Militer Presiden (waktu itu). Terakhir, jabatan beliau adalah Kepala Staf TNI-AD (Kasad). Beliau memberi petunjuk dan arahan, agar malam hari itu pukul 19.30 WIB, saya datang menghadap di Pendopo Kediaman Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Bogor. Waktu itu, Presiden SBY baru saja dilantik untuk masa jabatan keduanya sebagai Presiden RI periode 2009-2014. Meskipun petunjuknya cukup jelas, masih ada perasaan belum yakin, dan rasanya banyak yang ingin saya tanyakan. Tetapi hanya ada dua pertanyaan singkat yang sanggup saya kemukakan: *"Mohon petunjuk, berpakaian apa dan membawa apa?"* Petunjuknya, memakai baju



batik dan membawa Daftar Riwayat Hidup. Saya pun segera balik kanan. Rencana makan bersama keluarga di luar, saya batalkan. Kami kembali pulang untuk mempersiapkan dan melaksanakan petunjuk tersebut.

Ketika malam itu saya datang di Cikeas, ternyata sudah ada beberapa orang yang datang dipanggil menghadap Bapak Presiden. Dua di antaranya saya kenal dekat, karena pernah menjadi atasan langsung saya, yaitu Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Kapuspen TNI dan Jenderal Goerge Toisutta, mantan Pangkoops TNI. *(Belakangan saya tahu, Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin diangkat sebagai Wamenhan dan Jenderal George T. sebagai Kepala Staf TNI-AD)*. Malam itu saya mendapat giliran terakhir. Panggilan terakhir sebelum saya, berakhir pukul 23.00 wib. Karena waktu sudah larut malam, Mayjen Budiman mem-



Sebagai Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI. Selalu berdekatan dengan pewarta.



Bersamaan Kapuspen TNI dan rekan-rekan wartawan dalam kunjungan tugas ke daerah



Sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi. Bersama Spri Presiden Kolonel Kustanto mendapat arahan langsung Bapak Presiden

beritahu, bahwa pemanggilan untuk saya menghadap Bapak Presiden ditunda, sampai waktunya nanti akan dipanggil kembali. Saya pun pulang dengan ketidak tahuan saya. Apakah sebenarnya tujuan pemanggilan untuk saya itu? Karena itu saya tidak pernah menceritakan kepada siapa pun ihwal tersebut, kecuali kepada istri dan anak-anak.

Enam hari kemudian, saya dipanggil kembali untuk menghadap Bapak Presiden. Kali ini tempatnya di Istana Kepresidenan. Waktunya juga malam hari pukul 20.00 WIB. Ketika saya datang, di ruangan tersebut sudah ada beberapa orang. Sebagian sudah saya kenal, sebagian lagi belum. Ada juga beberapa orang Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, yang saya kenal. Begitu Bapak Presiden hadir ke ruangan dan mengawali pengarahannya, beliau langsung menyapa nama saya dan meminta saya memperkenalkan diri. Selanjutnya, malam itu kami mendapat *briefing* dan arahan langsung dari Bapak Presiden, tentang amanah tugas yang akan kami emban. Malam itu juga saya baru mengetahui dan mendapat kejelasan. Saya mendapat kehormatan diberi amanah jabatan sebagai Staf Khusus Presiden (SKP) Bidang Publikasi dan Dokumentasi. Petunjuk akhir malam itu adalah, agar kami mempersiapkan diri. Dan, mulai besok pagi pukul 10.00 WIB, saya bersama tujuh orang SKP lainnya, sudah harus berkantor di Istana Kepresidenan.

Acara malam itu selesai pukul 23.00 WIB malam, dan saya pulang sampai di



rumah pukul 23.45 WIB. Setiba di rumah, saya membangunkan istri dan anak-anak. Lalu saya jelaskan kepada mereka. Intinya, mulai besok, saya tidak berkantor lagi di Mabes TNI Cilangkap, melainkan bertugas di Istana Kepresidenan, sebagai Staf Khusus Presiden. Mereka hanya termangu-mangu, dan tampaknya tidak serta merta percaya. Maklum, semuanya terjadi dengan cepat.

Esok paginya, saya datang ke kantor Puspen TNI lebih pagi dari biasanya. Saya ingin menyempatkan dan memanfaatkan waktu kurang lebih dua jam, untuk melapor kepada pimpinan, dan pamitan kepada teman-teman di Puspen TNI. Alhamdulillah, pukul 08.30 WIB selesai, dan saya langsung meluncur ke Istana Kepresidenan, untuk mengawali tugas di sana. Rasanya, semua berlangsung begitu cepat, bagaikan mimpi.



Tanggal 18 Nopember 2008, kesempatan pertama kalinya dipanggil menghadap langsung Bapak Presiden SBY di Istana Negara. Diminta memperkenalkan diri, untuk kemudian mendapat briefeng dan penjelasan tugas sbg Staf Khusus Presiden (SKP), bersama SKP lainnya.

Ketika pagi itu menginjakkan kaki di Istana Kepresidenan, saya menuju ruang kantor saya. Saya jadi teringat ketika pada 1981, sebagai Ketua Umun KMA-PBS IAIN Sunan Ampel, Surabaya, saya pernah memperoleh kesempatan mengunjungi dan berkeliling di sekitar Istana Kepresidenan. Maka dengan jabatan baru itu, saya akan berkantor tiap hari di Istana Kepresidenan tersebut. Jabatan itu telah memberi banyak pengetahuan, pengalaman serta wawasan yang sangat berharga bagi saya. Sebagai Staf Khusus Presiden, bersama Staf Khusus Presiden lainnya, agenda harian kami tentu melekat dengan kegiatan Presiden. Sementara sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, saya bertanggung jawab



Mendapat Pengarahan Tugas dari Bapak Presiden

atas bagaimana setiap kegiatan dan pernyataan Presiden dapat menjadi materi informasi, publikasi dan dokumentasi yang terkelola dengan baik. Alhamdulillah, tugas itu dapat saya laksanakan dan pertanggungjawabkan. Sederet panjang buku, mulai dari buku *Himpunan Pidato Presiden; Presiden dalam Gambar*, hingga beberapa judul buku tematik yang kami kerjakan bersama para asisten dan pembantu asisten saya, terpajang rapi di Ruang Perpustakaan Istana Kepresidenan. Baik di Jakarta, Bogor, Jogjakarta maupun di Bali. Juga tersimpan di Gedung Arsip Nasional. Dalam jabatan ini pangkat terakhir saya adalah Mayor Jenderal (Mayjen) TNI.

Salah satu kenangan yang tak terlupakan adalah, saat saya mendapat tugas menyampaikan tausiah di depan dua Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres), saat suhu politik memanas dalam Pilpres 2014. Dengan hanya ada dua Capres dan Cawapres (Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa), terasa benar pengaruh mereka dalam memanasnya suhu politik saat itu. Pada sebagian masyarakat, timbul perasaan seperti terbelah dalam dua kelompok pilihan Capres-Cawapres yang berhadap-hadapan. Di tengah hangatnya situasi politik, itu muncul sebutan “Cebong” dan “Kampret.” Sebutan yang dimanfaatkan masing-masing pihak untuk saling mengolok, dan menyindir satu sama lain. Situasi menghangat itu masih sangat terasa saat penghitungan suara. Sehubungan dengan keadaan tersebut, dan untuk menurunkan suhu politik menjelang penghitungan akhir (22/7/2014) hasil Pilpres, Bapak Presiden Susilo



Bambang Yudhoyono mengundang kedua Capres-Cawapres, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa. Saat itu, dalam acara buka puasa bersama di Istana Negara pada Minggu, 20 Juli 2014.

Dua hari menjelang acara tersebut, saya dipanggil Bapak Presiden. Tidak saya duga, saya diberi tugas untuk menyampaikan tausiah pada acara buka puasa bersama tersebut. Meskipun agak kaget dan tidak menduga, tetapi tidak ada jawaban yang saya sampaikan kecuali kata: “Siaap.” Bapak Presiden hanya menjelaskan urgensi acara tersebut, tetapi tidak memberi arahan apapun tentang materi tausiahnya. Sore hari berikutnya, menjelang malam pelaksanaan, saya dipanggil kembali menghadap Bapak Presiden. Saya ditanya, apa materi yang akan saya sampaikan. Sambil membawa catatan kecil, saya sampaikan substansi materi tausiah yang akan saya sampaikan. Beliau menyimak dengan serius dari awal



Mendapat arahan tugas dari bapak Presiden

sampai akhir, tetapi tidak memberi koreksi apapun. Hanya mengangguk-angguk. Dan, itu saya tangkap sebagai tanda menyetujui. Yang pasti saya tidak berbicara tentang politik, tetapi tentang Hikmah Ibadah Puasa dan diturunkannya Al-Quran bagi kehidupan manusia, dan saya akhiri dg sabda/hadits Rasulullah SAW yang artinya : Hendaknya kalian hati-hati dengan masalah kebenaran (kejujuran), karena hanya kebenaran yang akan membawa kebaikan, dan hanya kebaikan yang akan membawa ke surga. Sampai akhirnya acara buka puasa bersama itu dilaksanakan. Acara itu dihadiri Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil



Kenangan bersama Prof. Dr. Firmanzah (Alm) saat kunjungan tugas ke Inggris. 2014

Presiden Boediono, Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa, para Menteri KIB II, serta para tamu undangan khusus lainnya. Tidak ketinggalan para wartawan media massa yang meliput acara tersebut. Sejujurnya, tugas dan suasana saat itu cukup mengesankan bagi saya.

Sepanjang karier dan jabatan aktif di TNI, plus utamanya saat menjadi Staf Khusus Presiden, sesuai kepentingan tugas dan jabatan, saya memperoleh kesempatan mengunjungi tidak kurang dari 23 negara. Yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Hongkong, Kamboja, China, Laos, Arab Saudi, Abu Dhabi, Mesir, Fiji, India, Pakistan, Nigeria, Turki, Norwegia, Australia, Belanda, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Dan selama berkarir dalam dinas TNI aktif, termasuk di Istana Kepresidenan, saya mendapat 10 anugerah Satya Lencana dan Bintang Jasa, yaitu Satya Lencana (SL) Dwidya Sistha, SL. Seroja, SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV. SL Dharma Nusa, SL Wira Siaga, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya dan Bintang Jasa Utama.

Saya juga merasa patut bersyukur, karena di luar jabatan dalam birokrasi pemerintahan, saya sempat memperoleh beberapa pengalaman pekerjaan dan kegiatan di instansi nondepartemen, serta kegiatan sosial, yang memperkaya



teman dan memperluas wawasan. Antara lain, sebagai Ketua Umum Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) IAIN Sunan Ampel, Surabaya (1981-1983); Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya (1982-1984); Dosen Sosiologi Komunikasi UPN Jakarta (2008-20015); Dosen Tamu di Sesko TNI-AL; Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II (2010-2013); Komisaris PT PLN (2013-2014); Anggota Dewan Pakar PP KMA-PBS (2012-2015); Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) (2012-2017); Anggota Majelis Pertimbangan PB-IKA PMII (2018-2023); Ketua Pusat Kajian Bidang Ideologi, Dewan Pakar KMA-PBS (2019-2023); Anggota Dewan Kehormatan DPP-Partai Demokrat (2020-2025); Wakil Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) (2021-2026); Anggota Dewan Penasehat IKADI (2022-2027); Wakil Ketua Departemen Kesejahteraan DPP-PEPABRI (2023-2028), serta Khatib



Kenangan bersama Komisaris PT PLN 2013

Jum'at dan Id di beberapa masjid, antara lain di Masjid Baiturrahim Istana Kepresidenan dan Masjid Istiqlal.

Setelah selesai betugas sebagai Staf Khusus Presiden (2009-20014) dan pensiun dari TNI, seperti air mengalir, saya memperoleh kesempatan mengabdikan sebagai Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) periode 2015-2019.

Ada pengalaman yang tak terlupakan berkaitan dengan film pada 1973. Suatu hari, saya masuk gedung bioskop dan nonton film gratis, karena terjebak kerumunan dan berkeringat basah kuyup. Kisahnya, hari itu giliran sekolah saya masuk siang. Karena sesuatu hal, kami dipulangkan lebih cepat dari biasanya. Mengingat hari masih siang, saya iseng mampir dulu main-main di Alun-Alun



PURNABHAKTI DEWAN PENGAWAS
PERUM JASA TIRTA II
PERIODE 2004 - 2010



Kota Blitar, sebelum kemudian belok ke Gedung Bioskop Dipayana, yang tak jauh dari Alun-alun. Awalnya, saya hanya ingin melihat-lihat poster dan judul-judul film yang akan segera main. Saya memang suka menonton film. Tapi siang menjelang sore hari itu, tidak seperti biasanya, di teras gedung bioskop dipenuhi penonton, yang berdesakan menunggu jam masuk. Banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya, karena klasifikasi filmnya memang untuk semua umur. Saya pun tertarik untuk menonton, dan mencoba antre untuk membeli tiket. Namun, belum sampai mendapat giliran, ternyata tiket sudah habis terjual.

Di tengah padatnya kerumunan penonton, tibalah waktunya pintu masuk dibuka. Penonton pun berdesakan menyerbu masuk. Saya, yang terjebak di dalam desakan kerumunan, dan badan saya masih kecil, sulit untuk keluar dari kerumunan. Saya juga melihat petugas pintu masuk kewalahan memintai tiket penonton. Sehingga banyak yang masuk tanpa sempat menyerahkan tiketnya. Sementara pintu masuknya sendiri memang cukup lebar, tidak seperti gedung bioskop sekarang. Saya yang tidak bertiket pun terbawa arus sampai masuk ke dalam gedung bioskop. Ketika sudah berada di dalam, saya sempat berdiri termangu dengan hati yang gundah oleh perasaan bersalah, karena tidak membeli tiket. Di tengah kegalauan hati itu, ada orangtua yang sudah duduk di kursi dengan anaknya, yang menarik saya dari kerumunan orang, untuk duduk di samping anaknya. Waktu itu tempat duduknya bebas, tergantung siapa yang datang lebih dulu, dan tidak bernomer kursi. Orang tua tersebut sempat bertanya-tanya, tetapi untung tidak ada pertanyaan yang mengganggu ketenangan saya. Syukurlah, film



segera diputar. Saya berusaha menenangkan diri dan berupaya menikmati sampai film berakhir.

Kenangan dari kejadian itu, sempat memunculkan perasaan bersalah dan dosa, menonton tanpa membayar tiket. Namun, pada akhirnya muncul juga pertanyaan dalam hati, apakah peristiwa itu merupakan isyarat dan punya andil untuk kemudian hari mengantarkan saya menjadi Anggota Lembaga Sensor Film? *Wallahu a'lam*. Setidaknya, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan berikut ini.

Pertama kali saya menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF) terjadi pada 2002-2005, karena saya ditugaskan menggantikan Kolonel Inf Tri Budhoyo, Wakil dari Mabes TNI, yang telah habis masa keanggotaannya, dan sudah memasuki masa pensiun. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film, disebutkan bahwa LSF beranggotakan paling banyak 45 orang, terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan wakil-wakil



Kenangan bersama Komisaris PT PLN 2013

masyarakat. Oleh karena itu, pengangkatannya sebagai anggota, tanpa melalui proses seleksi, melainkan atas usul dan perintah Pimpinan masing-masing instansi dan organisasi. Karena jumlahnya banyak, maka tidak setiap hari semua anggota bisa masuk kantor. Masuk dan menyensor film dan iklan film pun hanya bisa sesuai jadwal yang sudah diatur sebelumnya.

LSF pada masa itu juga sering dipredikati sebagai lembaga gunting film. Tidak salah memang, karena dalam kerja teknisnya, bagian-bagian film yang dinilai tidak layak tayang, dicatat dan langsung dipotong dengan mesin potong yang setiap hari siap beroperasi. Materi filmnya pun masih dalam bentuk pita seluloid, sehingga mudah untuk digunting. *Power* LSF dalam perfilman saat itu, dapat terbaca jelas



Penyerahan buku "Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film" dari Ketua LSF kepada Mendikbud, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, pada Peringatan 100 Tahun Sensor Film.

pada pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, disebutkan : *"Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film: (a) diluluskan sepenuhnya ; (b) dipotong bagian gambar tertentu; ditiadakan suara tertentu (c) ditolak seluruh film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan"*.

Ada peristiwa penting yang terjadi pada 2008, yang menurut saya, itu termasuk peristiwa bersejarah. Beberapa orang sineas yang menamakan dirinya Masyarakat Film Indonesia (MFI) mengajukan *judicial review* atau pengujian kembali terhadap materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka bertindak untuk dan atas nama dirinya sebagai "perorangan warga negara Indonesia" yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, berkaitan dengan penyensoran terhadap beberapa produk film mereka oleh Lembaga Sensor Film. Mereka mendasarkan aduannya, antara lain pada pasal 28C ayat (1) dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang substansinya berkaitan dengan hak mengembangkan diri, khususnya dalam bidang seni dan budaya (pasal 28C), dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh saluran informasi melalui segala saluran yang tersedia (Pasal 28F). Tuntutan itu akhirnya masuk proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan memakan waktu cukup lama.

Bersama Anggota LSF lainnya, saya pun harus berulang kali menghadiri panggilan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Para pihak, dalam mempertahankan



argumennya, juga sama-sama menghadirkan saksi ahli masing-masing. Lembaga Sensor Film sebagai representasi Pemerintah meng-*counter* argumentasi teman-teman sineas antara lain, dengan mengangkat Pasal 28J ayat (1), yang substansinya "tidak ada kebebasan yang tanpa batas," dan ayat (2) yang substansinya adalah, "untuk memenuhi tuntutan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, maka kebebasan berkreasi juga harus memenuhi pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum." Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, antara lain, substansinya mengatur tentang pembatasan tersebut.

Setelah memakan waktu beberapa bulan, tepatnya pada Rabu, 30 April 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan *"menolak sepenuhnya permohonan pemohon"*. Namun demikian dalam amar putusan tersebut, Hakim MK terlebih dulu menyampaikan kesimpulannya: *"bahwa Undang-Undang Perfilman yang berlaku saat ini, termasuk ketentuan yang mengatur sensor dan Lembaga Sensor Film, sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya, sehingga sangat mendesak untuk dibentuk undang-undang perfilman yang baru, beserta ketentuan mengenai sistem penilaian film yang baru yang lebih sesuai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia..."*

Dengan demikian, meskipun keputusan Hakim MK menolak sepenuhnya permohonan pemohon, tetapi upaya *judicial review* teman-teman sineas tersebut, telah membuka pintu evaluasi terhadap UU No. 8/1992 tentang Perfilman. Saya pribadi memandang peristiwa itu membawa hikmah kebaikan dalam dunia



Menyambut kehadiran Mendikbud Prof. Dr. Muhadjir Effendy beserta Ibu dalam acara Anugerah LSF 2018



perfilman. Di satu sisi, kejadian itu memang meneguhkan eksistensi Lembaga Sensor Film, tetapi juga memperingatkan bahwa sudah waktunya ada koreksi dan penyesuaian Undang-Undang, yang memayungi dunia perfilman agar selaras dengan tuntutan zamannya, termasuk Lembaga Sensor Film. Responnya juga nyata. Karena dalam kurun waktu yang relatif tidak lama, telah lahir dan ditetapkan undang-undang tentang perfilman yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun demikian, Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, baru ditetapkan lima tahun kemudian, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Maka sejak saat itulah proses penyesuaian dan perubahan dimulai.



Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketika saya diberi kesempatan menjadi Anggota dan diangkat menjadi Ketua LSF (2015-2019), yang pertama kali saya pikirkan adalah amanah untuk bersama 16 Anggota LSF lainnya, mengawal masa transisi pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film tersebut. Yang pasti, dalam keduanya terkandung amanat perubahan, yaitu semangat dan

tatanan baru dalam perfilman, dan khususnya tentang Lembaga Sensor Film. Ada perubahan yang signifikan dari masa sebelumnya, baik struktural maupun kultural.

Dulu, anggota Lembaga Sensor Film (LSF) berjumlah 45 orang. Mereka berasal dari perwakilan pelbagai instansi Pemerintah (sipil, militer dan Kepolisian RI), serta organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan organisasi profesi lainnya. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU No. 33/2009), dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 (PP No. 18/2014) tentang Lembaga Sensor Film (LSF), anggota LSF ditetapkan hanya berjumlah 17 orang. Lima orang dari perwakilan Pemerintah, dan 12 orang perwakilan masyarakat, dengan pelbagai latar belakang keahlian/disiplin ilmu yang diperlukan.

Bila pada masa lalu pengangkatan Anggota LSF dilakukan tanpa melalui mekanisme seleksi, maka berdasarkan UU No. 33/2009, para calon anggota LSF terlebih dulu diseleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), dan Pansel lalu memilih serta menyerahkan 34 nama calon anggota LSF. 24 orang unsur masyarakat + 10 orang unsur pemerintah /kementerian) ke Presiden dan Presiden menyerahkan ke DPR untuk mendapat pertimbangan melalui fit and proper test. DPR menyerahkan



hasil pertimbangannya sebanyak 17 nama kepada Presiden dan kemudian dilantik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mandataris Presiden. Seiring perkembangan dan untuk membantu tugas Anggota, diangkat pula 34 orang Tenaga Sensor (TS) yang membantu Anggota LSF dalam penyensoran dan pemantauan film dan iklan film.

Ketika pada 2014 dibuka seleksi penerimaan anggota LSF periode 2015-2019 (sesuai ketentuan UU No. 33/2009), saya masih menjadi anggota LSF (2009-2012), yang diperpanjang sampai 2014, saat PP No. 18/2014 ditetapkan). Saya juga baru memasuki masa pensiun dari TNI. Jadi, saya memenuhi syarat untuk ikut seleksi atas nama pribadi sebagai perwakilan masyarakat. Saya pun mendaftar



dengan kompetensi di bidang Hankam. Setelah menjalani proses seleksi yang cukup panjang, saya bersama 16 orang lainnya dinyatakan lulus. Namun, menjelang pelantikan, ada satu orang yang mengundurkan diri. Komposisinya, sebagian dari petahana (*incumbent*) termasuk saya, dan sebagian besar lainnya orang baru. Dalam pemilihan Ketua yang dilakukan Sidang Pleno Anggota, saya terpilih sebagai Ketua LSF (2015-2019).

Sebagai Ketua bersama 16 Anggota lain dalam periode ini, selain melanjutkan tugas dan fungsi yang sudah ada, kami juga harus merumuskan formulasi Paradigma Baru yang diamanahkan UU No. 33/2009 dan PP No. 18/2014 tersebut. Saya sering menyampaikan ihwal pentingnya *continuity & change* (keberlanjutan & perubahan), untuk memastikan bahwa LSF sebagai lembaga regulasi negara yang telah lama ada, harus terjaga eksistensi dan nilai-nilai historisnya; nilai *intrinsik* maupun *ektrinsiknya*; dan harus sejalan dengan tuntutan perkembangan demokrasi. Oleh sebab itu, perubahan dan perbaikan juga merupakan sebuah keniscayaan.

Ada beberapa hal yang kami pandang sebagai amanah yang perlu dirumuskan



dan diambil langkah-langkah implementasinya.

Pertama, Terkait dengan *positioning* LSF yang ditegaskan Pasal 58 ayat (1) UU No. 33/2009, bahwa Lembaga Sensor Film bersifat tetap dan *independen*. Kata *independen* yang tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, mengamanatkan bahwa sebagai lembaga regulator, LSF harus mampu memposisikan diri dan mengambil jarak yang tepat, dalam hubungannya dengan *stakeholder* atau para pihak yang berkepentingan. Baik dalam hubungan struktural, fungsional maupun kultural. Sehingga, harus dipastikan tidak ada konflik kepentingan yang mengganggu eksistensi dan kredibilitas LSF sebagai lembaga regulator. Baik oleh *strong power*-nya kekuasaan (kritik masa lalu), maupun oleh kepentingan-kepentingan *stakeholder* lainnya, yang memungkinkan adanya euforia (evaluasi dari perjalanan reformasi).

Kedua, Perubahan kultural jam kerja, dari sebelumnya tidak penuh waktu menjadi penuh waktu, ternyata belum serta merta diikuti dengan penyesuaian penggajian maupun hak-hak lainnya. Inilah ujian transisi pertama yang harus kami hadapi. Kami memahami, bila keadaan itu mengundang ketidaknyamanan di antara teman-teman Anggota, khususnya yang telah memutus kontrak dengan tempat kerja sebelumnya. Meskipun, semestinya urusan dukungan administratif semacam itu bukan tugas pokok Ketua/Anggota LSF, tetapi hal itu tetap menuntut kami untuk turun tangan langsung mendampingi Kepala Sekretariat



dalam menyelesaikan urusannya. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, akhirnya tujuh bulan kemudian, urusan penyesuaian penggajian dan hak-hak lainnya dapat diselesaikan. *Ketiga*, Adanya amanah perubahan sebagaimana diamanatkan UU No. 33/2009 tentang Perfilman, dan PP No. 18/2014 tentang LSF, perlu dirumuskan dan ditegaskan apa dan bagaimana yang disebut sebagai Paradigma Baru LSF itu. Kami menangkap ada empat butir penting terkait paradigma baru tersebut, yang substansinya hendak meneguhkan eksistensi dan komitmen LSF atas tugas pokok, *positioning* dan semangat perubahannya. 1). Seiring dengan nilai strategis film bagi ketahanan budaya bangsa, LSF diamanati tugas untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. 2). LSF harus berperan nyata sebagai penerang dan pendorong bagi semakin berkembang dan produktifnya film nasional. Dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) waktu itu menekankan agar LSF berperan sebagai *mercusuar* dalam dunia perfilman. 3).

LSF harus mengedepankan *prinsip dialog* dengan menempatkan masyarakat perfilman sebagai mitra dalam upaya bersama memajukan perfilman nasional. 4). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menghadirkan kian murah dan mudahnya mengakses informasi, termasuk karya sinematografi (film), LSF diamanati untuk memberdayakan masyarakat agar memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam memilih dan memilih tontonan



Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi



dengan baik (Budaya Sensor Mandiri). Itulah paradigma baru atau komitmen LSF yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Baik untuk kepentingan internalisasi maupun eksternalisasi. Diskusi dan perdebatan tentu sering kami hadapi, terkadang terjadi cukup keras. Bagi saya, semua itu memang diperlukan agar masa transisi dapat kita lewati dengan meninggalkan fondasi *positioning* yang kuat. Dan, jika ada perubahan dan perbaikan, maka perubahan dan perbaikan itu adalah milik bersama.



Dengan mengacu pada keempat paradigma di atas, di samping melaksanakan tugas pokok penyensoran, kami juga harus bekerja keras untuk meletakkan dasar-dasar utamanya. Dengan kata lain, di balik rumusan Paradigma Baru tersebut, ada beberapa tugas terkandung yang harus dirumuskan dan diimplementasikan. Terkait dengan paradigma pertama dan keempat, yaitu tugas perlindungan dan pendampingan masyarakat, LSF harus terus

meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan tugas penyensoran, dan banyak melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi hukum, serta melakukan sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) di tengah-tengah masyarakat.

Agar literasi dan sosialisasi BSM tidak hanya berkembang sebagai wacana, tentu diperlukan adanya buku panduan sebagai pedoman. Maka disusun dan diterbitkanlah buku *Dasar Pemikiran Budaya Sensor Mandiri, Upaya Melindungi Masya-*



rahat Dari Dampak Negatif Film. Buku sederhana itu diharapkan dapat memberi pemahaman dan meyakinkan masyarakat tentang pentingnya Budaya Sensor Mandiri, dan pentingnya kegiatan sosialisasinya. Sementara, ihwal bagaimana seharusnya Budaya Sensor Mandiri disosialisasikan dan dikembangkan, maka disusunlah buku *Kebijakan Sensor Film dan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri*.

Terkait dengan paradigma kedua, yaitu amanah peran mendorong perkembangan film nasional, LSF juga melakukan sosialisasi tentang budaya dan kearifan lokal, yang merupakan kekayaan budaya bangsa dalam ke-Indonesiaannya, yang sangat penting untuk diangkat dalam karya sinematografi. Sejalan dengan itu, dan sesuai amanah UU No. 33/2009 tentang Perfilman, pasal 58 ayat 4, dan PP No. 18/2014 tentang LSF, Pasal (3), (4) dan (5), LSF mulai merintis pembentukan LSF Perwakilan Daerah. Melalui kajian yang mendalam tentang urgensi dan produktivitasnya, ada beberapa daerah yang dinilai perlu menjadi prioritas. Dari 13 Provinsi yang masuk dalam nominasi, ada dua provinsi yang masuk prioritas. Yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Maka dimulai pembentukan perdananya, yaitu LSF Perwakilan Jawa Timur di Surabaya. Setelah mendapat pengesahan dari Mendikbud, dilanjutkan dengan seleksi penerimaan Tenaga Sensor (TS). Sesuai kebutuhan, dipilihlah 7 orang TS, yang dilantik pada Selasa, 16 Mei 2017, di LPMP Jawa Timur, yang kemudian ditetapkan sebagai kantor LSF Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sejak hari itu pula LSF Perwakilan Jawa Timur beroperasi.

Terkait dengan paradigma ketiga, maka LSF senantiasa membangun dan mengedepankan dialog yang konstruktif dengan pemilik film dan iklan film, dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Arah dialog itu adalah menuju adanya suasana saling memahami dan menghormati tugas dan fungsi masing-masing, agar terbangun kesamaan nilai dan persepsi, atas materi film dan iklan film yang disensor, yang menjadi objek dan subjek dialog tersebut.

Keempat, Pasal 62, ayat b, UU No. 33/2009 tentang Perfilman, menegaskan bahwa LSF dibantu oleh tenaga sensor (TS) yang memiliki *kompetensi* di bidang penyensoran. Pertanyaannya bagaimana dan siapa yang merumuskan standar kompetensinya. Pada akhirnya kami harus menerima bahwa ini juga termasuk salah satu tugas LSF. Oleh karena itu, dengan berkonsultasi dan kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dibentuklah Panitia Teknik Uji Kompetensi (PTUK) LSF-BNSP. Dari kerja sama itu tersusunlah Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Sensor Film, yang kemudian ditetapkan dan disahkan oleh Ketua BNSP (Ir. Sumarna F.A. Abdurrahman, Msc) bersama Ketua LSF, pada Selasa, 24 April 2018. Skema itu digunakan untuk sertifikasi profesi dalam ruang lingkup perfilman sub bidang sensor film, yang mengacu pada SKKNI yang ditetapkan ber-



dasarkan Keputusan Menakertrans RI Nomor Kep.273/Men/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kebudayaan Bidang Perfilman Sub Bidang Sensor Film Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi itu dibentuk untuk memastikan adanya acuan kompetensi profesi Tenaga Sensor film. Sebagai tindak lanjutnya, LSF kemudian mengirim 7 orang anggota LSF untuk mengikuti pelatihan, dan telah lulus sebaga Asesor bagi Tenaga Sensor.

Kelima, Untuk menjawab kritik dan pertanyaan *stakeholder* dan masyarakat yang sering muncul dalam pelbagai forum dialog dan diskusi tentang bagaimana standar LSF dalam menetapkan kelayakan film dan penetapan klasifikasi usia, LSF berupaya menyusun buku Pedoman dan Kriteria Penyensoran, dan Penggolongan Usia Penonton. Buku yang semula hanya disiapkan sebagai buku pedoman produk LSF, namun untuk kepentingan yang lebih besar, dengan penambahan substansi dan melalui proses uji publik dengan *stakeholder* terkait, akhirnya pedoman itu diangkat dan ditetapkan sebagai Peraturan Menteri. Yakni, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran*. Peraturan Menteri ini bernilai penting, sebagai panduan sarana penyamaan pemahaman dan persepsi antara LSF dengan pelaku usaha dan pegiat perfilman, serta masyarakat pada umumnya, ihwal bagaimana LSF menetapkan kelayakan sebuah film dan menetapkan klasifikasi usianya.

Keenam, Untuk memperkuat posisi kelembagaan, dilaksanakan kajian tentang Posisi Kepala Sekretariat LSF yang berada dalam Eselon 3. Posisi itu terasa membatasi kesetaraan LSF dengan institusi serupa, yang beban tugasnya sama, atau bahkan di bawahnya, tetapi eselonisasi sekretariatnya lebih tinggi. Dampak eselonisasi itu cukup dirasakan dalam urusan protokoler dan penggajian. Oleh karena itu, LSF terus berjuang untuk peningkatan dan penguatan eselonisasi kelembagaan, dengan mengusulkan peningkatan eselon Sekretariat LSF, dari Eselon 3 menjadi Eselon 2. Melalui pelbagai kajian, akhirnya tersusun juga naskah akademiknya. Memang tidak begitu mudah untuk menyelesaikannya.

Ketujuh, Untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi dan kualitas fungsi pelayanan, LSF membangun *e-Sias* (Sistem Administrasi Elektronik) yang peluncuran perdananya dilaksanakan pada Kamis, 12 Desember 2019. Tujuan pengadaaan *e-Sias* itu adalah untuk membangun sistem pelayanan penyensoran yang cepat, mudah dan transparan. Melalui *e-Sias* para pelaku usaha dan pegiat perfilman, dapat memantau langsung tentang proses materi film dan iklan film yang disensorkan, sekaligus mengetahui berapa biaya penyensorannya. Sistem itu cukup penting dalam peningkatan kualitas pelayanan yang lebih profesional, sesuai tuntutan perkembangan yang ada, serta mencegah adanya isu maupun



tindak percaloan dalam proses sensor film.

Kedelapan, Untuk memperkaya makna dan implementasi paradigma baru, LSF menggelar Forum Diskusi dengan melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan perfilman. Kegiatan itu sekaligus untuk memperingati momentum 100 Tahun perjalanan Sensor Film (1916-2016). Dengan mengangkat tema besar “*Masyarakat Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa*” sebagai acuannya, diharapkan wacana yang berkembang dalam pelbagai perspektifnya, juga dapat mempertemukan pemahaman, bahwa perubahan yang lebih baik dimungkinkan terjadi, hanya bila manusia dan masyarakat Indonesia melek media dan memiliki media literasi yang baik. Memerhatikan berharganya pelbagai pemikiran yang tertuang dalam forum tersebut, maka LSF merasa penting mendokumentasikannya dalam sebuah buku bunga rampai, yang untuk penguatannya juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Pemikiran-pemikiran yang sangat berharga tersebut, kami rangkum dan terbitkan dalam sebuah buku berjudul *Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film*. Buku itu diluncurkan bersamaan dengan acara Peringatan 100 Tahun Sensor Film, yang dihadiri dan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy pada Jumat, 18 November 2016.

Kesembilan, Untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pegiat dan pelaku usaha Perfilman, atas kepatuhan mereka dalam melaksanakan Sensor Film dan





penerapan budaya sensor mandiri dalam karya-karyanya, LSF mengaggas perlunya program “Anugerah LSF”. Sebagai gagasan baru, tentu tidak serta merta gagasan tersebut dipahami dan diterima, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, sebagai program baru, hal itu terkait dengan program penganggaran dan persoalan teknis lainnya. Secara eksternal, ada yang mempertanyakan tentang kemungkinan adanya duplikasi dengan anugerah-anugerah serupa yang telah ada. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, akhirnya hal-hal tersebut dapat diatasi dan dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya, “Anugerah LSF” yang pertama dapat dilaksanakan pada 2017.

Demikianlah, langkah-langkah yang kami lakukan sebagai Ketua LSF bersama 16 Anggota lainnya, dalam mengawal masa transisi pergantian dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang LSF, ke Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, sepanjang masa bakti 2015-2019. Masa empat tahun tentu bukan waktu yang cukup untuk memperjuangkan sebuah gagasan. Namun setidaknya, sudah cukup untuk membangun sebuah fondasi bagi paradigma baru tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film yang independen, di tengah perubahan dan demokratisasi sesuai amanah Reformasi 1998 serta memperhatikan tantangan era digital. Oleh karena itu, saya merasa yakin dan percaya kepada Anggota LSF (2020-2024), di bawah kepemimpinan Pak Rommy Fibri Hardiyanto, dalam mengawal *continuity & change* (keberlanjutan & perubahan) dan mampu membawa LSF menjadi lebih baik lagi.

JATI DIRI:

Nama Lengkap: Ahmad Yani Basuki

Tempat & Tanggal Lahir: Blitar, 5 Maret 1956

Anak Nomor: 4 dari 6 bersaudara

Nama Orang Tua: Padhoni & Hj. Atmah.

Nama Istri : Nurul Fauzah

Nama Anak : 1. dr. Aulia Putri Nurjannah + Mayor Inf. Miftahul Khoir

2. Kapten Inf. Dimas Agung Fatahillah STHan + Karina Hafidha

3. Letda Laut (H)Ali Azhar Hidayatullah, S.H + R. Candy Andhika

Nama Cucu : 1. Ghaziah Afiqah Putri,

2. Ghaisan Ibnu Khair

3. Rafandra Zehan Azhar,

4. Kiera Aqmarina Elham

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Umum

1969 Sekolah Rakyat Negeri Mangunan, Udanawu, Blitar

1973 Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun, Blitar

1975 Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun, Tulungagung

1982 Program S-1 Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, Surabaya

2002 S-2, Manajemen Pembangunan Sosial, FISIP-UI 2007

S-3, Sosiologi Militer FISIP UI

Gelar : Dr., MSi.

Pendidikan Militer

1984 Sekolah Perwira Wajib Militer

1984 Kursus Perwira Ajudan Jenderal

1985 Kursus Perwira Pembina Mental

1992 Kursus Lanjutan Perwira

1994 Kursus Lanjutan Perwira

2007 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD)

Riwayat Kepangkatan

1984 Letnan Satu (Lettu)

1991 Kapten

1995 Mayor

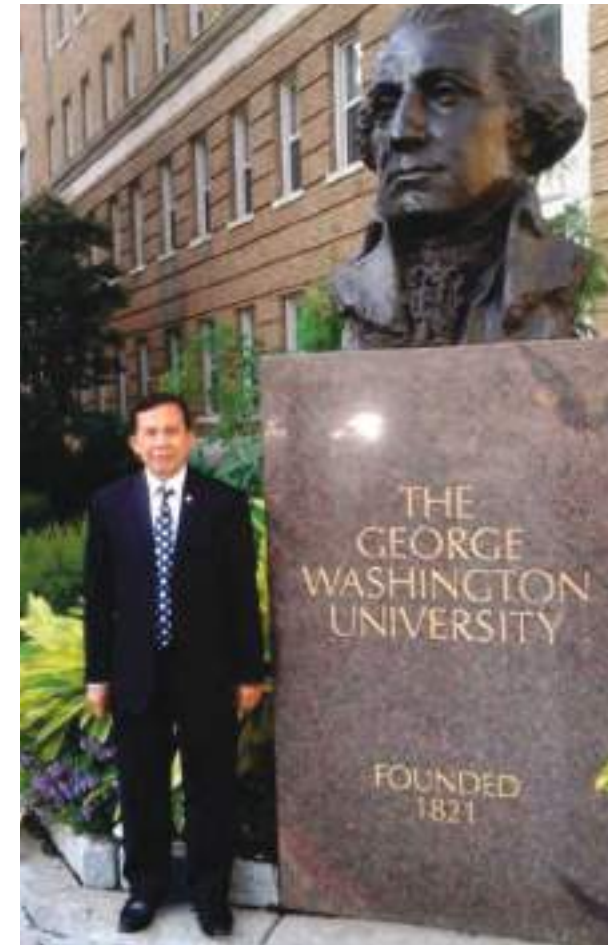
1999 Letnan Kolonel

2004 Kolonel

2009 Brigadier Jenderal

TNI

2013 Mayor Jenderal TNI



ADAPTIF DAN KOLABORATIF

Andi Muslim S.Ds., M.Si Ketua Subkomisi Media Baru

Kebudayaan saya di Lembaga Sensor Film (LSF) periode 2020-2024 adalah sebagai wakil dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang merupakan salah satu unsur dari Pemerintah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 18/2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF), anggota dari unsur Pemerintah terdiri atas kementerian / lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan 1 (satu) orang; b. kebudayaan 1 (satu) orang; c. komunikasi dan informasi 1 (satu) orang; d. agama 1 (satu) orang; dan e. ekonomi kreatif 1 (satu) orang.

Di LSF, karena minat utama saya pada ilmu komunikasi, maka saya kemudian ditunjuk menjadi Ketua Subkomisi Media Baru. Suatu tantangan yang seru dan sangat menegangkan. Terutama karena sebagai anggota dari generasi milenial di LSF, media sosial (medsos) merupakan media komunikasi yang tidak bisa dihindari di era transformasi *second media age* ini.

Dalam industri perfilman gempuran digital juga terjadi. Hal ini menjadi tugas berat bagi LSF dalam menjalankan peran sebuah lembaga negara yang menjalankan tugas penyensoran film dan iklan film sebelum ditayangkan. LSF memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan literasi melalui cara yang lebih mengena kepada masyarakat tanpa menimbulkan kesan kaku. Luwes tapi berisi.





Dengan Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto



Kunjungan dan penjelasan ihwal Budaya Sensor Mandiri LSF

Perkembangan teknologi informatika di dunia saat ini telah dan akan mengubah lansekap dan pola konsumsi konten serta tayangan. Film-film yang ditayangkan ke khalayak umum melalui media layar lebar di bioskop dan layar kaca di televisi, kini harus bersaing dengan pelbagai tayangan di layar gawai / *gadget*. Hal itu merupakan fenomena yang sangat menarik. Segmen pasar menjadi semakin terkelompok dalam varian yang semakin banyak. Namun, karena setiap media memiliki karakter, kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka setiap media menghadirkan pengalaman yang berbeda pula. Dengan demikian, pada akhirnya setiap media akan tetap memiliki audiensnya masing-masing.

Merujuk pada teori media sosial dalam perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi, dalam pemanfaatan media sosial ada tiga bentuk yang mengarah pada makna bersosialisasi yaitu pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerjasama (*cooperation*). Hal serupa juga diterapkan dalam pemanfaatan media sosial LSF selama kurun waktu tiga tahun ke belakang. Pengelolaan media sosial LSF selama 2020 fokus pada pengenalan profil LSF kepada audiens dengan kemasan konten yang sifatnya menarik *followers*. Contohnya melalui konten-konten kuis yang menawarkan hadiah-hadiah menarik.

Berlanjut ke tahun 2021, pengelolaan media sosial berkembang tujuannya menjadi komunikasi. LSF mulai rutin menghasilkan konten-konten yang lebih atraktif dan mengena dengan usia target audiensnya. Tujuannya adalah agar



Bersama para mahasiswa magang media sosial LSF

informasi yang ingin disampaikan dapat diterima oleh followers. Contohnya melalui konten-konten TikTok dan konten *Panduan Film* di Instagram yang mengemas informasi dengan cara kekinian agar dapat dikomunikasikan kepada target *followers*.

Dulu kita menggunakan media *mainstream*, seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi, untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi. Namun sekarang, dengan berkembangnya teknologi informatika, semua sudah bisa hadir di genggaman tangan. Wajar bila saya kemudian berusaha mengembangkan akun-akun media sosial milik LSF seperti *YouTube*, *Twitter* (kini *X*), *Instagram*, *facebook*, dan *TikTok*. Tak ayal, akun Instagram LSF, misalnya, yang sebelumnya stagnan di kisaran 1000 *followers*, saat ini sudah tembus lebih dari 12 ribu *followers*. Sementara akun TikTok yang usianya belum genap setahun, kini telah memiliki lebih dari 2.000 *followers*.

Melalui medsos yang menjangkau usia pengguna 15 - 35 tahun, LSF mengajak masyarakat untuk memahami tontonan dengan baik dan benar. Terutama karena salah satu tugas dan fungsi LSF adalah meneliti, menilai dan menetapkan klasifikasi atau penggolongan usia bagi setiap materi tontonan yang disensor, sebelum dapat ditayangkan ke khalayak umum.

Melalui penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), LSF menetapkan klasifikasi usia untuk penonton semua umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+) dan 21 tahun ke atas. Karena itulah, investasi sosial budaya yang dilakukan LSF adalah menuju kepada pemahaman manusiaya sebagai

(calon) penonton terhadap pelbagai tontonan yang beredar di bioskop, televisi, cakram digital dan jaringan informatika. Sehingga, kendati pelbagai jenis tayangan beredar secara liar, maka bila seseorang sudah paham akan wilayah atau batasan usianya, maka dia tidak akan menontonnya bila tontonan itu tidak sesuai dengan klasifikasi usianya.

Menggunakan dan memanfaatkan pelbagai media sosial yang ada dan terbaru, merupakan salah satu upaya LSF untuk tetap relevan dengan *trend* dan isu terkini di masyarakat. Dalam pengelolaan pelbagai platform media sosial LSF, selain didukung tim kreatif internal, saya juga dibantu para mahasiswa magang, yang merupakan program yang diselenggarakan LSF sejak 2020, dan yang hingga September 2023 merupakan angkatan yang kesembilan.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai wadah aktualisasi dan penerapan ilmu bagi maha-

Bersama tim CGV ihwal Kampanye Budaya Sensor Mandiri LSF dan GPBSI



siswa tidak luput dari perhatian LSF. Selama tahun 2020 sampai dengan 2022, LSF turut ambil bagian mendukung program MBKM dengan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk magang di LSF.

Tercatat dari 2020 sampai dengan 2022, sekitar 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia yang mengikuti program magang di LSF. Para mahasiswa magang ini ditempatkan di pelbagai bidang tugas yang ada di LSF, salah



Produksi Iklan Layanan Masyarakat LSF

satunya Subkomisi Media Baru. Kehadiran mahasiswa magang ini memberikan warna baru dalam pengelolaan media sosial LSF. Ide-ide segar dengan pengemasan yang interaktif dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan keseharian mereka, menjadikan konten-konten yang dihasilkan lebih berwarna tapi tetap sarat informasi. Hal ini dapat mereduksi jarak LSF sebagai entitas lembaga pemerintah dan masyarakat, melalui bahasa yang memang dekat dengan kehidupan keseharian orang banyak.

Menurut saya, program magang itu sangat baik bagi kedua belah pihak. Bagi pihak kampus,



Wawancara media saat kampanye Gelora Asean Games 2018.



Diskusi publik bersama para influencer di Jogjakarta.

akan dapat memenuhi program magang yang merupakan bagian dari kurikulum merdeka. Dan, bagi para mahasiswa, melalui program magang tersebut, mereka mendapatkan pembelajaran yang sangat baik di dunia kerja nyata, yang dapat mereka bandingkan dengan ilmu yang mereka terima dari kampus. Mereka akan mendapatkan banyak hal menarik sebagai bekal bagi dunia pekerjaan yang kelak mereka inginkan atau dapatkan.

Para mahasiswa yang bekerja magang di LSF merupakan sumber pencerahan, antara lain, dalam pengemasan bahasa populer yang sedang tren di kalangan mereka. Artinya, LSF dapat mereduksi jarak sebagai entitas lembaga pemerintah dengan masyarakat, melalui penggunaan bahasa yang dekat dengan kehidupan keseharian orang banyak. Dengan demikian, akan meleburkan batas generasi, batas budaya, dan batas nilai sosial yang menjadi pembelajaran bagi kedua belah pihak.

Berkat kehadiran generasi muda para mahasiswa yang energi, semangat, dan kreativitasnya luar biasa itulah maka program-program komunikasi LSF menjadi lebih menarik. Semangat dan kreativitas para mahasiswa yang bertemu dengan batasan-batasan regulasi lembaga pemerintah, akhirnya dapat menemukan titik pijak yang sama, untuk menghasilkan ramuan yang tepat guna, dalam mengemas pesan komunikasi audio/visual LSF. Suatu hal yang merupakan pengalaman



Pembicara dalam program Literasi Digital bersama Ditjen Aptika Kominfo



Narsum Cakap Digital bersama Ditjen Aptika Kominfo dan tim komunikasi Keraton DIY

menarik dan unik, tidak hanya bagi para mahasiswa, tapi juga bagi para anggota LSF, khususnya yang berada di Subkomisi Media Baru.

Minat dan ketertarikan saya pada ilmu komunikasi, tentu bukan hanya karena saya memiliki bakat di bidang seni grafis dan desain. Tapi, karena saya memang telah mengenyam pelbagai pendidikan di bidang komunikasi. Gelar S.Ds. (Sarjana Desain), misalnya, saya peroleh dari Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemudian S-2 Ilmu Komunikasi saya peroleh dari FISIP-UI.

Saya juga sering berpindah pekerjaan, sebelum kemudian bekerja di Kemenkominfo. Bila dihitung, saya sudah bekerja selama 22 tahun di industri kreatif. Mulai dari Founder Brand X (Brand & Branding Consultant), Assistant Manager for Marketing Communication di Gran Melia Hotel Jakarta, dosen di Institut Bisnis Nusantara dan Yayasan Akuntansi Indonesia, Head of Communication Division Gibbon Foundation Bogor (Branding Designer), serta di Makki Makki Branding Consultant Jakarta. (urutannya dibalik)

Semasa kuliah, saya sangat aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Antara lain menjadi Anggota Keluarga Mahasiswa Seni Rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, lalu menjadi Direktur Humas Ganesha TV Unit Campuss ITB, dan terakhir



Pesta Rakyat-Dukung Bersama Kampanye Asean Games 2018

menjabat Presiden Ikatan Pemuda-Pemudi Desain Grafis, Desain Komunikasi Visual ITB.

Pengalaman penting dan sangat berkesan bagi saya adalah saat saya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Diseminasi Asian Games 2018, dan selanjutnya menjadi Ketua Tim Komunikasi Asian Para Games (2018). Saya dipercaya mengelola perencanaan anggaran sampai program. Itu luar biasa besar bagi saya. Terutama ketika diangkat sebagai juru bicara, yang memungkinkan saya bertemu dengan banyak wartawan, tampil di pelbagai media televisi dan media cetak, untuk menyuarakan gelora Asian Games.

Selama menjadi Anggota LSF, sebelum dan sesudah jam kerja, dan terutama pada hari libur, saya selalu menyalurkan hobi menonton, terutama ke bioskop. Nonton di rumah tentu oke, tetapi akan lebih seru jika datang ke bioskop. Karena suasana di dalam gedung bioskop sangat berbeda ketimbang di rumah, dan saya

senang mengamati dan memperhatikan apa dan bagaimana reaksi para penonton saat berada di dalam studio.

Selain hobi menonton, jadwal olah raga saya juga cukup padat. Dari *cardio* hingga *full body workout*. Salah satu olah raga yang paling saya gemari adalah *push up*. Gerakan *compound* ini mengaktifkan banyak otot, baik otot besar maupun otot kecil, pada saat yang bersamaan. *Push up* juga membantu membetulkan postur tubuh melalui beberapa variannya. Mulai dari *regular push up*, *incline push up*, *decline push up*, *diamond push up* hingga *archery push up*.

Selama bekerja sebagai Anggota LSF hingga tahun keempat ini, dan setelah saya mengamati fenomena yang terjadi akibat kecepatan perkembangan teknologi



Di depan para mahasiswa ihwal peran media sosial bagi komunikasi pemerintah.

informasi, saya sampai pada kesimpulan dan saya percaya, saat ini kita sudah harus segera meninggalkan *mindset* kompetisi. Sebab, pada kenyataannya, perkembangan teknologi dan informatika telah membolehkan kita untuk membuka jendela peluang seluas-luasnya untuk berkolaborasi, tumbuh bersama, serta saling menopang untuk kepentingan yang lebih besar.

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dan perkembangan teknologi informatika secara umum, merupakan proyeksi pola konsumsi konten masa depan, yang ujungnya nanti masih belum bisa kita bayangkan akan seperti apa. Kita juga tidak akan tahu apa dan bagaimana *trend* pola komunikasi dan konsumsi konten dan tayangan kita pada masa datang.

Yang jelas, setiap netizen harus siap dan harus memahami betul akan konsep egaliter di strata media sosial global saat ini. Yakni, semua orang dapat berkomunikasi dengan siapa pun dari mana pun dan kapan pun. Dan, itulah yang



harus diantisipasi dan direspons oleh regulator, dalam hal ini Pemerintah. Oleh karena itu, masa depan komunikasi publik Pemerintah akan dan harus selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi informatika, dan itu merupakan tantangan besar yang sangat menarik.



Bersama Tissa Biani dan tim saat produksi Iklan Layanan Masyarakat



JATI DIRI:

Nama Lengkap:

Andi Muslim S.Ds., M.Si

Tempat & Tanggal Lahir:

Jakarta, 8 Februari 1980

Nama Orang Tua:

Andi Fathoeddin & Rafiah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1986 - 1992: SD 17 Jakarta

1992 - 1995 : SMP 46 Jakarta

1995 - 1998 : SMA 28 Jakarta

1998 - 1999 : Advertising dan Communication - Interstudi Jakarta

1999 - 2004 : Desain Komunikasi Visual - Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Gelar: S.Ds. (Sarjana Desain) dari FSRD ITB

2012 - 2014 : Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana FISIP-Universitas Indonesia.



DARI FILM UNTUK FILM

Arturo Gunapriatna
Ketua Subkomisi Kemitraan
dan Sosialisasi

*betapa panjang perjalanan
kita tak pernah istirahat
betapa panjang ini perjalanan
betapa panjang bayangan TUHAN*

Syair lagu dari pementasan Teater Ketjil Arifin C. Noer berjudul *Dalam Bayangan Tuhan* (1979), ini sudah menjadi bagian yang tersimpan dalam memori saya. Bahwa berteater adalah salah satu perjalanan hidup saya yang sangat penting. Dimulai dari menjadi kader Karang Taruna di kampung saya Pisangan Lama, dengan latihan dasar 'Kepemimpinan' di Kelurahan Pisangan Timur. Dari situ saya merasa memiliki tanggung jawab membina remaja sekitar tahun 1970-an.





Awalnya saya membentuk grup vokal Mandefro. Saat itu, di kalangan anak remaja kelas menengah memang sedang *trend* menyukai *vocal group* (*folk-song*). Itulah awal saya memasuki dunia kesenian. Dan, karena sudah terlanjur *kecebur*, akhirnya saya mengisi waktu sekolah saya dengan bergabung ke kelompok Teater Gelanggang Remaja Jakarta Timur (Teater GRJT). Waktu itu, saya ikut Murni Rajagukguk yang cantik, yang tak lain adalah tetangga dan kakak kelas saya di SMP. Di situ saya berkenalan dengan Syarifudin Ach seorang pewarta sekaligus penyair muda bersama aktor teater Dorman Borisman. Saat itu, Dorman juga sudah bergabung dengan kelompok Teater Ketjil pimpinan penulis lakon dan sutradara Arifin C Noer (10 Maret 1941 - 28 Mei 1995). Dorman pun sudah mulai menjajaki keaktoran di dunia film.

Di Teater GRJT itulah saya mengasah bakat dan minat kesenian saya. Baik sebagai aktor, figuran, koordinator kepastakaan, artistik, penata kostum dan lain-lain. Dari situ pula saya mengenal Taman Ismail Marzuki - Pusat Kesenian Jakarta (TIM-PKJ), di mana kami harus mengapresiasi pertunjukan-pertunjukan Teater Ketjil Arifin C Noer, Bengkel Teater Rendra, Teater Mandiri Putu Wijaya dan lain-lain. Sebelum kemudian ikut berkompetisi di ajang Festival Teater Remaja (FTR) Jakarta era 1970-an sampai awal 1980-an. Tidak hanya teater, kita juga wajib menghadiri pelbagai pameran lukisan, diskusi kebudayaan, pertunjukan tari, film dan lain lain.

Berkat keintiman saya dengan dunia teater itulah atas arahan guru teater saya, almarhum Syarifudin Ach, saya kemudian didorong untuk masuk ke Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) yang kelak menjadi Institut Kesenian Jakarta (IKJ), jurusan Sinematografi. Akhirnya minat dan tujuan hidup saya mulai beralih, dari teater ke dunia film, yang lebih menantang. Karena kesibukan kuliah dan merintis karir di film, dunia teater akhirnya saya tinggalkan, walau sekali-sekala masih ikut main dan membantu beberapa produksi Teater GRJT. Grup yang berkat kemenangan tiga kali berturut-turut di FTR Jakarta, kemudian dinobatkan sebagai grup senior dan harus mengisi agenda pertunjukan teater di TIM.

Meninggalkan dunia teater adalah pilihan dalam meniti profesi saya, hingga saya malang melintang di dunia film, sampai mencapai profesi yang lumayan mapan dalam hidup saya. Setelah lulus LPKJ-IKJ, saya memulai karir di dunia film dengan mencoba peruntungan di Pustekkom Dikbud (Pusat Teknologi Komunikasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), sebagai tenaga honorer editor film. Saya memilih bekerja di Pustekkom karena saya merasa masih harus banyak belajar tentang teknologi film yang saya minati, sebab di lembaga itu peralatan film dan



Di KBRI Addis Ababa - Ethiopia. Ibu Bapak, saya (tengah) dan dua abang saya. Sementara empat kaka lainnya tinggal di Indonesia karena sekolahapak

televisinya terbilang mutakhir berkat bantuan dari USAID (Amerika Serikat).

Pada perjalanan awal itu saya mengerjakan beberapa film dokumenter untuk Pustekkom. Dan yang membanggakan, saya sebagai editor bersama dengan sutradara, untuk pertama kalinya telah mengangkat nama Pustekkom ke kancah perfilman Indonesia pada 1983. Saat itu, salah satu karya saya berjudul *Laor*, memenangi Festival Film Indonesia (FFI) untuk kategori Film Dokumenter Pendidikan, yang mengangkat anak SMA di Ambon, Ravenska, juara pertama Lomba Karya Ilmiah Peringkat Remaja (LKIPR) tingkat Nasional.

Selanjutnya bersama Arswendo Atmowiloto (alm), saya menyelesaikan *dummy* film serial pertama kerjasama TVRI - Dikbud berjudul *Aku Cinta Indonesia* (ACI). Dari *dummy* itulah akhirnya serial ACI dibuat dalam beberapa seri lepas. Kisahnya



tentang dunia siswa SMP, dan serial itu kemudian menjadi salah satu tayangan populer di TVRI. Toh, karena saya tidak ingin menjadi pegawai negeri, dan sebagai anak muda saya masih ingin bebas, maka tawaran dari kepala Pustekkom untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta disekolahkan ke Syracuse University, Amerika Serikat, dengan “gagah dan bodohnya” saya tolak!

Dari Pustekkom saya meniti karir ke industri film sebagai tenaga lepas (*freelance*). Awalnya menjadi asisten Benny MS, editor senior di Parkit Film milik Ram Punjabi, sebelum kemudian menjadi asisten para editor senior lainnya (Karsono Hadi, Efendy Doyta, Norman Benny dll). Juga menjadi asisten editor beberapa sutradara dengan pelbagai *genre* film, terutama *action*, *drama*, dan *komedi*.

Berkat lingkungan profesi itulah saya kemudian mengenal dekat sutradara film senior seperti MT Risyaf, Arizal (11 Januari 1943 – 18 Mei 2014) dengan komedi Warkop-nya, Sophan Sophiaan (26 April 1944 – 17 Mei 2008), Chairul Umam (4 April 1943 – 3 Oktober 2013), Bobby Sandy (*Cinta di Balik Noda*), Slamet Rahardjo (*Kodrat*) dan akhirnya menjadi asisten editor *full* saat mengedit film karya Nya' Abbas Akup (22 April 1932 – 14 Februari 1991) berjudul *Semua Karena Ginah*. Berkat perkenalan saya dengan (alm) Nya' Abbas Akup-lah saya kemudian dipercaya untuk menjadi editor penuh dalam film berikutnya di Parkit Film *Cintaku di Rumah Susun*, yang mendapatkan nominasi editor terbaik pada Festival Film Asia Pacific di Bangkok (1987), dan kemudian film *Kipas-kipas Cari Angin*.

... *betapa panjang perjalanan* ...

Garin Nugroho, adik kelas saya di LPKJ-IKJ, adalah sosok muda cerdas berwawasan dan memiliki idealisme tinggi dalam pembuatan film. Terbukti, beberapa film dokumenternya telah memberikan warna baru dalam dunia film dokumenter, sejak dokudramanya *Tepuk Tangan* memenangi Piala Citra FFI untuk kategori dokumenter. Pertemanan dan persahabatan saya dengan Garin bisa terjalin, terutama karena kami memiliki idealisme yang sama. Saya lalu mendampingi film layar lebar pertama Garin *Cinta Dalam Sepotong Roti* produksi PT Prasidi Teta Film, sekaligus menjadi tim kreatifnya dalam mengolah *story telling* / skenario. Pada FFI 1991, film itu memenangi Piala Citra sebagai Film Terbaik, dan meraih beberapa Piala Citra lainnya, termasuk Editor Terbaik untuk saya.

Kecocokan dalam membuat film-film “khusus” itu membuat saya juga menjadi tim kreatif / co-director / editor pada film Garin berikutnya yang juga diproduksi Prasidi Teta Film, *Surat Untuk Bidadari* (1995). Film yang berlokasi di tanah



Di Keraton Solo. Bersama Garin Nugroho dan tim SET saat syuting Bulan Tertusuk Ilalang (1995)

Sumba, itu mengangkat tema masuknya budaya populer Barat dalam budaya tradisi Sumba. Film itu juga merupakan debut bagi Garin Nugroho, untuk berlaga di kancah festival-festival film internasional. *Surat Untuk Bidadari* antara lain, memenangi pelbagai kategori penghargaan di Berlin Film Festival, Locarno Film Festival, Tokyo International Film Festival, Asia Pacific Film Festival di Vietnam, dan lain-lain. Selanjutnya hampir di semua karya film Garin saya selalu terlibat. Baik sebagai editor, co-director, atau coaching pemain (*casting Director*). Misalnya dalam film *Bulan Tertusuk Ilalang*, *Rindu Kami Pada Mu*, *Puisi Tak Terkuburkan*, *Under The Tree* dan *Opera Jawa*. Juga dalam sebagian besar proyek film dokumenternya seperti *Anak Seribu Pulau* (Miles Production). Bahkan, saya menjadi sutradara salah satu seri itu yang berjudul *Pecilen dari Indramayu*.

Kebersamaan dengan Garin Nugroho akhirnya mengilhami kami membuat semacam tempat Workshop Film yang kami beri nama Sains Estetika Teknologi (SET), bersama Riri Riza, Yadi Sugandhi, dan Nan T. Achnas. Dalam perjalanannya, SET sempat timbul tenggelam terutama dengan terjadinya perubahan politik di negeri ini pada 1998-1999 (Reformasi). SET akhirnya berubah bentuk menjadi rumah produksi PT SET Film yang melahirkan *Visi Anak Bangsa*, sebuah lembaga



swadaya masyarakat (NGO) yang mendapat dana dari USAID untuk membuat beberapa iklan layanan masyarakat sebagai “*civic education*” menyambut Pemilu pertama era Reformasi (1999). Dan, yang paling fenomenal dari karya Visi Anak Bangsa adalah iklan “*Inga-Inga bapesta rame-rame*” tentang pemilu.

SET kemudian membuat beberapa film iklan layanan masyarakat, dokumenter, dan film televisi pesanan instansi pemerintah maupun swasta. Antara lain, PLN, Jasa Marga Tol, Kemenkumham, DAAI TV, Indofood, PT Djarum dan lain-lain. Biasanya, saya bertindak sebagai sutradara, co-sutradara, supervisi post, dan tim kreatif. Film dokumenter karya SET yang cukup menjadi *trendsetter* televisi adalah *Pustaka Anak Nusantara* milik Indofood. Yakni, dokumenter anak dari 32 provinsi di Indonesia yang mengusung isu multikulturalisme, dilanjutkan dengan *Ensiklopedia Anak Nusantara*, bekerja sama dengan Kompas TV. Selain produk dokumenter dan iklan, SET juga membuat beberapa video clip para penyanyi populer saat itu, seperti Krakatau, Yana Julio dan Katon Bagaskara. Videoklip lagu *Negeri di Awan* milik Katon Bagaskara memperoleh beberapa penghargaan dalam ajang sayembara videoklip PT CUT Jakarta termasuk editing .

Berkat keterlibatan saya di SET, saya banyak mengenal tokoh muda di bidang politik, yang sebelumnya merupakan aktivis penggerak reformasi, seperti Hinca Panjaitan, Indra J. Piliang, Yudi Chrisnandi, dan Agus Pambagio. Dari pergaulan itulah saya mulai mengenal dunia politik nasional maupun internasional karena bersentuhan dengan USAID.

Yang menarik, perjalanan saya bersama Garin dengan SET-nya – entah kenapa komunitas ini bernama SET – yang awalnya tanpa sadar logonya berlambang “burung ababil dari neraka”, karena ditegur seorang kyai, lalu diubah logonya menjadi “katak hijau” binatang amfibi yang hidup di dua alam. Dan SET ternyata kok secara bunyi seperti “Seth” yang dalam narasi agama samawi, adalah seorang nabi, anak Adam as, selain Habil dan Qobil, yang memiliki pengetahuan, ilmu kehidupan dan ketakwaan. Itu mungkin kebetulan-kebetulan yang tidak Garin dan saya sadari, saat melabeli komunitas itu bernama SET. Tapi ketika seorang wartawan senior Kompas yang sedang meliput syuting *Opera Jawa*, dan melihat kekompakan saya bekerja dengan Garin, bertanya pada saya mengapa saya tidak mau menjadi sutradara seperti Garin, langsung saya jawab dengan spontan: “Kenapa sih kita harus selalu menjadi manusia nomor satu? Saya hanya ingin menjadi orang nomor dua. Saya hanya ingin menjadi “sahabat” dari orang yang “istimewa” seperti Garin. Bahkan seorang nabi pun perlu sahabat yang menjaga, dan mendukung agar pikiran atau misinya tercapai di kalangan masyarakat”



...*kita tak pernah istirahat*....

Selain di SET Production, selaku *professional freelance filmmaker*, saya beberapa kali menjadi editor film industri *mainstream*. Antara lain film *genre* remaja *Isabela*, *Valentine*, *Irisan-Irisan Hati*, *Cinta Anak Zaman* dan *Lupus*. Saya juga sempat menjadi sutradara dan editor untuk beberapa film *action*, antara lain *Babad Tanah Leluhur* (nominee Editor Terbaik FFI 1993), *Si Rawing*, *Gadis Metropolis2* dan yang paling fenomenal adalah *Gairah Malam*, *genre action sex* yang meraih 600 ribu penonton dan saat itu dianggap sebagai *box office*. Kemunculan film-film bertema sensual pada akhir 1990-an itu tak lain karena film layar lebar mulai terasangi oleh industri televisi swasta yang mulai ramai.

Dalam industri televisi, perjalanan saya juga panjang. Sempat menyutradarai beberapa seri film anak, antara lain *Sahabat Pilihan*, *Nyi Cemplon*, *Kisah Sebening Kasih*, *Seindah Bunga Teratai* produksi DAAI TV dan film *genre action* petualangan *Perjalanan*, dengan pemain Tamara Bleszynski, Ari Wibowo dan Primus, milik Multi Vision Plus (MVP). Menjelang reformasi 1997-1998, setiap kali tayang di televisi selalu masuk dalam peringkat 10 besar sinetron kesukaan publik. Karena tuntutan pragmatis kebutuhan keluarga, kiprah saya di industri televisi terus berlanjut, dan saya memutuskan untuk bekerja tetap di Rumah Produksi Avicom Prima sebagai manajer post produksi sekaligus *quality control* (QC) pada 2001-2004, sambil tetap membantu SET pada sore/malam hari. Kerja menetap dengan kerutinan waktu yang membosankan, tentu membuat saya harus membiasakan diri. Syukur sebagai senior SET (Komisaris), saya kadang masih bisa *nyambi* bikin film iklan, dan lain-lain. Dan, itu cukup melelahkan karena harus datang setelah jam kantor di Avicom usai.

Selain di industri film dan televisi, sejak 1995 saya diperbantukan sebagai asisten dosen editing Soemardjono di FFTV-IKJ. Konon Pak Soemardjono (31 Maret 1927 - 28 Agustus 1998) adalah militer di belakang layar, bekas anak buah Mayor Jenderal Ali Moertopo (23 September 1924 – 15 Mei 1984). Setelah meraih S2 Seni Urban di IKJ Pasca Sarjana, sekitar 2014 -2015, saya sempat diperbantukan mengajar di FISIP UI – Komunikasi, dan di Vokasi Komunikasi UI.

Saya mengenal Lembaga Sensor Film (LSF) secara langsung ketika saya memprotes hasil penyensoran terhadap film produksi SET *Mencari Madonna* karya sutradara John De Rantau, yang mengangkat isu penyakit HIV / AIDS di Papua. Kami protes terhadap LSF karena ada pemotongan gambar kelamin ketika seorang dokter sedang menerangkan bahaya HIV sebagai penyakit kelamin. Saya yang



kebetulan ditugaskan oleh SET untuk melakukan dialog, dan bertemu Ibu Titi Said, Ketua LSF saat itu. Kami protes karena kami menganggap gambar kelamin pada adegan pelajaran seks oleh dokter, masih kontekstual dengan tuntutan cerita. Terutama karena film tersebut memang ditujukan untuk pembelajaran seks di tingkat remaja melalui film.

Dari peristiwa itulah saya menganggap perlu ada orang film atau orang yang mengerti film, yang mampu memahami dan membaca film di LSF. Sebuah lembaga negara penentu keberlangsungan dan kehadiran film di hadapan publik. Pada akhir dialog dengan Ibu Titi Said, terlontar pertanyaan, adakah perwakilan orang film di lembaga sepenting itu dan mungkinkah kami bisa menjadi perwakilan orang film di lembaga itu?

... betapa panjang ini perjalanan....

Jonathan Black dalam pengantar bukunya *Sejarah Dunia Yang Disembunyikan* (terjemahan dari *The Secret History of the World* - 2007) menyatakan:

"...Saya telah mencoba untuk menjauh dari pemikiran sekarang ini bahwa perkumpulan-perkumpulan rahasia, merupakan komplotan yang beranggotakan orang-orang tua jahat, yang berkonspirasi untuk menguasai dunia. Saya mengatakan, di luar pengertian laki-laki atau perempuan, muda atau tua, mereka adalah penjaga arus bawah tanah yang misterius, yang mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada kita – terutama sekarang, ketika agama yang ada gagal mengatasi naiknya materialisme."

Kutipan di atas bukan ingin menyamakan LSF dengan "perkumpulan rahasia" atau perkumpulan "arus bawah tanah yang misterius", tidak sama sekali. Perjalanan saya ke LSF dan kemudian mengalami sendiri kehidupan di dalamnya, adalah cerita panjang yang menurut saya menarik: antara biografi, fiksi dan misteri...

Pada periode awal berlakunya undang-undang perfilman yang baru, yakni UU No. 33 Tentang Perfilman Tahun 2009, yang menggantikan UU No. 8 tentang Perfilman Tahun 1992, saya sedang menjadi anggota panitia FFI 2013. Kantor kepanitiaan FFI itu berada di Gedung Film, Jl. MT Haryono kav 47-48, Jakarta Selatan, tempat yang sama dengan kantor Lembaga Sensor Film (LSF) waktu itu.

Dalam pergaulan sebagai panitia, ada yang menyarankan agar saya mendaftarkan diri sebagai anggota LSF, karena sebentar lagi akan ada pergantian anggota. Lalu saya bertanya pada teman orang film senior yang sudah lama hilir mudik di Gedung Film. Tapi jawabannya menyiratkan untuk apa di LSF, honorinya kecil



Di Teater Arena TIM. Bersama Dorman Borisman, Hari Patakaki dalam pementasan Don Juan oleh Teater Jakarta Timur (1985)

dan tidak penting. Jawaban itu justru menjadi tantangan bagi saya untuk mencari tahu bagaimana dan kenapa LSF begitu tertutup. Akhirnya saya mengetahui persyaratan lamaran dan jadwal terakhir memasukkan lamaran.

Dengan kondisi setengah hati, tanpa peduli diterima atau tidak sebagai anggota LSF periode 2015-2019, saya pun mengantarkan sendiri surat lamaran saya ke kantor LSF. Keinginan menjadi anggota LSF itu diawali semata ingin mencoba sekaligus melihat dunia film dari sudut pandang Negara. Sebelumnya saya menjadi salah seorang yang menginisiasi kelahiran Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan itu menjadi pintu masuk bagi saya dalam melihat "politik perfilman" yang diinginkan Negara. Karena itu, menjadi "pejabat" di LSF menjadi semakin penting bagi saya, sehingga saya memutuskan untuk mencoba masuk ke dalamnya. Walau sesungguhnya itu merupakan *paradox* dengan sikap-sikap saya selama ini yang menjunjung tinggi "kebebasan berekspresi."



Lamaran sudah masuk, dan saya kembali ke dunia film yang baru memiliki BPI dengan ketua beserta anggotanya. Walau saya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya merasa masih ada teman-teman yang sepaham dengan saya, sehingga bisa berkomunikasi dengan mereka mengenai segala ihwal tentang perfilman. Dari kawan anggota BPI, saya malah diberi tahu ada undangan untuk wawancara bagi penerimaan calon anggota LSF. Padahal tidak ada undangan ke rumah, ataupun ke email saya. Ternyata, dalam daftar calon peserta yang harus ikut wawancara, nama saya disamakan, dengan hanya mencantumkan nama belakang saya saja yang kurang dikenal, tentu dengan harapan agar saya tidak datang dalam wawancara.

Entah kenapa saya kok tidak diharapkan masuk menjadi anggota? Entah kekuatan apa yang mencoba melawan saya. Dan, entah kekuatan misteri apa pula yang kemudian menolong saya. Akhirnya saya ikut test wawancara langsung dengan Ditjen Kebudayaan saat itu, Pak Dr. Katjung Maridjan, bersama Ketua BPI Alex Komang (17 September 1961 - 13 Februari 2015) dan Dr.MQ Wisnu Aji Med. dari Biro Umum Kemendikbud. Alhamdulillah wawancara berjalan lancar dan sukses. Tapi itu belum selesai. Kesibukan pergantian rezim menjadikan urusan LSF simpang siur. Karena saya juga tidak begitu antusias, dan kabar beritanya juga tidak ada, maka saya pun ikut syuting dengan Garin Nugroho untuk film *Aach... Aku Jatuh Cinta!* sebagai *casting director*. Saya ikut sejak dari persiapan sampai syuting. Setelah syuting berjalan dua minggu di Jogjakarta, tiba-tiba ada panggilan telepon dari Sekretariat LSF, yang meminta agar saya segera ke Jakarta, untuk mengikuti *fit and proper test* dengan Komisi 1 DPR RI.

Singkat cerita, dari Jogja dengan kereta malam saya ke Jakarta dan langsung menuju ke gedung DPR, untuk *fit and proper test* dengan Komisi 1 DPR RI, dengan Tantowi Yahya sebagai ketua sidang. Memasuki sesi saya, Tantowi malah memuji pengalaman film saya yang agak berlebihan, padahal secara pribadi saya tidak banyak mengenal Tantowi. Tapi dia kok seakan membantu agar saya lolos, sehingga saya dengan mulus dan santai menjawab semua pertanyaan anggota DPR dari semua fraksi. Saya merasa tanpa beban, karena saya memosisikan diri tidak terlalu berambisi untuk lolos seleksi. Selesai dari DPR, hari itu juga saya langsung naik kereta malam menuju Jogja untuk melanjutkan syuting film Garin. Lalu saya lupakan LSF....!

Ternyata dalam perjalanan ini akhirnya saya terpilih menjadi Anggota LSF Periode 2015-2019. Tugas awal tentunya penuh dinamika, banyak perbedaan, saling mengasah dan mengasih sesama anggota, dan mencoba melihat film dari segala sudut pandang. Tapi entah terbentuk dari mana, saya kemudian harus mempo-



sisikan diri sebagai wakil banyak orang dari industri film dan televisi. Sehingga, saya harus memperjuangkan aturan-aturan baru yang dapat melindungi karya-karya film apapun bentuknya. Karena saya percaya, media film adalah media terpenting di masa depan, terutama melihat perubahan peradaban media digital yang sedang memasuki negeri kita.

Tanpa terasa periode pertama akan selesai. Tapi keramaian politik pemilihan presiden dan pemilu legislatif, mengakibatkan anggota Lembaga Sensor Film harus diperpanjang masa tugasnya. Keinginan lanjut atau berhenti menjadi gangguan dalam pikiran saya. Karena telah sekian lama saya meninggalkan lapangan kreatif, dan sekian lama mencoba menjadi “birokrat” yang dinilai sinis oleh teman-teman film, dan sekian tahun menjadi orang yang kehilangan kebebasan kesenimanannya.

Dalam suasana gundah gulana, beberapa anggota sejawat menyarankan agar saya tetap mencoba lagi mendaftar untuk periode kedua. Karena secara peraturan memang dibolehkan. Ditambah dengan dukungan teman-teman film yang mengharapkan kehadiran saya di LSF. Termasuk teman-teman yang dulu berjuang di SET maupun teman seperjuangan yang sekarang bergiat di *Ring 1* Pemerintahan. Dan yang paling membikin bingung sekaligus menetapkan hati untuk lanjut adalah, datangnya pesan-pesan misterius, yang muncul di tengah sunyi malam. Bisikan-bisikan lembut yang menyampaikan bahwa akan ada cobaan lagi. Akan ada peristiwa besar di dunia yang masih berhubungan dengan politik global. Persaingan Amerika Serikat dengan China yang berimbas ke negeri ini, termasuk penguasaan media dan hal lain. Akhirnya, dalam situasi antara mimpi dan kenyataan, dan atas dukungan keluarga, saya kembali mendaftar untuk menjadi anggota LSF periode kedua (2020-2024). Apakah akan mulus-mulus saja menuju perjalanan berikutnya...?

...betapa panjang bayangan Tuhan...

Kelolosan sebagai anggota LSF 2015-2019, setelah saya lihat kembali, bisa jadi hanya merupakan suatu keberuntungan, atau takdir hidup yang “menugaskan” saya untuk berperan di lembaga ini. Bukan peran besar, tapi mulai terasa sedikit-demi sedikit lembaga ini ditengok masyarakat film, para pemerhati film, dan sebagian kecil masyarakat umum.

Perjalanan menuju periode kedua, ternyata bukan jalan yang mulus-mulus saja, tapi penuh drama dan keajaiban baru dalam hidup saya. Diawali dari tulisan di Majalah Internal LSF *Sensor: “Kanan Kiri Oke”* kajian saya tentang generasi mile-



nial terhadap budaya populer yang mengusung ideologi kanan, dan kiri. Tulisan itu ternyata sampai ke salah seorang politisi dari fraksi yang populer di zaman Orde Baru (Orba). Saya pun dipanggil secara personal untuk menanggapi isu kalau di LSF periode ini disusupi orang-orang berideologi “kanan.”

Dengan diantar anggota senior LSF, saya menghadap di ruang pribadinya di gedung DPR RI. Pusinglah saya. Seorang seniman naif tiba-tiba masuk arus politik dan isu yang saya tidak pahami. Ternyata tulisan saya itu berkembang menjadi isu ideologi “kanan” mendominasi LSF, yang menurut saya LSF adalah lembaga biasa saja, yang mestinya kurang strategis dalam *frame* politik negara yang lebih besar. Saya disuruh menunjuk siapa saja orang-orang yang berideologi “kanan” itu. Tentu saja saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena, selain tidak etis, saya juga tidak mengerti persoalan yang dia maksud. Karena didesak terus, akhirnya saya hanya menjawab diplomatis, bahwa saya tidak paham, dan lembaga sebesar DPR, mestinya punya mekanisme untuk mencari tahu. Mulai dari rekam jejak akademik, jejak digital, dan hiruk pikuk peristiwa yang membangkitkan gerakan radikalisme dan intoleransi, dan lain-lain.

Akhirnya si anggota paham bahwa saya bukan orang yang cerdas untuk tahu soal itu, tapi saya hanya bekas pembuat film yang naif, sekaligus dosen pengajar film. Saya dengar dari obrolan sejenak dengan sebagian anggota fraksi di Komisi 1, konon DPR harus lebih selektif pada pemilihan anggota baru LSF periode berikutnya. Ternyata untuk calon anggota LSF periode 2020-2024, peminatnya bertambah tiga kali lipat. Yang mendaftar datang dari pelbagai kalangan, termasuk mantan birokrat, mantan anggota TNI / Polri, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), selain orang-orang film sendiri, dan lain-lain.

Seleksi pun dilakukan beberapa tahap. Mulai dari *assesment*, test psikologi, wawancara, sampai *fit and proper test* oleh Komisi I DPR RI. Melihat persaingan yang tambah banyak, ditambah tidak punya akses pada orang-orang politik maupun “orang dalam” di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), saya mulai pesimistis bisa lolos di periode ini. Akhirnya kembali saya jalani saja semua proses itu dengan santai. Mencoba keberuntungan tanpa harus melakukan *lobby*, mencari tahu, belajar keras, seperti yang telah dilakukan teman-teman lain.

Tapi pada suatu malam, di ruang khusus, secara serius, dalam bisik-bisik misteri, saya “melapor” dengan khusuk. Kalau memang saya harus bertugas kembali di lembaga ini, tuntunlah saya. Dibarengi dengan latihan spritual, fisik, dan fokus, karena usia yang mulai lanjut, untuk menghadapi semua ini. Ternyata, sikap pasrah



Usai Rapat Dengar Pendapat LSF Periode 2015-2019 dengan Komisi DPR RI

dan keikhlasan, berserah diri terhadap apapun tugas yang diberikan, kita harus siap menjalaninya, walau dengan ketidak sempurnaan. Puncak kepasrahan saya, pada sesi wawancara dengan pejabat SDM Kemendikbud yang disegani, terlontar ucapan saya: “Ibu, tidak penting saya diterima atau tidak, tapi tolong Ibu pilih orang-orang yang amanah, karena kekuasaan yang dimiliki anggota LSF, kalau tidak dibarengi dengan kebijaksanaan, karya film itu adalah tempat bergantungnya nasib sekian banyak orang kreatif, sekian banyak keluarga istri dan anak di belakangnya, yang bergantung pada produk film itu.” Selesai wawancara, sahabat saya yang ikut mendengar wawancara itu, langsung mengirim pesan WA ke saya: “Ibu itu nanya siapa orang itu, terus gue jawab “orang gila.” Itulah suasana awal seleksi keanggotaan dengan perasaan saya yang sudah pesimistis untuk lolos seleksi, dan melanjutkan kerja rutin sisa tugas-tugas di LSF.

Ternyata “takdir” masih berpihak kepada saya. Dari ratusan lebih pendaftar, terpilih 34 nama calon anggota baru LSF, dan nama saya termasuk di dalamnya. Bisa menyisihkan orang-orang yang kuat mengakses orang dalam, yang dekat dengan partai besar, dan lain-lain. Tapi selanjutnya, datang kebingungan kedua. *Fit and proper test* dengan Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.



Boro-boro punya kenalan politisi - kecuali seorang aktris cantik anggota DPR - terhadap dunia politik saya buta-buta melek. Melihat kawan-kawan lain “berge-rliya” mendekati para politisi, saya hanya bisa pasrah. Paling sederhana, saya mem-beri info pada teman-teman eks SET di WA group atas lolosnya saya, dan selanjutnya akan menghadapi DPR.

Malam hari yang sunyi, saya tetap melakukan ko-munikasi rahasia dan khusuk, dengan bisik-bisik meminta tuntunan pada kekuatan misteri ini, dengan intens, tanpa mengharapkan balasan langsung.

Menjelang hari-hari penentuan dengan DPR, kurang lebih dua hari menjelang hari *H fit and proper test*, tiba-tiba ada telepon dari kawan lama SET, yang namanya saja sudah tidak ada lagi di memori saya. Dia mem-beritahu bahwa ada dua orang anggota DPR dari partai besar berpengaruh yang ingin ketemu. Itulah



Bersama cucu pertama Kelana Shula Daruri

ternyata jawaban dari bisik-bisik rahasia tengah malam, bukan usaha mencari *lobby* partai politik, tapi saya malah dicari untuk persiapan *fit and proper test*. Dari pertemu-an tersebut saya diyakinkan kalau partainya akan memilih saya. Lalu mereka meminta info tentang 34 nama orang-orang yang pantas duduk di LSF ke depan. Tapi saya juga diharuskan melobi partai lain kalau punya kenalan. Dari obrolan singkat waktu maghrib sambil berbuka puasa Kamis, saya bersyukur dan merasa aneh dengan keajaiban fenomena itu.

Akhirnya, pada hari *fit and proper test* itu presentasi dan jawaban-jawaban saya sepertinya lancar, karena dibantu pengalaman kerja saya di LSF, sehingga tahu



persis peta permasalahan di LSF. Hanya satu fraksi partai besar yang mengincar kelemahan saya, yakni posisi saya sebagai dosen tetap, yang dinilai menjadi sedikit ganjalan. Di perjalanan pulang ke rumah, masih di jalan raya, masuk WA dari sese-orang misterius, yang memberi selamat: “Nama Bapak sudah terpilih jadi anggota LSF periode berikutnya.”



Bersama cucu kedua: Kalea Senna Daruri

Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur dalam hati, sekaligus beban baru, karena tugas harus dilanjutkan, dengan paradigma baru hasil bisik-bisik misteri tengah malam. Setiba di rumah HP berbunyi. Orang mis-terius lain memberi info, kalau nama saya hampir digagalkan oleh salah satu partai besar lama, yang melobi DPR, karena saya dianggap pernah mem-buat aturan LSF yang seakan tidak mendukung industri TV. Tapi si mis-terius itu katanya mem-bela saya, karena kesalahpahaman group TV tersebut. Dia men-

erangkan justru dengan aturan baru LSF itu saya sesungguhnya ingin membenahi ekosistem industri televisi, dan dia mengaku tahu siapa saya, bahkan si misterus itu juga mengaku pernah bekerja dan belajar dari saya di SET.

Dari orang lain juga saya mendapat bocoran bahwa hampir semua fraksi ternyata memberikan suara ke saya, sehingga agak sulit untuk menjegal saya. Saya merenung, saya bingung, kenapa perjalanan ini sangat misterius, dan penuh kerahasiaan yang aneh.

Lagi merenung sambil nonton di studio film *Oppenheimer*, yang penuh intrik politik, dan konspirasi sejarah pembuatan bom atom pertama, saya disadarkan oleh Kang Noorca M. Massardi, yang menagih tulisan minibiografi untuk buku



Kedua cucu tercinta Kelana Shula Daruri dan Kalea Senna Daruri

akhir tahun selesainya tugas anggota LSF Periode 2020-2024. Saya terbangun kaget, dan langsung menjawab kalau di depan laptop ini saya baru saja selesai menuliskannya, tapi saya masih mau membaca lagi untuk memeriksa ulang.

Setelah saya baca, jadinya tulisan ini seperti biografi, bercampur dengan fiksi, khayalan konspirasi, dan drama-drama sinetron. Inilah akibatnya kalau seniman disuruh bikin biografi sendiri. Jadinya ya seperti ini. Untuk para pembaca, nikmati



saja, tak usah dipercaya. Karena ini bukan karya ilmiah, atau testimoni, ini hanya sebuah karangan.

Tapi dari tulisan ini saya mau mencoba mengingatkan, bahwa perjalanan hidup terus berputar, penuh konspirasi rahasia, penuh mistik yang misterius, namun peradaban terus berubah. Lembaga sekecil LSF pun harus berbenah ke depan. Sebab, dari film-film yang kita tonton, dan pengalaman yang kita jalani, ada kode-kode rahasia, yang memperingatkan kita ihwal masuknya peradaban baru “digital” dengan bahasa baru berupa gambar atau media audio visual milik generasi baru ... Dan LSF harus siap menghadapinya.

Seperti yang diramalkan penulis Israel Yuval Noah Harari dalam bukunya *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow* (2015), dunia ke depan akan dikuasai oleh manusia yang memiliki kecakapan digital, dan kreativitas, yang tidak bisa digantikan oleh *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan).

Selamat Bekerja Anggota Lembaga Sensor Film yang akan datang !

Catatan kecil ini saya tutup dengan melirihkan sebuah puisi saya, agar saya selalu sadar untuk apa tujuan hidup ini:

*Hidup adalah bunyi gemericik
Yang mati begitu kita nyepi
Bernyanyilah... bernyanyi lirih
Dan esok kita sambut pesta Tuhan
Dengan bunyi-bunyi hati... ..*

Senayan, 25 Juli 2023

JATI DIRI:

Nama Lengkap: Arturo Gunapriatna P

Tempat Tanggal Lahir: Buenos Aires, Argentina, 26 Februari 1959

Nama Orangtua: H. Epon Pradjawisastra

Anak: Bungsu dari 7 bersaudara

Nama Istri: Herliya

Nama Anak:

1. Mayang Gentra Asih
2. Mila Gemalasari
3. Mariam Gesti Pratiwi

Nama Cucu: Kelana Shula Daruri, Kalea Senna Daruri

RIWAYAT PENDIDIKAN

1971 : SDN Kebon Sereh 01

1974: SMPN 14 Jakarta

1977 : STM 05 (Instruktur)

1999: Institut Kesenian Jakarta - S1

2016: Institut Kesenian Jakarta - S2

Gelar: Sarjana Seni, Master Seni





KEHADIRAN LSF PADA ERA DIGITAL TETAP STRATEGIS

Dr. Erwan Ismail M.Si
Anggota/Wakil Ketua LSF

Kotabaru gunungnya bamega ! bamega ombak manampur di sala karang !
(Bahasa Banjar: Kotabaru gunungnya berawan ! berawan ombak mende-
bur di sela-sela batu karang !). Begitulah awal lirik lagu daerah Banjar
berjudul “Paris Barantai” yang menggambarkan Kotabaru, kabupaten terluas di
Kalimantan Selatan.

Saya sendiri, Erwan Ismail, lahir di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, sebuah
pulau yang terpisah di ujung selatan-tenggara daratan Kalimantan. Sejak dulu,
Kotabaru menjadi tempat bermukim beragam suku bangsa. Antara lain, Suku Ban-
jar, Bajau, Bugis, Dayak, Jawa, Makassar, Mandar, Tionghoa dan lainnya. *Tagline*
daerah ini adalah “*Sa-ijaan*” yang dalam bahasa Banjar berarti semufakat, satu hati
dan seiya sekata.

Saya anak ketiga dari lima bersaudara, lahir dari keluarga pegawai negeri sipil
Drs. H. Djuni Anang Ismail, MM dan Dra. Hj. Djauriah. Sebagaimana orang
pulau, kuliner laut menjadi sumber gizi utama bagi kami sekeluarga, yang
dibesarkan dalam tradisi Banjar. Kedua orangtua saya memang *urang* Banjar ke-
lahiran Desa Amparaya, Kandangan, Kalimantan Selatan. Dan, sejak kecil, saya
dibesarkan dalam lingkungan pesisir pantai, hutan, dan sungai. Saya juga melihat
dan merasakan perbedaan ragam suku dan adat istiadat.

Karena mengikuti mobilitas orangtua, saya kemudian mengenyam pendidikan



sekolah dasar di SDN Mawar, Banjarmasin, lanjut ke SMPN 1 Banjarbaru, dan saya hampir selalu mendapatkan peringkat terbaik di kelas. Semasa sekolah dasar, saya sering menyambangi studio radio siaran di seberang rumah, sehingga sejak kecil saya sudah mengenal dunia musik dan penyiaran.

Ketika menamatkan pendidikan menengah jurusan Biologi di SMAN 2 Banjarmasin, saya tidak pernah lagi mendapatkan peringkat terbaik di kelas, meskipun kemudian lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada 1989, dan diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Semasa sekolah menengah, saya mulai menekuni musik dan olahraga. Sejak kecil saya memang sudah ikut berlatih di perguruan karate Kyokushinkai di Martapura, dan bahkan ketika SMP sempat menjadi juara kedua ganda putra Kejuaraan Tenis Meja Antar Instansi se Banjarbaru. Saya juga gemar main gitar dan mengorganisir kelompok vokal di SMP dan SMA. Kami tampil di pelbagai acara sekolah, meskipun tidak pernah ikut kursus musik secara formal. Semasa SMA, band sekolah kami, SMADA Banjarmasin, pernah menjadi *runner-up* band terbaik pada Festival Musik Kampus Kalimantan Selatan, dan saya menjadi gitarisnya. Dan, sebagaimana remaja pada umumnya, saya banyak menggemari ragam kegiatan anak muda seperti *camping* dan bertualang ke alam bebas.



Di sela kegiatan BSM, menyempatkan diri menikmati alam berenang di perairan Pulau Kanawa, Labuan Bajo



Meskipun diterima di kampus negeri, saya kemudian meninggalkan Banjarmasin dan melanjutkan pendidikan S1 di FISIP Universitas Jayabaya, Jakarta, jurusan Hubungan Internasional. Pada masa awal kuliah, saya tinggal di rumah paman di kawasan Senayan dan Perumnas Klender. Saya masih mengalami naik transportasi umum bus Metro Mini, Kopaja, serta PPD dengan segala dinamikanya. Selanjutnya karena sudah mulai aktif di pelbagai kegiatan dan organisasi mahasiswa, saya kemudian memilih kos di wilayah Cempaka Putih Timur, yang dekat dengan kampus Jayabaya.

Saya mulai aktif berorganisasi sebagai Kabid Eksternal Senat Mahasiswa FISIP 1991/1992, dengan program andalan Peduli Putra Bangsa, yang mengorganisir donasi mahasiswa untuk membantu anak sekolah kurang mampu di sekitar kampus.



Program Peduli Anak Bangsa yang saya gagas (ke empat dari kiri atas) semasa menjadi aktivis mahasiswa

Saya juga menjadi Ketua Pelaksana kegiatan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII) pada 1993 di Jakarta. Acara itu dihadiri perwakilan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya terpilih sebagai Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP periode 1992/1993, sekaligus menjabat Bendahara Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Jayabaya.



Dilantik Rektor sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa

Untuk organisasi ekstra kampus saya masuk HMI dan sempat menjadi Pengurus HMI Cabang Jakarta Cilosari pada 1994/ 1995. Selain itu, saya juga tetap menggeluti dunia Seni dengan menjadi Wakil Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Vokal. Pada masa mahasiswa saya sering menjadi perwakilan kampus untuk menghadiri pelbagai kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan, dan ragam kegiatan pertemuan nasional kepemudaan dan kemahasiswaan di Indonesia.

Menjelang akhir studi, saya sempat merintis usaha PD Putera Bangsa di kawasan Pondok Kelapa, yang kemudian berkembang dan bersama teman-teman mahasiswa mendirikan workshop usaha perkayuan di kawasan Bekasi Utara. Saya juga sempat menjadi Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Bekasi. Usaha itu kemudian tidak berlanjut akibat krisis moneter. Saya pun mendalami dunia jurnalistik dengan menjadi pewarta di Harian *Republika* dan, kembali melanjutkan studi S2 Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia. Pada masa inilah romansa bersemi dengan teman kuliah di Salemba. Dukungan teman-teman sekelas yang turut mendorong kedekatan dengan seorang profesional Public Relations Officer kelahiran Surabaya, Siti Dewi Sri Ratna Sari yang juga alumni sastra Perancis UI. Kisah asmara yang kemudian berakhir diujung pelayinan. Sehingga dosen pembimbing tesis saya Prof. Sasa Djuarsa Senjaja, Ph.D ketika itu menyebutkan bahwa Ervan ini mendapat dua hasil kuliah di UI sekaligus, yaitu ijazah dan ijabshah.



Wisuda di UI di dampingi Ratna, teman kuliah yang menjadi teman hidup

Pada masa itu pula, saya menjalani aktivitas sebagai karyawan marketing Radio Trijaya FM, sampai menyelesaikan tesis riset *niche market* “Kompetisi Radio Siaran FM di Jakarta”. Pimpinan Radio Trijaya FM yang berkantor di kawasan RCTI Kebon Jeruk, kemudian mempercayakan saya menjadi Koordinator Marketing, Promotion, dan Public Relations Trijaya Group, yang membawahkan Radio Trijaya dan ARH di Jakarta, SCFM Surabaya, Prapanca FM Medan dan kemudian Trijaya Semarang, Trijaya Jogjakarta serta Trijaya Bandung.

Pada masa itu, Radio Trijaya 104,7 FM Jakarta, yang bergeser menjadi 104,6 FM akibat penataan frekuensi radio, menjadi salah satu radio papan atas di Indonesia. *Positioning* Trijaya dengan *tagline* “*more than just music*” itu memiliki citra dan penerimaan yang sangat baik di kalangan pendengarnya, yang terdiri dari kaum profesional muda, serta kalangan pengiklan, yang menjadi sumber hidup utama bagi radio komersial. Bekerja di bidang penyiaran itu telah menanamkan budaya penghargaan terhadap waktu yang sangat tinggi. Demikian pula kemampuan membangun relasi dengan ragam *stakeholder* menjadi sangat terasah.



Saya (mengangkat tangan) bersama Tim Trijaya FM dalam acara “Kuis Siapa Berani” bersama Helmy Yahya dan Alya Rohali

Saya kemudian melanjutkan karir menjadi Managing Director Vima Communications yang menangani periklanan, promosi dan *event management*. Dunia periklanan sangat menajamkan kemampuan kreatif dan kerjasama tim untuk mencapai tujuan. Saya juga diminta menjadi pengajar sebagai dosen praktisi di Fikom Universitas Mercu Buana, serta menjadi konsultan komunikasi yang menangani penelitian dan kehumasan pada beberapa kementerian.

Sekitar tahun 2009, saya diminta oleh Ketua KPI Pusat sekaligus dosen pembimbing Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja (alm) untuk menginisiasi pendirian KPID DKI Jakarta, yang waktu itu belum juga terbentuk, sebagaimana provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang merupakan amanat dari UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.

Saya bersama tim kemudian membuat naskah akademik, merancang proposal pendirian, dan melakukan lobi ke Pemda DKI dan DPRD DKI selama dua tahun, sehingga akhirnya mendapat persetujuan dari Gubernur DKI Fauzi Bowo dan pimpinan DPRD DKI untuk mendirikan KPID DKI Jakarta. Setelah mengikuti seleksi Pansel, saya pun terpilih sebagai komisioner dan dalam rapat pleno dipilih sebagai Wakil Ketua KPID DKI Jakarta periode 2011-2014.



Saya (kiri) bersama para Juri: Bens Leo, Trie Utami dkk pada event festival musik yang dikelola Vima Communications



-Bersama Menteri Perhubungan Jusman Syafei Jamal ketika saya menjadi Ketua Tim Konsultan penyusunan Renstra Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan Ri



Saya bersama Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat audiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta di Balai Kota

Pada masa awal berdirinya KPID, bersama tim kelembagaan KPID DKI Jakarta, kami menata organisasi dengan membangun struktur organisasi beserta kelengkapan sumber daya manusianya, termasuk menyiapkan kantor dan infrastrukturnya. Pada periode ini juga KPID DKI memulai proses digitalisasi Penyiaran di Indonesia menuju mekanisme ASO (*Analogue Switch-Off*).

Dalam rangka mengawal proses digitalisasi penyiaran, itulah saya mengikuti kegiatan Internet Protocol/IPTV World Forum di London UK (Maret 2012), Studi Banding Ruturk TRT Ankara Turki (2012), Mengikuti Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (Casbaa) di Hongkong (2012), dan menghadiri International Digital Multimedia Technology Exhibition & Conference Singapore (Juni 2014).

Selanjutnya pada periode kedua, saya kembali terpilih sebagai komisioner KPID DKI Jakarta masa bakti 2014-2017. Pada periode ini KPID DKI melaksanakan proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Pengawasan Program Siaran untuk Perpanjangan Izin Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Televisi dan Radio yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta.

Pada akhir masa bakti di KPID DKI Jakarta, saya diterima studi doktoral S3 Komunikasi Pembangunan di IPB University Bogor, kembali berduet satu kelas sebagai pejuang disertasi bersama mantan pacar, Siti Dewi Sri Ratna Sari. Pada November 2022, dalam sidang terbuka promosi doktoral, saya berhasil lulus dengan judul disertasi *Komunikasi Digital dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil*. Pada masa studi



Memainkan lightsabre merah bersama karakter film Star Wars di Walk of Fame Hollywood

dihasilkan beberapa karya ilmiah berupa artikel di jurnal nasional dan internasional, menulis opini di media, dan menerbitkan buku bertajuk *Manajemen Program Komunikasi dan Diseminasi Informasi Pembangunan*. Saya juga dipercaya menjadi Ketua Koordinator Daerah Jakarta Raya organisasi Forkapi (Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia).

Pada Mei 2020, kami dilantik sebagai Anggota LSF (Lembaga Sensor Film) RI periode 2020–2024 sekaligus terpilih sebagai Wakil Ketua LSF RI, mendampingi Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto. Selain aktif melakukan tugas penyensoran, saya juga membangun silaturahmi dengan beragam *stakeholder* seperti KPI, lembaga penyiaran televisi, kampus, dan *stakeholder* lain di pelbagai daerah. Saya juga membantu jalinan kerjasama berupa penandatanganan MOU LSF dengan KPI Pusat, KPID DKI Jakarta, KPID Jawa Barat, dan KPID Jawa Tengah. Dan, pada November 2022, saya memimpin delegasi LSF dalam Studi Banding tarif sensor dan konten film ke Lembaga Rating Film Jepang (EIRIN), serta Japan Foundation.

Selain menjalani fungsi pimpinan sebagai Wakil Ketua dalam mendampingi Ketua LSF, saya juga menjalankan kewajiban menjadi bagian dari tim sensor film di studio. Tugas menyensor film dan iklan film cukup berat dan menantang, karena selain melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, LSF juga berupaya mendukung kemajuan perfilman nasional, serta mengembangkan potensi-potensi Indonesia melalui film. LSF harus menjadi lembaga yang humanis,



Mewakili LSF menerima penghargaan peringkat pertama Terbaik Badan Publik kategori Lembaga Non-struktural Menuju Informatif 2023 dari Komisi Informasi Pusat



Ervan, Lubvna, Ratna, Boi di Twin Towers

berusaha memiliki citra yang baik, dengan cara menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di kalangan industri terkait.

Bagi saya, LSF tidak boleh menjadi lembaga yang menakutkan, jangan menjadi musuh, jadilah mitra. Karena, selain melakukan penyensoran dan menentukan klasifikasi usia, LSF pun punya tugas mengembangkan perfilman Indonesia. Tugas dan fungsi LSF memang melindungi masyarakat dari pengaruh buruk film, tetapi yang baik harus terus kita dorong. Sebab, jika sebuah film sukses, maka produsen film akan berkembang positif, karena akan punya modal pengalaman dan kapital yang lebih baik untuk produksi film selanjutnya.

Di tengah kesibukan di LSF, itulah saya sempat menyelesaikan disertasi dengan tema Komunikasi Digital.



Dalam sidang promosi doktor itu salah satu jasa yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata di pulau kecil adalah penyediaan homestay dari warga lokal bagi wisatawan, dan ketersediaan infrastruktur serta pemanfaatan komunikasi digital. Pada acara pelepasan wisudawan, saya diminta Dekan FEMA IPB menyampaikan pidato sebagai wisudawan terbaik Pascasarjana FEMA IPB yang lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Menjadi anggota LSF, menurut saya, adalah upaya menyangdingkan ilmu komunikasi akademik dengan realitas obyektif ekosistem perfilman di sebuah negara, untuk tujuan pemajuan kebudayaan serta kebermanfaatannya bagi masyarakat. Saya menerapkan motto hidup “Kerjakanlah Sesuatu Sebaik Mungkin”. Sebab, menurut saya, mengerjakan sesuatu itu harus sebaik mungkin, sehingga kita merasa maksimal. Jika kita bersungguh-sungguh, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika setengah-setengah, pasti akan ada penyesalan. Tapi jika kita sudah bersungguh-sungguh,



Membudayakan pantun saat menyampaikan sambutan acara sosialisasi Budaya Sensor Mandiri pada kelompok mahasiswa, pelajar, komunitas di kota Sorong, Papua Barat

tapi kemudian gagal, maka kita tidak akan merasa kecewa. Dalam prosesnya kita harus terus mencari dan mendapat passion dari pekerjaan tersebut. Prinsip “work hard play hard” akan memudahkan kita untuk melakoninya. Dukungan dari keluarga juga menjadi dorongan sangat penting dalam kehidupan. Do’a dan kasih

sayang istri Dr. Siti Dewi Sri Ratna Sari, S.S., M.Si beserta kedua buah hati kami M. Ansel Primavandra Ismail dan Lubvna Letisya Azzahra menjadi motivasi yang tiada henti untuk terus maju meraih prestasi.

Kehadiran LSF pada era digital tetaplah strategis. Sebab, orang tidak bisa lepas dari perangkat smartphone yang menyalurkan ragam konten narasi, audio, video yang semuanya berdampak pada pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Ada segmen masyarakat yang sudah memiliki daya nalar dan kritis dalam mencerna film ataupun konten, tapi ada sebagian lainnya yang belum, utamanya terkait rentang usia. Di sinilah sentuhan negara hadir, tentu dalam kadar yang harus pas, karena perubahan sosial dan perkembangan teknologi di masyarakat bergerak dinamis.

JATI DIRI:

Nama Lengkap: Erwan Ismail

Nama Ayah: Drs. H. Djuni Anang Ismail, MM

Nama Ibu: Dra. Hj. Djauriah

Anak: Nomor 3 dari 5 bersaudara

Nama Istri: Dr.Siti Dewi Sri Ratna Sari, M.Si

Nama Anak: M. Ansel Primavandra Ismail dan Lubvna Letisyah Az-zahra

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Mawar, Banjarmasin (1977-1983), lanjut ke SMPN 1 Banjarbaru (1983-1986)

SMAN 2 Banjarmasin, jurusan Biologi/A2 (1986-1989)

S1 di FISIP Universitas Jayabaya, Jakarta (1989-1994)

S2 Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia (1996-1999)

S3 Komunikasi Pembangunan di IPB University Bogor (2017-2022)

RIWAYAT KARIR

Koordinator Marketing, Promotion, dan Public Relations Trijaya Group (1997-2004)

Managing Director Vima Communications (2004-2007)

Dosen Fikom UMB (2002-sekarang)

Komisioner / Wakil Ketua KPID DKI Jakarta (2011-2014)

Komisioner KPID DKI Jakarta (2014-2017)

Anggota / Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) (2020-2024)

RIWAYAT PENGALAMAN

- Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ca-

bang Bekasi

- Pewarta di Harian Republika
- Konsultan komunikasi, peneliti komunikasi, praktisi kehumasan
- Pendiri KPID DKI Jakarta (2011)
- Internet Protocol/IPTV World Forum di London UK (Maret 2012)
- Studi Banding Kelembagaan di RTUK & TRT Ankara Turki (2012)
- Studi Banding Digitalisasi Penyiaran di KCC Korea Communication Commission South Korea (2013)
- InterBEE, Media Exhibition Event & Conference, Makuhari Messe Japan (2013)
- Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (Casbaa) di Hongkong (2012)
- International Digital Multimedia Technology Exhibition & Conference Singapore (2014).
- Ketua Koordinator Daerah Jakarta Raya organisasi Forkapi (Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia) (2021-2024)

KARYA

- Buku Manajemen Program Komunikasi dan Diseminasi Informasi Pembangunan
- Disertasi Komunikasi Digital dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil
- Artikel Opini; Industri Penyiaran (Republika); Retaknya Modal Sosial Pembangunan di Era Digital (detik.com), serta artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional





FILM MEDIA EFEKTIF BAGI PEMBELAJARAN

Fetrimen Zubir

Ketua Subkomisi
Pemantauan dan Evaluasi

Tanah kelahiranku adalah ngarai yang dikelilingi bukit jantan di barat, dan bukit betina di timur, yang menjadi irisan dari Bukit Barisan. Nagari di dataran rendah lahan pertaniannya sangat subur karena dialiri dua sungai besar. Sungai Batang Bayang di barat, airnya mengalir dari kaki bukit jantan, dan konon bersumber dari Danau Singkarak, Solok. Sedangkan di timur mengalir Sungai Bayang Sani yang berasal dari air terjun, yang oleh warga disebut “*sarasah*” (tempat bidadari bercengkrama ketika fajar menyingsing), dan berasal dari kaki anak Bukit Betina.

Secara geografis, karena berada di tengah, Nagari ini menjadi pusat “peradaban” yang memadukan budaya selatan dan budaya utara. Di utara, sikap dan perilaku para “anak gunung” lebih mengutamakan “rasa.” Juga dalam membangun relasi dan koneksi. Sehingga, nilai-nilai agama Islam (memang 100% penduduknya beragama Islam) menjadi faktor utama dalam mengembangkan nilai budaya. Mereka berargumen berdasarkan dalil *naqli*, yang akan memudahkan lawan bicara untuk percaya. Tradisi mengkaji kitab dan ilmu agama pun lebih dominan, sehingga tak mengherankan bila daerah ini banyak melahirkan ulama.

Sedangkan di selatan, para “anak pantai” yang intens berkomunikasi dengan “masyarakat luar,” gaya komunikasinya lebih menggunakan “logika.” Semua ungkapan yang diterima, baik langsung atau hanya kabar angin, akan dicerna dengan dalil *aqli*. Apabila dianggap logis dan dapat diterima akal sehat, maka kabar itu akan dianggap benar. Karakter “anak pantai” itu membudayakan nilai



kearifan lokal. Masyarakatnya mentradisikan nilai yang selama ini berkembang, seperti nilai dan karakter budaya Minangkabau, yang mengajarkan sastra, petatah petitih, dan lain sebagainya.

Budaya “anak gunung” dan “anak pantai” itu, berintegrasi dalam budaya Nagari karena posisinya yang di tengah, dan merupakan tempat pertemuan para cendekia, baik yang dari selatan maupun utara. Sebagai bagian dari alam Minangkabau, musyawarah dalam mencari pemufakatan yang dilakukan para tetua (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai, untuk melaksanakan suatu kesepakatan, Nagari ini tempat ideal dalam bermusyawarah. Sebelum ada bangunan yang seperti sekarang, untuk menandai tempat bermusyawarah, maka ditanamlah pohon beringin. Di Nagari ini ditanam tiga batang pokok pohon beringin yang dinamakan Batang Baringin Nan Tigo. Itu menandakan bersatunya para alim ulama, ninik mamak dan cerdik pandai, yang biasa disebut “*Tungku Tigo Sajarangan*”. Di bawah batang beringin itulah para “*tungku tigo sajarangan*” berapat, sehingga tempat kelahiranku itu dikenal dengan nama “*Koto Berapak*” (Tempat Rapat).

Koto Berapak merupakan “*pusek jalo pumpunan ikan Bayang Nan Tujuh*” atau pusat mencari pemufakatan di tujuh Nagari di Kecamatan Bayang, dan menjadi induk atau Ibu Nagari, tempat “*Berapak*” (berapat) mencari pemufakatan untuk pelbagai keputusan adat. Ketetapan yang akan diteruskan sebagai tauladan bagi generasi yang akan datang. Maka Koto Berapak merupakan pusat jala, bukan hanya Ibu Nagari, tetapi juga pusat kegiatan utama yang mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Nagari Bayang Nan Tujuh. Bila pada zamannya ditandai dengan Baringin Nan Tigo Batang, namun sekarang lokasi itu ditandai atau telah menjadi “*Balai Rabaa*” (Pasar Rabu), pasar satu-satunya bagi penduduk Bayang Nan Tujuh. Sementara di Nagari Koto Berapak sendiri, terdapat empat suku yaitu Melayu, Tanjung, Caniago dan Jambak.

Pertengkar, pertikaian, dan pergulatan pemikiran di antara para alim ulama yang menggunakan dalil *naqli*, para ninik mamak yang menggunakan dalil budaya, dan cerdik pandai yang menggunakan dalil *aqli*, kadang berimbas pada suku dan kaum masing-masing sesuai latar belakang budaya yang ikut berembuk. Dialektika “*syara mengata adat memakai*” menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan untuk diteladani suku dan kaum. Bila dialektika tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka yang bersalah adalah ninik mamak dan orang tua terutama orang tua perempuan, karena memang pintu utama untuk kebajikan berada di pundak seorang “Ibu”. Goresan luka yang ditorehkan anak kemenakan, tidak hanya dirasakan ninik mamak tetapi akan dirasakan juga oleh satu suku dan kaum.

Hal itu terjadi, tidak hanya karena persoalan adat istiadat dan budaya, tetapi terkait juga dengan peristiwa politik kebangsaan. Umpamanya, peristiwa politik kebangsaan yang terjadi di Jakarta, akan berimbas pada dialektika antara “anak gunung” dan “anak



Kampanye Budaya Sensor Mandiri di Samarinda Kaltim

pantai”, antara penggunaan “rasa” dan “logika.” Memandang peristiwa yang terjadi, itu walaupun diadakan musyawarah, menyepakati langkah yang diputuskan untuk melindungi Nagari, namun bara dalam sekam akan berasap juga di luar arena musyawarah. Jika peristiwa politik di Jakarta diselesaikan dengan keputusan politik, maka penyelesaian sengketa politik akan selesai dengan pergulatan pemikiran dalam pemilihan politik, yang akan menjadi dosa turunan di Nagari ini.

Anak-anak yang tidak mengalami peristiwa tersebut, akan mendapat hukuman sosial dari orang tua yang mengalami peristiwa tersebut. Apatah lagi berada pada sudut karakter budaya yang berbeda. Pergulatan “dosa turunan” terjadi dari generasi ke generasi. “Tersisih di tempat yang sepi,” dan “tenggelam di air yang dangkal,” menjadi budaya yang tak terelakan. Apalagi bila dalam perbedaan pilihan tersebut, salah satunya memiliki kekurangan dalam segi materi, dan pendidikan serta perlindungan yang dilakukan ninik mamak dianggap lemah, maka hinaan dan cercaan akan menjadi sarapan setiap hari. Kesalahan yang tak pernah dilakukan generasi berikutnya, akan menjadi objek penasaran bagi penderita. Maka, untuk menghindari konflik, merantau merupakan salah satu solusi dan pilihan yang dianggap tepat.

Di tengah perbedaan, pergulatan pemikiran dan pengaruh antara “rasa” dan “logika”, itulah aku terlahir di Nagari ini pada 23 September 1977, sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara, dan diberi nama Fetrimen. Ibuku (*amak*) bernama Rosani, berprofesi sebagai pendidik (guru) madrasah dan memiliki



Kampanye Budaya Sensor Mandiri di Mamuju, Sulawesi Barat

budaya berpikir mengutamakan “rasa,” bersuku Melayu dan keturunan asli Koto Berapak. Sedangkan Ayah (*abak*) bernama Zubir Jambak, seorang petani yang tempat tinggal kedua orang tuanya (kakek nenekku), tidak jauh dari pantai, dan cenderung berpikir menggunakan “logika.”

Secara ekonomi, keluarga kami bukan keluarga yang miskin. Sebagai orang bersuku Melayu, kami memiliki sawah ulayat atau tanah pusaka yang diperoleh turun temurun dari ninik mamak kami. Sebagai penganut keturunan matrilineal, sawah ulayat itu digunakan oleh kemanakan perempuan, tetapi dikuasai oleh mamak laki-laki. Sawah ulayat yang dimiliki kaum kami sangat luas melawati batas Nagari ke arah selatan. Sebagai anak, cucu, dan kemenakan perempuan yang pertama, amak-ku mendapat bagian paling luas dan berada di beberapa tempat. Amak juga tahu di mana saja letak sawah dan tanah ulayat yang ditinggalkan mamaknya yang sudah mendahului, tetapi belum memberitahu posisi tanah ulayat karena amak memegang ranji. Secara sosial, keluarga kami memiliki status yang terhormat. Sebab, selain amak yang menjadi pegawai negeri sebagai guru di suatu madrasah, kebanyakan *mamak* (paman dan sepupu laki-laki amak) menjadi ustadz dan guru mengaji.

Meskipun demikian, dalam menjalani roda kehidupan yang bergaris suratan takdir, kami mengalami perjalanan yang berliku, bertikungan tajam, menanjak, bahkan seolah tak bertepi. Apalagi ketika amak mengalami sakit bertahun-tahun, pasca sepeda ontel yang mengantarkan amak mengajar di madrasah, bersenggolan

dengan kuda bendi berkusir “*tuan alah*” alias dukun sakti mandraguna. Tetapi amak tidak percaya kalau karena ulah dukun sakti itu maka amak sakit. Amak menyatakan bahwa ini memang suratan takdir yang harus dilewati.

Perjalanan kehidupan semakin berliku, “tersisih di tempat yang sepi” dan “tak menggenapi yang kurang.” Sawah-sawah yang menjadi bagian amak, banyak tergadai karena memang tidak boleh dijual. Kisah berlikunya perjalanan hidup, ternyata bukan hanya kami yang mengalami. Belakangan, menurut cerita para sesepuh, hampir semua anak Nagari kami mengalami perjalanan hidup yang berliku, sebagai akibat dari “Peristiwa 1958” (Perbedaan persepsi antara Pusat-Daerah) di Minangkabau. Pada 15 Februari 1958, itu di Padang diumumkan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintahan Pusat Republik Indonesia. Akibat langkah taktis yang dilakukan PRRI itu, maka masyarakat di Sumatera Barat umumnya dan Nagari kami khususnya, mengalami kesulitan dalam perekonomian dan “memaksa” anak-anak mudanya merantau. Perekonomian anak Nagari baru mulai mengalami perubahan pada awal 1990, ketika generasi kedua dan ketiga yang pergi merantau ke berbagai daerah, kembali ke kampung halaman dan ikut membangun Nagari.

Sebelum masuk sekolah dasar, aku sudah lancar membaca karena sering mendampingi dan mendengarkan amak mengajar kakak-kakakku membaca, setelah mengaji selepas maghrib. Bila ada kakakku yang malas belajar, amak tidak segan untuk “*menggutie*” paha bahkan memukul kakinya. Akibatnya aku termotivasi untuk belajar membaca agar tidak kena “*gutie*”. Saat masuk sekolah dasar, aktivitasku berjalan biasa dan normal, seperti anak-anak lain bersekolah walau dalam keterbatasan. Pada hari pertama masuk sekolah, amak sudah menasehati dan “mencuci otak”-ku dengan ucapan “Melihat kebenaran itu bukan hanya berdasarkan “keyakinan rasa.” Jika hanya berlandaskan “keyakinan rasa” maka itu taklid buta namanya. Sebaliknya, kebenaran itu bukan hanya dicerna dengan “logika,” karena kalau hanya menggunakan “logika” maka keangkuhan yang berkuasa. Belajarlah! Amak tidak berharap kamu menjadi siapa, tapi amak hanya ingin tahu bagaimana kamu menjadi apa.” Lalu aku menjawab, “Bagaimana caranya mak?!” Amak menjawab: “Belajarlah untuk mengisi “logikamu” dan mengajilah untuk mempertebal “rasamu”.

Kata-kata itulah yang memotivasiku untuk belajar di sekolah dari pagi sampai siang, dan mengaji di madrasah dari sore sampai menjelang maghrib. Tentu dengan segala keterbatasan dan hanya dengan satu tujuan yakni, berguna bagi orang lain. Makanya ketika ada pelajaran “mengarang” dalam Bahasa Indonesia di sekolah, aku hampir tidak punya cita-cita, kecuali ingin “berguna bagi agama dan bangsa.”



Minat membacaku semakin meningkat. Hampir setiap hari aku mengikuti seorang teman ke rumahnya, hanya untuk membaca koran yang terbit hari itu. Aku membaca tentang berbagai peristiwa yang terjadi. Dan aku baru pulang jika orang tua temanku sudah pulang. Lalu aku berangkat mengaji di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sehingga aku sedikit memiliki sikap kritis dan keberanian.

Semangat belajarku semakin termotivasi karena metode pembelajaran di sekolahku seperti berada di persimpangan. Hukuman fisik menjadi menu yang tak terhindarkan, bila para pembelajar melakukan kesalahan dan kekeliruan. Mereka akan mendapatkan hukuman di luar nalar logika. Tetapi hukuman itulah yang membuat kami menjadi pembelajar yang kuat. Pernah suatu ketika, dua temanku yang melakukan kekeliruan, karena usianya sudah menanjak remaja, saat usia kami sudah sepuluh tahun, kelas empat sekolah dasar, dua temanku itu memang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Mereka memperoleh hukuman “sosial”, dipermalukan di depan kelas, sehingga aku memberikan motivasi agar kedua temanku itu tetap semangat dan mau belajar membaca. Aku sendirilah yang menjadi mentor mereka membaca.

Di lain waktu, kedua temanku itu kedapatan sedang merokok oleh seorang pendidik di suatu tempat. Esoknya mereka dipanggil dan tentu diberi hukuman dengan menghisap rokok di depan pendidik tersebut. Ketika kesalahan itu berulang kali dilakukan oleh temanku itu, maka mereka diberi hukuman di luar batas kewajaran. Kedua tangan temanku disundut rokok. Dan itu juga terjadi padaku. Suatu saat aku pernah “protes” karena hukuman yang diberikan padaku. Tanpa sadar dan tak sengaja aku mengucapkan kata: “Aku setamat dari sekolah ini tidak akan langsung jadi presiden. Ada proses yang harus aku lewati. Kalau aku dihukum begini, bagaimana dengan jiwa dan perasaanku kalau dipermalukan mentalku?” Pendidik tersebut terdiam. Toh, kendati mendapat hukuman keras di sekolah, kami tidak pernah mengadu pada orang tua, meski kesempatan untuk mengadukan itu selalu terbuka.

Setamat sekolah dasar, aku hampir “dibuang” sama amak untuk sekolah di luar kampung. Salah satu tujuannya adalah Jakarta. Penyebabnya, aku mengikuti ujian Ebtanas di dua sekolah. Satu di sekolah dasar tempat aku belajar pagi, satu lagi aku mengikuti Ehta di madrasah. Karena amak tidak punya biaya mengambil ijazah keduanya, maka amak memilih mengambil ijazah yang dari madrasah. Ijazah madrasah digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Sedangkan ijazah SD sampai sekarang tidak aku tebus. Hasil test ujian masuk SMP bagus tapi karena aku menggunakan ijazah madrasah, maka aku dinyatakan tidak lulus. Rupanya dikotomi pendidikan masih ada. Kemudian amak mengantarkanku untuk melanjutkan sekolah ke Jakarta. Aku pun sudah didaftarkan sekolah di Jakarta. Lalu Amak pulang ke kampung. Namun, tinggal sepekan lagi mau sekolah,



Menjawab pertanyaan ihwal keresahan pada tayangan film di media streaming di Mamuju, Sulawesi Barat

amak ternyata berubah pikiran. Aku dipanggil kembali ke kampung dan dimasukkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs), setelah proses pembelajaran berlangsung dua minggu.

Seperti sudah aku ceritakan, setelah banyak tergadai, sawah yang kami miliki tinggal empat petak di kaki Bukit Bendera, yang jaraknya dua kilometer dari rumah arah ke selatan. Karena empat petak sawah itu terletak di kaki Bukit Bendera, maka pengelolaannya jadi tidak normal. Selalu digenangi air sehingga tanahnya berlumpur dan dalam. Bila menyemai, benih tidak tumbuh normal. Setiap musim bertanam, benihnya selalu kurang. Ketika padi belum menguning, segala macam hama datang. Mulai dari wereng sampai celeng hutan, cawe-cawe di sawah kami. Sehingga setiap panen hasilnya tidak maksimal. Dan petani penerima upah, pun enggan bekerja memanen padi kami, karena hasil panennya tidak mencukupi untuk dibagi. Walhasil, kami sekeluarga yang harus mengerjakannya, mulai dari menyemai benih sampai memanen padi.

Ketika kakak-kakakku merantau, hanya tinggal amak, aku dan kakak perempuanku yang membantu amak menyemai benih sampai memanen padi. Semua dilakukan selesai amak mengajar dan aku pulang sekolah. Karena aku sudah di madrasah tsanawiyah, maka waktu mengaji sudah berubah dari semula siang menjelang sore, kini menjadi usai maghrib di surau. Aku pulang dari madrasah pukul 14.00 wib. Dari pukul 14.30 wib sampai pukul 18.30 wib, aku membantu amak di sawah. Pada suatu ketika aku memanen padi hanya berdua dengan amak. Aku bercerita bahwa aku mendapat rundungan (*bully*) dari orang



Menyerahkan kenang-kenangan kepada Bupati Klungkung Bali dalam peninjauan kerjasama membangun Desa Sensor Mandiri

yang lebih tua dariku. Mereka bilang aku tidak akan menjadi siapapun, karena semua sudah ada yang dipersiapkan. Mulai dari ketua RT sampai presiden sudah ada. Untuk apa rajin-rajin sekolah. *Amak* terdiam.

Ketika hampir tamat di Madrasah Tsanawiyah, sebulan sebelum ujian Ebta, pada tahun kesekian usai memanen padi, kami membuat ongkongan padi untuk digiling. Menjelang maghrib, *amak* mengajakku ke pengairan sawah. *Amak* menutup aliran air dengan tanah dan volume air itu terus meningkat sampai melewati batas ongkongan tanah, sebelum kemudian jatuh seperti air terjun ke hilir. Lalu *amak* mengatakan, “Kamu lihat air itu, walaupun ditutup tanah dengan rapat, sehingga tidak mengalir dengan lancar, air itu menumpuk dan mencari celah bagaimana supaya bisa mengalir ke hilir. Air mencari jalan sendiri, walau tanpa dibantu. Begitu juga kamu. Yang akan mengubah nasibmu adalah dirimu sendiri,

bukan orang lain.” Lalu *amak* mengutip Qur’an surat Arra’du ayat 11, “Allah tidak akan mengubah nasib seseorang (suatu kaum) kecuali seseorang (kaum) tersebut yang akan mengubah sendiri”.

Amak melanjutkan nasehatnya. “*Amak* sudah tua, *amak* tidak bisa meninggalkan kamu harta, karena memang *amak* tidak punya. *Amak* hanya berharap kamu bisa melanjutkan pendidikan sampai tingkat tertinggi. Dan ilmu kamu itu bukan untuk menjadikan kamu siapa, tetapi siapa yang kamu akan mengikuti. Jika kamu punya ilmu dan kamu yang berilmu mendoakan *amak* dan abak nanti ketika kami sudah tiada.” Seraya memandang lekat aku, *amak* berucap mengutip hadits “*Kejarlah dunia seolah kamu hidup selamanya dan jangan lupa belajar tentang akhirat seolah kamu akan meninggal besok hari.*” Lalu, “Bersungguh-sungguhlah, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menemukan jalannya, *man jadda wa jada*”. Mendengar nasehat *amak*, itu aku pun berjanji dengan suara yang



Bersama Tim LSF, dalam kunjungan ke EIRIN, LSF-nya Jepang, November 2022

tertahan hampir tak terucap. “Mak, aku janji akan melaksanakan harapan mak, walaupun jalan yang akan kutempuh jauh lebih terjal dari perjalanan hidup kita saat ini.”

Perjalanan “hidup baru” pun dimulai. Sehari setelah ujian Ebta MTs selesai, *amak* langsung “mengusir” aku agar segera berangkat ke Jakarta, dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan. *Amak* meyakini, sudah waktunya aku berpisah dengan beliau untuk belajar mandiri. Ijazah MTs yang belum aku terima, akan dikirim lewat pos. Dan aku didaftarkan di Madrasah Aliyah di Rawasari (pelangi di tapal batas). Di madrasah itu perjalanan pendidikanku dimulai tanpa pendampingan *amak*. Dan itulah cikalku berinteraksi dengan para pendidik yang memuluskan langkahku, untuk melanjutkan pendidikan sampai tingkat tinggi.



Mengenang perjuangan di kaki Bukit Bendera

Selain kegiatan menjadi pembelajar di sekolah dan mengaji di madrasah, dulu aku juga mengikuti kegiatan budaya seperti belajar randai, dan petatah petitih yang diadakan di Nagari pada Jumat malam. Sedangkan pada Sabtu malam kami bersama kawan-kawan sebaya pergi menonton film di bioskop kecil. Film yang kami tonton ditayangkan dari kaset video, karena bioskop satu-satunya di tempat kami, berjarak delapan kilometer dari Nagari. Dari sentuhan tayangan film di kaset video itulah aku banyak belajar tentang penerimaan informasi yang komprehensif. Sesuatu yang tidak diperoleh melalui komunikasi dan dialog di sekolah maupun di

masyarakat. Film yang aku tonton pertama kali adalah film laga yang menggambarkan kepahlawanan dan penuntasan kejahatan. Aku masih ingat jalan cerita dan adegannya sampai sekarang, termasuk para pemainnya. Menonton film pun menjadi hobby dan kesukaanku. Terutama film-film laga. Maka setiap akhir pekan aku berusaha menonton film sampai sekarang, sebab banyak pembelajaran dan pesan yang didapatkan dari konten film tersebut.

Belakangan, setelah aku kuliah di program studi pendidikan, aku baru memahami, mengapa film dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Adegan film akan mudah diingat penonton, karena memang film mengintegrasikan metode pembelajaran secara efektif. Proses pembelajaran konvensional (istilah Kabadayi), seseorang hanya mampu fokus paling lama 12 - 20 menit untuk menerima informasi secara verbal. Sedangkan melalui tayangan film penonton lebih fokus untuk waktu yang lebih lama. Proses pendidikan berbasis verbal hanya mampu diingat sebanyak 70 persen dalam waktu 10 menit. Dan 30 persen sisanya hanya sebagai informasi tanpa mampu diingat. Kemampuan organ indera untuk melihat dan mendengar hanya 50 persen. Kemampuan itu bisa meningkat menjadi 80 persen apabila informasi itu diserap dengan cara melihat, mendengar dan mengucapkan. Maka subjek narasi dan visualisasi sebagai alat bantu audio visual film yang ditayangkan, sangat berpengaruh pada penonton. Dalam proses

pembelajaran, film menggunakan pendekatan psikoanalitik (meminjam kata Freud) yang berinovasi dalam menganalisa materi pelajaran secara ilmiah, mempresentasikan kenyataan yang jujur tanpa manipulasi. Film sebagai audio visual yang menggunakan kamera secara teknis sangat efektif dalam mempengaruhi penonton. Karena film juga diciptakan bisa berdasarkan fakta, bukan hanya fiksi, yang memiliki kelebihan dalam memberikan informasi dan pesan dengan cara kreatif.

Perilaku atau kondisi operan seseorang (meminjam istilah Skinner) mendapat rangsangan dari lingkungan untuk mampu bergerak yang ditentukan dengan cara kerjanya. Pengontrolan tingkah laku seseorang melalui bantuan yang bijak dari



Latihan musik semasa di MAN/SMA



Dengan KPID Sulawesi Selatan ihwal pentingnya kolaborasi pengawasan dan pemantauan film di Lembaga Penyiaran

lingkungan yang relatif besar, mendorong seseorang melakukan monitoring terhadap perilakunya, agar tidak memperoleh stigma sosial. Proses pembelajaran individu mengubah perilakunya berdasarkan konsekuensi dari perilaku tersebut. Contohnya, jika seseorang mendapatkan hadiah setiap kali dia datang tepat waktu ke kantor, maka dia akan cenderung datang lebih sering tepat waktu. Film merupakan salah satu media yang dapat melakukan perubahan perilaku, karena film adalah karya seni budaya yang berguna untuk media komunikasi, yang menyampaikan pesan moral dan etika. Oleh sebab itu, ketika seseorang mampu menangkap pesan moral yang disampaikan konten film, maka akan

mampu mengubah perilaku seseorang tersebut. Sebab, adegan dalam film menggambarkan tentang lingkungan yang baik sesuai alur cerita.

Berpijak dari istilah Kabadayi dan Skinner, bahwa perilaku seseorang terkontrol oleh lingkungan dan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat guna, dan salah satu media tersebut adalah film, maka aku selalu mengupayakan untuk menonton film. Terutama untuk melihat nilai moral sebagai manifestasi dari fungsi pendidikan. Film yang aku tonton bukan hanya di bioskop tetapi juga film di televisi, termasuk sinema elektronik (sinetron). Penilaianku pada waktu itu, film yang ditayangkan terutama di televisi, belum mampu memberikan fungsi pendidikan dengan baik. Karena masih banyak film yang tayang belum mencerminkan budaya Nusantara dan memberikan nilai negatif pada anak-anak. Banyak film yang masih menggambarkan tentang hal yang sensitif bagi masyarakat, dan ditayangkan pada waktu *prime time* seperti adegan pornografi, kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat serta penistaan pada agama dan keyakinan, tindakan melawan hukum yang dapat berdampak negatif pada perilaku penonton.

Aku pikir, tayangan film perlu ada perbaikan, agar fungsi pendidikan dan proses pembelajaran bagi penonton dalam memahami karakter budaya, dapat tertanam dengan baik. Sehingga perilaku penonton akan tergerak untuk lebih baik juga. Apalagi semakin majunya teknologi dan informasi, kian mempersempit sekat pengenalan



budaya asing, yang kadang tidak sesuai karakter budaya bangsa. Berdasarkan hal tersebut, ketika ada peluang untuk bisa berperan aktif untuk melakukan perubahan pesan konten film, maka tersiarnya informasi tentang dibukanya kesempatan untuk ikut menjadi anggota dan tenaga sensor di Lembaga Sensor Film (LSF), sangat menarik minatku. Akupun ikut mendaftar untuk menjadi tenaga sensor.

Selama menjadi tenaga sensor, tugas utamaku adalah membantu anggota dalam melakukan penelitian dan penilaian terhadap judul, gambar, adegan, dialog/monolog, suara dan teks terjemahan. Karena itulah, selama menjadi tenaga sensor, aku belum mampu melakukan perubahan pesan film secara signifikan. Sebab, ada permasalahan yang belum dapat terselesaikan dalam pemberian penilaian, karena ada benturan regulasi antara pra dan pasca penilaian. Terutama perbedaan penggolongan usia tayangan film antara UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada perfilman, penggolongan usia dewasa ditentukan 17 tahun ke atas, sedangkan dewasa pada penyiaran adalah 18 tahun ke atas. Film yang dianggap dewasa di perfilman dianggap remaja di lembaga penyiaran. Sehingga film-film dengan penggolongan usia dewasa ditayangkan pada waktu *prime time*, karena klasifikasinya berada di bawah 18 tahun. Selain itu, penayangan film di televisi disesuaikan dengan regulasi penyiaran, sedangkan penetapan surat tanda lulus sensor (STLS) berdasarkan regulasi perfilman. Titik temu perbedaan itu masih terus berlanjut, karena belum ada komunikasi intens antara lembaga yang mengawasi penyiaran dengan lembaga yang menetapkan STLS.

Usai mengabdikan sebagai tenaga sensor, aku pun kemudian mendaftarkan diri menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF) dengan tujuan untuk membangun komunikasi dengan para *stakeholder*. Baik dengan para sineas, *filmmaker*, produser maupun dengan *stakeholder* penyiaran. Setelah dilantik menjadi anggota LSF, langkah pertama yang aku usulkan adalah perlunya berkomunikasi dengan *stakeholder* penyiaran, untuk mempersatukan persepsi terkait perbedaan dalam penggolongan usia pada kategori dewasa. Melalui diskusi dan pembuatan perjanjian kesepakatan, ada kesepakatan dengan menggunakan diskresi kedua lembaga negara, bahwa film yang penggolongan usianya tujuh belas tahun oleh LSF dianggap dewasa oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehingga penayangannya dilakukan pada malam hari.

Mengubah regulasi melalui inisiasi lembaga yudikatif atau eksekutif tentu membutuhkan waktu lama. Namun membangun kerjasama terkait perkembangan kemajuan perfilman yang akan ditayangkan, apalagi kanal-kanal pemutaran film bukan lagi hanya lewat televisi dan bioskop, maka mencari langkah tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film, diperlukan sinergi antar *stakeholder*. Menghadapi mengguritanya pemutaran film di media *streaming* yang bak tsunami dan belum melakukan proses sensor, diperlukan strategi lain supaya

ada kesadaran bersama untuk melindungi masyarakat. Ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, setelah proses penelitian dan penilaian tentang penggolongan usia dilaksanakan, ketika film sudah tayang di bioskop, televisi dan media *streaming*, maka diperlukan penilaian dan apresiasi masyarakat terhadap hasil penilaian. Tujuannya untuk mengevaluasi hasil penilaian, dan hasil penilaian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan



Literasi dan edukasi hukum perfilman pada siswa SMK di Palembang

mengembangkan kualitas film di masyarakat. Ketika hasil penilaian tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka ada langkah yang harus ditempuh agar film dapat memberikan dampak positif bagi penonton. Kedua, diperlukan pemberian literasi dan edukasi pada para *filmmaker* dan produser agar dalam merealisasikan kreativitasnya tidak bertolak belakang dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Hasil penilaian dan apresiasi masyarakat diinformasikan kepada para *stakeholder* perfilman seperti pemilik film, bioskop, televisi dan media *streaming*, agar secara bersama-sama memberikan pembelajaran tentang nilai dan fungsi pendidikan yang terkandung dalam pesan konten film, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Literasi dan edukasi dilakukan pada dua tahap. Tahap hulu, literasi diberikan pada para *filmmaker* dan pemilik media terutama media *streaming* dan tahap hilir, literasi diberikan pada masyarakat agar cerdas memilah dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia.

Fokus utama yang perlu dilakukan sekarang, Lembaga Sensor Film berkomunikasi intens dan aktif dengan pemilik media *streaming* agar mereka memiliki kesadaran melakukan proses penyensoran film ke Lembaga Sensor Film. Sebab, walaupun media *streaming* berbayar, filmnya dapat ditonton di mana dan kapan saja, sehingga pengontrolan pada masyarakat masih longgar dan lemah. Kesadaran masyarakat menonton film sesuai penggolongan usia juga masih jauh panggang dari api. Di media *streaming*, film ditayangkan tanpa ada aturan waktu. Pemutaran film tergantung pada waktu yang dimiliki penonton. Bahkan film dapat disaksikan di ranah privasi. Kalau film tidak diberikan penggolongan usia, dikhawatirkan film akan ditonton oleh masyarakat yang belum sesuai dengan usianya, sehingga berdampak negatif pada penonton tersebut.

JATI DIRI:

Nama Lengkap : Fetrimen Zubir
Tempat & Tanggal Lahir : Koto Berapak, Jumat, 23 September 1977
Anak ke : Bungsu dari 9 bersaudara
Nama Orang Tua : Zubir Jambak & Rosani
Nama Istri : Leni Asnidar
Nama Anak : 1. Bunga Soulmate Fedleni
 2. Cinta Sakina Fedleni
Medsos : IG: @fetrimezubir - fb: fetrimen

RIWAYAT PENDIDIKAN

1984 : Sekolah Dasar Negeri 03 Koto Berapak
1984 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasar Baru
1990 : Madrasah Tsanawiyah Negeri Talaok
1992 : Madrasah Aliyah Negeri 03 Rawasari, Jakarta Pusat
1997 : Pendidikan Agama Islam Tarbiyah UNISMA (pindahan)
2008 : Administrasi Pendidikan pascasarjana UHAMKA - S2
2012 : Administrasi Pendidikan pascasarjana UNJ - S3
Gelar: S.Ag., M.Pd

INGIN MELINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK

Hafidhah Farwa Sekretaris Komisi I

Saya, Hafidhah Farwa, lahir di Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Jumat, 12 Agustus 1983. Akrab disapa Fidha, saya anak nomer dua dari tiga perempuan bersaudara. Sejak kecil saya sering mengikuti kegiatan Ayah. Selain mengajar, Ayah yang bernama lengkap Mohammad Musfar, juga punya usaha hasil tani. Jika musim panen tiba, saya ikut memetik hasil pertanian, baik tembakau, kedelai, maupun jagung dan lain-lain, dan kemudian ikut naik truk angkutan.

Ayah dan Ibu memang tidak pernah membatasi aktivitas anak-anaknya selama tidak mengganggu pelajaran sekolah. Kendati demikian, saya bercita-cita menjadi penyelam – bukan karena jago renang, tapi pulau Madura dikelilingi laut dengan banyak ikan dan karang yang bagus. Hampir setiap pekan kami bersama teman-teman bermain di pantai sambil menangkap kerang.

Mungkin saya agak ekstrem berpikir sebagai anak-anak. Sejak kecil saya penasaran kenapa anak laki-laki bisa memanjat pohon kelapa, sedangkan perempuan tidak bisa? Rasa penasaran itu timbul, mungkin karena Kakek punya kebun kelapa di sekitar rumah. Setiap panen kelapa tiba, Kakek membayar orang untuk memetikinya dan mereka semua laki-laki. Lalu saya mencoba memanjat, ternyata bisa. Sejak itu, kalau ibu butuh kelapa atau apapun yang perlu dipanjat, sewaktu-waktu saya yang disuruh. Saya bangga karena merasa setara dengan laki-laki. Pikiran





anak-anak konyol juga ya ... he he he. Tapi dari situlah saya kemudian bersemangat untuk mengambil peran lebih jauh, tanpa membedakan jenis kelamin.

Saya berasal dari keluarga yang terbuka, tetapi masyarakat di sekeliling saya, masih banyak yang berpikiran konservatif, dengan mengutamakan kemajuan bagi anak laki-laki, ketimbang anak perempuan. Kalau ada keluarga memiliki anak – perempuan dan laki-laki – prioritas pendidikan hanya diberikan kepada anak laki-laki. Melihat kondisi tersebut, saya merasa prihatin, Sebab, masih ada anak-anak terutama perempuan, yang pendidikannya tidak diperhatikan. Terserah kepada anaknya mau sekolah atau tidak. Kasihan masa depan mereka. Akhirnya, saya mengajak teman seangkatan sekolah untuk bersama-sama membantu pendidikan mereka. Setiap sore kami kumpulkan anak-anak di surau. Kami mengajari mereka menulis, membaca dan pelbagai mata pelajaran layaknya sekolah formal. Karena kami juga ada aktivitas OSIS, maka kami membuat jadwal mengajar secara bergantian. Ada tiga orang pengajar sukarela saat itu, yakni saya sendiri, kakak kandung saya Maltufah Farwa, dan satu orang teman.

Tepat umur lima tahun, saya masuk Taman Kanak-Kanak Bina Anaprasa. Lokasi sekolah itu jaraknya sekitar dua kilo meter dari rumah. Setiap hari saya diantar Ayah. Kadang juga Ibu. Baru setengah tahun di TK A, Kepala Sekolah yang akrab dipanggil Ibu Arif, menaikkan saya ke TK B, dengan alasan kemampuan belajar saya lebih cepat dari yang lain. Jadi, saya masuk sekolah dasar (SD) pada umur 6 tahun. Namun, mengingat peraturan di sekolah dasar murid SD minimal harus berusia tujuh tahun, maka umur saya pun dinaikkan satu tahun. Sekolah Dasar sampai dengan SMA, saya sekolah di yayasan yang sama yaitu Pondok Pesantren An-Nuqayah. Dan, semasa SMA saya sempat aktif di teater.

Kemudian saya melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Selain masih aktif di teater seperti waktu SMA, saya juga aktif di unit kegiatan mahasiswa/intrakampus, yakni Lembaga Kajian, Penelitian dan Pe-



ngembangan Mahasiswa (LKP2M). Programnya sangat aktif. Yaitu melakukan kajian, bedah buku dan belajar penelitian. Namun Ayah meminta saya untuk aktif di organisasi ekstra kampus juga. Akhirnya, pada semester tiga, saya ikut Latihan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pertanian Universitas Brauwijaya, Malang.

Pilihan itu sudah saya pikirkan secara matang, karena keluarga saya mayoritas NU termasuk Ibu, sementara Ayah aktif di Muhammadiyah. Adik saya yang saat itu duduk di bangku SMA, aktif sebagai pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama. Saya sendiri aktif di Nasyiatul Aisyah. Saya merasa betah karena saya mendapatkan peran yang sama ketika bergabung di organisasi. Salah satunya ketika diminta perwakilan untuk mencalonkan kadernya sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas. Saya mendapatkan rekomendasi sebagai kandidat.



Sebagai penikmat organisasi, saya tidak berhenti sampai di situ. Sembari aktif di kampus, saya juga aktif di organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi perempuan. Salah satunya adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Melihat saya aktif membela keadilan dan kesetaraan gender, Ketua DPRD Kabupaten Malang saat itu, Ibu Asminin, pun mengajak saya dalam berbagai kegiatan yang dilakukannya. Termasuk menjadi tim konseptor modul kegiatan kaukus politik perempuan. Setelah lulus S1 saya melanjutkan S2 di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), dan lulus pada 2010.

Saya hijrah ke Jakarta karena mendapat mandat sebagai Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Di situlah saya mendapatkan banyak peng-



alaman berorganisasi secara lebih luas. Teman juga semakin banyak. Terutama dari organisasi yang terhimpun dalam Cipayung Plus. Yakni, gabungan organisasi kemahasiswaan yang terdiri dari GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, KAMMI, dan HIKMAHBUDHI.

Hampir setiap hari kami mengadakan kegiatan bersama secara bergantian di masing-masing sekretariat. Bersama-sama terlibat dalam menyusun konsep RUU terkait isu-isu perempuan seperti RUU PRT, RUU Pemilu, khususnya pada keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen. Persaudaraan itu terus terbangun sampai saat ini. Mayoritas kami aktif sebagai Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI). Dan, saya sendiri mendapat mandat sebagai Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada 2015, saya berkesempatan mewakili perempuan pengusaha Indonesia bersama enam orang lainnya, mendapatkan Fellowship Australia Award Flinders University, Adelaide, Australia. Selama enam bulan di sana terkadang kangen dengan masakan kampung halaman. Untungnya, ada rumah makan khas Indonesia, namanya "Warung Daun." Tempatnya tidak jauh dari Quest, apartemen tempat kami tinggal. Ada pecel lele sebagai menu favorit, tapi memakannya harus mengajak teman, karena lelenya besar banget. Jadi enggak habis kalau dimakan sendi-



rian. Sebagai tugas akhir, saya melakukan penelitian tentang "perempuan pelaku UMKM di Indonesia". Penelitian itu saya perdalam di disertasi yang sedang saya susun, dengan sedikit perubahan sesuai kebutuhan pendidikan.

Saya gemar menonton film, baik melalui televisi maupun bioskop. Di sela-sela aktivitas bekerja dan berorganisasi, saya seringkali menonton bersama keluarga atau teman-teman. Selama aktif sebagai pengurus pusat Perempuan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), kami punya jadwal menonton rutin setiap malam Kamis, setelah rapat mingguan. Jika ada film yang berkaitan dengan nilai-nilai perjuangan, motivasi atau lainnya, kami selalu mengagendakan untuk nonton bersama. Baik secara independen organisasi atau bekerjasama dengan lembaga lain.

Saya hampir tidak pernah ketinggalan untuk menonton film inspiratif tentang perempuan. Baik film dalam negeri maupun film asing. Mulai dari menyuarakan emansipasi perempuan, ketidaksetaraan gender di masyarakat, sampai diskriminasi ras. Film Amerika *Little Women* karya sutradara Greta Gerwig, yang tayang pada 2019, pernah dikaji bersama para aktivis pemuda. Film yang cukup ringan, namun mengangkat tema yang cukup mendalam, itu mengisahkan kehidupan empat perempuan pada era perang saudara. Masing-masing mengajarkan kita untuk tumbuh tegar, percaya diri dan optimistis. Kisah itu melawan pemahaman misoginis yang belum kunjung usai. Mencoret stigma masyarakat bahwa perempuan hanya makhluk yang cantik dan manja.

Kemudian film *Hidden Figures* karya sutradara Theodore Melfi, yang tayang



pada tahun 2016, dan menceritakan tentang rasisme yang cukup kental di masyarakat Amerika Serikat. Dan masih banyak film lainnya seperti *Kartini*, *Sokola Rimba*, *Yuni* dan lainnya. Tak kalah menarik juga film Bollywood berjudul *Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani*, kisah cinta pemuda dengan latar belakang keluarga patriarkis, yang mencintai gadis bernama Rani, dari keluarga yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Kisah cinta itu putus nyambung karena perbedaan kultur, namun berbuah manis karena Rani mampu mengubah keluarga budaya patriarki menjadi keluarga yang humanis.

Selain hobby wirausaha, saya juga menekuni aktivitas akademik sejak 2010. Sebagai pengajar, saya seringkali mencari metode yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Di antaranya dengan mengajak menonton film. “Film merupakan alat yang ampuh sebagai media belajar. Selain mengajar di kampus, saya seringkali menjadi fasilitator pada pelatihan pemberdayaan perempuan. Dan, saya kerap memilih film-film yang dapat memotivasi perempuan, seperti *Perempuan Berkalung Sorban*, *Tjoet Nja’ Dhien*, *The Iron Lady* dan lainnya. Dengan tontonan tersebut, saya berharap para perempuan mempunyai pola pikir yang lebih maju, dan mengubah sudut pandang, sekaligus menularkannya kepada perempuan lain. Sebab, tanpa disadari, menikmati film dapat membentuk karakter para penonton.

Sejak 2016, saya menjadi Asisten Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Berinteraksi dengan insan penyiaran selalu menarik, dan saya semakin memahami tentang regulasi penyiaran. Televisi membutuhkan kreativitas yang tinggi, agar pemirsa tetap betah mengikuti program-programnya. Terutama bagi lapak program hiburan. Namun harus tetap memperhatikan norma-norma yang



berlaku. Saat itu, komisioner KPI sangat memperhatikan berbagai aspek untuk memajukan penyiaran, terutama di layar kaca (televise), yang dapat menyuguhkan tayangan berkualitas, tapi tetap menghibur, dan mendapatkan *rating* yang tinggi.

Menjaga keseimbangan tersebut tentu tidak mudah. Perlu ada komunikasi intensif antara regulator dan *stake holder*. Sebagai apresiasi atas karya-karya berkualitas dari Lembaga Penyiaran, setiap tahun KPI mengadakan “Anugerah KPI.” Pada 2016, “Anugerah KPI” diselenggarakan di Trans7, pada 2017 di SCTV, dan tahun 2018 di RCTI. Selama proses persiapan “Anugerah KPI,” itu saya terlibat sebagai



panitia, bersama perwakilan dari televisi dan radio. Kegiatan serupa juga ternyata menjadi agenda rutin LSF, yang diadakan setiap dua tahun sekali dalam rangka mengapresiasi Rumah Produksi/*Production House* (PH), TV dan bioskop serta para pihak terkait, melalui pemberian “Anugerah LSF”.

KPI dan LSF pun intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dalam keterkaitan tugas serta fungsinya. Kedua lembaga itu saling bekerjasama dalam setiap kegiatan masing-masing dan saling mengikat dengan menandatangani nota kesepahaman (MOU). Sekolah P3SPS rutin diadakan KPI minimal satu bulan sekali. Pada 2018, Mayong Suryolaksono sebagai PIC (*Person In Charge*) mengundang Ketua LSF Ahmad Yani Basuki sebagai pembicara kunci. Beliau menyam-



paikan bahwa LSF dalam melakukan penyensoran film dan iklan film, tidak lagi memotong tapi melakukan klasifikasi usia, dan mengembalikan kepada pemilik untuk direvisi, bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Oleh sebab itu, film tetap bisa dinikmati secara baik oleh penonton. Dalam meningkatkan layanan publik, LSF telah memiliki Aplikasi Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (*e-Sias*). Poin-poin yang disampaikan beliau membuat saya lebih tertarik untuk mengenal LSF lebih jauh. Karena yang ada di benak mayoritas masyarakat, termasuk saya, LSF adalah lembaga yang suka memotong-motong film.

Mengingat film sebagai hiburan bagi masyarakat mampu menembus batas-batas



kelas sosial dan lintas usia, maka kemampuan film dalam menjangkau pelbagai segmen kelas sosial membuat film memiliki potensi untuk memengaruhi khalayak penikmatnya. Nilai strategis film tidak hanya sebagai karya hiburan. Film pun berpotensi menjadi media edukasi, yang dapat mengkomunikasikan pesan pendidikan secara efektif. Bahkan mampu memengaruhi perilaku seseorang.

Saya sendiri bergabung di Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMIWI), organisasi yang merupakan himpunan seluruh organisasi keislaman perempuan Indonesia, yang mensinergikan gerakan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di ranah publik dan domestik. Salah satu program yang digalakkan BMIWI adalah melindungi anggota keluarga terutama anak, terpapar pornografi, yang salah satunya disebabkan oleh tontonan. Melihat kondisi tersebut, saya ingin terlibat berkontribusi dalam regulasi perfilman.



Pada 2019 tepatnya bulan Mei, saya mendapat informasi terkait adanya seleksi terbuka calon anggota Lembaga Sensor Film. Saya tertarik untuk mendaftar dan segera melengkapi persyaratan administrasi. Tahap demi tahap yang dilalui, merupakan pengalaman berharga buat saya, yang termasuk dari lima perempuan yang lolos sampai *fit and proper test* oleh Komisi I DPR RI. Tepat pada Jumat 8 Mei 2020, saya dilantik bersama 16 Anggota lain secara daring, oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Walau saat itu saya tidak bisa berjumpa di tempat pelantikan, karena dibatasi oleh PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan saat pandemi Covid-19, namun



upacara pelantikan itu tetap berjalan baik dan sangat khidmat.

Pasca pelantikan dilanjutkan dengan rapat pleno Anggota LSF dengan presidium Noorca M. Massardi sebagai anggota paling senior, dan Mukayat Al-Amin, anggota paling junior. Dari hasil sidang pleno pertama itu, terpilih Rommy Fibri Hardiyanto sebagai Ketua dan Eryan Ismail sebagai Wakil Ketua.

Saat PPKM, aktivitas kantor harus dilakukan dengan bekerja dari rumah (WFH) secara total. Namun karena LSF harus memberikan pelayanan penyensoran, maka LSF tetap bekerja di kantor, karena penyensoran tidak bisa dilakukan di rumah. Yang menarik, saat pandemi *Covid-19* ternyata tidak terjadi penurunan jumlah materi sensor. Bahkan sebaliknya, jumlah materi sensor lebih banyak. Walau kami tidak melakukan sensor film peruntukan bioskop, karena tidak boleh ada aktivitas menonton di sana, namun tontonan televisi dan media informatika



meningkat pesat. Sebab, tontonan melalui jaringan internet menjadi alternatif hiburan terbaik, saat semua orang dibatasi untuk keluar rumah.

Pandemi Covid-19 membatasi masyarakat beraktivitas di luar rumah. Jalan umum dijaga sangat ketat bagi para pengendara. Pasca pelantikan, saya menjalankan tugas kantor dengan pulang pergi Jakarta-Subang, Jawa Barat. Awalnya, saya tinggal di sana karena ikut suami yang sedang menyelesaikan sebuah proyek. Akibatnya, sejak Maret 2020, kami belum bisa kembali ke Jakarta, karena bagi yang datang dari luar kota, harus melalui proses yang sangat panjang. Termasuk dikarantina dengan waktu tertentu. Suatu hari, saat perjalanan ke kantor, dari Subang, saya diperiksa oleh petugas di jalan tol Cikampek, tepatnya di KM 50. Saya sempat meyakinkan petugas bahwa saya harus masuk kantor dengan tugas menyensor film dan iklan film, sesuai nama yang tertera pada surat tugas yang telah ditanda tangani Ketua LSF dan dikirim melalui email. Alasan petugas menolak kami adalah karena mereka tidak mau surat berupa file, tapi harus menunjukkan bukti fisik cetak. Terpaksa saya harus putar balik dan kembali ke Subang. Perjalanan yang lumayan jauh tapi sia-sia, akibat “petugas yang jadul amat, padahal sekarang zamannya elektronik.” Sembari kembali ke Subang lagi, saya menelepon Pak Ervan selaku Wakil Ketua LSF, yang selalu *standby* di kantor, dan meminta bantuan untuk menggantikan penyensoran. Subang - Jakarta bukan jarak yang dekat untuk tiap hari pulang pergi, namun situasi dan kondisi itu harus dilalui, apalagi kebetulan saya memang suka jalan-jalan. Jadi punya kesan tersendiri.

Sebagai Sekretaris Komisi I LSF bidang Penyensoran, Dialog, Komunikasi dan



Data, hampir setiap saat saya menerima “surat-surat cinta” terkait klasifikasi usia penonton film, dialog film dan lainnya. Dengan penuh tanggungjawab, kami mengupayakan merespon pemohon dengan secepat mungkin, sebagai salah satu standard pelayanan terbaik. Ketua Komisi I, Dr. Nasrullah, seorang ustadz yang kocak, perwakilan dari Kementerian Agama, membuat ritme kerja kita selalu *happy* dengan capaian kerja yang memuaskan. Dalam proses penyensoran, kami mengedepankan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2014 tentang LSF. Pasal 25 menyebutkan bahwa penyensoran film dan iklan film dilakukan berdasarkan prinsip dialogis dengan pemilik film dan iklan film yang disensor.

Menyensor bersama tim yang terdiri dari anggota LSF dan tenaga sensor (TS) di studio sangat kompak. Sesuai amanat peraturan dan perundangan, film dan



iklan film yang lulus untuk penayangan di khalayak umum, menjadi tanggungjawab LSF. Maka dalam menyensor kami dengan seksama menilai dan menganalisis film dari pelbagai perspektif, untuk ditentukan penggolongan usianya. Dalam proses memutuskan klasifikasi terkadang sangat dinamis. Itu merupakan dinamika proses yang dapat menguatkan keputusan kami sebelum menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Ketika menyensor, situasi kebatinan kita juga dapat berubah-ubah, karena *genre* film yang ditonton sangat variatif. Usai menyensor film laga, kami bisa menyensor film horor, atau drama romantis, komedi dan lainnya. Semua film kami nilai dan analisis secara baik, karena selain sebagai regulator,



kami juga harus memposisikan diri sebagai penonton (masyarakat), pelaku usaha dan pelaku kegiatan film.

Sebagai regulator, jelas kami menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 33/2009, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri dan lainnya. Sebagai perwakilan masyarakat, kami harus memastikan para penonton dapat menikmati film secara baik dan nyaman. Sebagai pelaku kegiatan film, kami harus dapat memahami keseluruhan film dari pelbagai perspektif. Kemudian, sebagai pelaku usaha perfilman, bagaimana film bisa dinikmati khalayak ramai dan mendapatkan jumlah penonton sebanyak-banyaknya, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kehangatan dan kebersamaan tidak hanya dirasakan oleh sesama Anggota LSF. Dengan tenaga sensor, pejabat dan staf sekretariat, termasuk petugas kantor dan satpam, hubungan kami juga sangat dekat. Seluruh elemen merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan mendukung, demi berjalannya roda organisasi

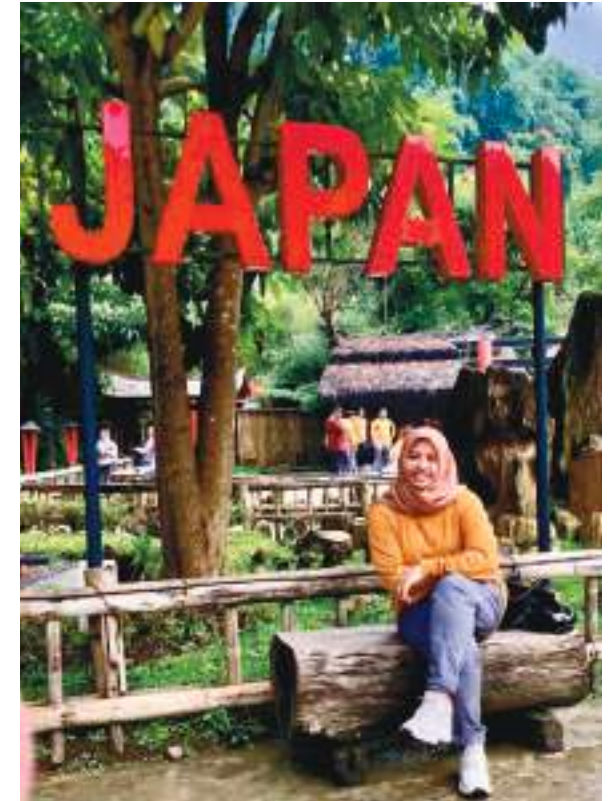


dengan baik. *Branding, Organizing* dan *Developing* selalu diterapkan untuk menjaga stabilitas organisasi yang visioner. Berkat kerjasama yang baik, LSF pun meraih posisi ketiga predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI pada 2022, untuk kategori Lembaga Negara. Dan, kemudian meraih peringkat kedua pada 2023.

Mengingat Lembaga ini tidak akan mengalami paripurna tugas, namun sebaliknya dengan gempuran media informasi yang semakin tidak bisa dibendung lagi, LSF terus melakukan langkah-langkah strategis dalam

menjalankan fungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dari dampak negatif yang timbul akibat peredaran dan pertunjukan film. Tentu dalam hal ini LSF tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait, sangat dibutuhkan. Dengan menggalakkan budaya sensor mandiri yang massif, diharapkan masyarakat semakin sadar untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Sehingga dapat mengoptimalkan dampak positif film sebagai salah satu sumber peradaban bangsa.

Ke depan, LSF tentu harus mampu menyesuaikan dengan melakukan reformulasi. Jika tidak, maka generasi bangsa tidak bisa dibendung lagi akan menjadi peniru ulung dari tontonan yang akan terus berkembang. Dalam hal ini, kami juga melakukan kunjungan ke beberapa negara, terutama yang film-filmnya diminati masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Negeri Matahari Terbit, Jepang. Di sana kami melakukan *sharing* untuk meningkatkan wawasan dan informasi yang relevan mengenai penetapan klasifikasi usia untuk film maupun iklan film.





Lima Srikandi LSF (2020-2024). Kika: Titta, Rita, Erry, Wiwid dan Fidha

Berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jepang di Shinjuku, Tokyo, kami disambut hangat oleh Ny. Meinarti Fauzie sebagai Kepala Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya dan Prof. Yusli Wardiatno selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo. Berikutnya kami melanjutkan diskusi dengan pihak Japan Foundation di kantor pusatnya di Tokyo, serta dengan Eiga Rinri Kikoh (EIRIN). Setelah berdiskusi, kami sama-sama melihat studio penyensoran EIRIN. Ada beberapa ruang studio yang digunakan untuk melakukan penyensoran.

EIRIN merupakan organisasi independen nonpemerintah yang bertanggung jawab atas penetapan klasifikasi dan *rating* film di Jepang, dan didirikan sejak 1956. Pada awalnya, EIRIN merupakan otoritas dari pemerintahan Jepang, namun kemudian berubah menjadi perusahaan swasta. Diskusi dengan EIRIN dipimpin Ishikawa Tomoharu (Direktur Utama, Sekretaris Jenderal EIRIN), Yoshihisa Imaida (Hakim/Komisioner EIRIN), dan Makoto Ozaki (Hakim/Komisioner EIRIN).

EIRIN memiliki 14 orang fungsionaris yang terdiri dari 8 (delapan) anggota yang bertugas khusus dalam menentukan klasifikasi usia. Anggota tersebut dipilih oleh dan dari pegawai di perusahaan besar (studio) film di Jepang, yang kemudian bekerja secara *fulltime* sebagai pegawai tetap di EIRIN. Anggota yang terpilih harus





memiliki bekal kompetensi dan pengalaman di bidang perfilman, dengan batas usia maksimal 68 tahun. Sedangkan enam pegawai lainnya, bertugas sebagai staf keuangan, administrasi pendaftaran film dalam negeri/asing dan supervisor untuk mengkoordinasi administrasi secara keseluruhan.

EIRIN membagi klasifikasi usia film dalam empat kategori yaitu : G (General Audience), GP (General Public / Semua Umur), Parental Guidance (Penonton 12+), R 15+ Restricted (Penonton 15+), R 18+ Restricted (Penonton 18+). Kriteria penentuan klasifikasi usianya

dilakukan berdasar 8 (delapan) elemen utama yaitu: Tema dan Subjek; Bahasa; Ekspresi Tindakan Seksual; Ketelanjangan; Ekspresi Kekerasan dan Kekejaman; Horor dan Ancaman; Narkotika dan Zat Adiktif; serta Kejahatan dan Pelanggaran. Dengan menekankan perhatian pada perilaku seks, tindak kekerasan dan kekejaman, NAPZA, kejahatan dan pelanggaran hukum. Di luar delapan elemen tersebut, ada ketentuan lain yang mengikat yaitu tentang adegan konsumsi alkohol, yang diberlakukan untuk penonton usia 20 tahun ke atas. Isu terkait LGBT tidak mendapat perlakuan khusus di Jepang, dibandingkan isu yang menyangkut suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Kunjungan tersebut sangat membantu bagi kami sebagai anggota LSF untuk terus melakukan perbaikan sesuai kebutuhan masyarakat, dan selalu menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.



JATI DIRI:

Nama Lengkap :

Hafidhah Farwa

Tempat & Tanggal Lahir :

Sumenep, 12 Agustus 1983

Medsos :

IG : fidhafarwa Fb : Hafidhah Farwa

Nama Orangtua : Ayah : Mohammad Musfar

Ibu : Siti Munawaroh

Nama Suami : Aang Widayanto

Nama Anak : Naresh Azfar Evano

RIWAYAT PENDIDIKAN

S1 : Universitas Islam Negeri (UIN) Malang

S2 : Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Fellowship Adelaide University Australia

RIWAYAT PENGALAMAN

Asisten Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat (2016-2019), Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak bekerja sama dengan Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers (2017-2018), dan Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu (2019). Sempat menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, sejak dilantik sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Komisi I LSF RI (2020-2024) pada 8 Mei 2020, sementara menghentikan kegiatan mengajar, karena ingin fokus di LSF.



APRESIASI FILM & PROGRAM TV SEBAGAI KARYA SENI

Joseph Samuel Krishna
Ketua Subkomisi Promosi
dan Apresiasi

Walaupun lahir di Jakarta pada Rabu, 18 Mei 1983, namun karena tumbuh dan besar di Bekasi, Jawa Barat, saya mendapat nama panggilan “Ocep.” Nama panggilan itu terasa akrab karena sama kerennya dengan panggilan “Joseph” atau “Josh,” yang bukan nama asli orang Indonesia. Ayah saya sendiri asli Magelang, sedangkan Ibu dari Jakarta. Dan, saya diberi nama Joseph karena kedua orang tua saya penganut Katolik yang cukup taat.

Sebagai sulung dari tiga bersaudara, kendati di keluarga kami ada asisten rumah tangga, saya diberi tanggung jawab untuk menjaga adik-adik. Karena itulah saya merasa memiliki legitimasi untuk cerewet kepada adik-adik saya, terutama untuk urusan mengerjakan PR, hingga ke disiplin jam makan. Dan, karena kedua orang tua kami bekerja, maka sedari kecil saya sudah bisa dan biasa membuatkan makanan untuk adik-adik. Terlebih saat asisten rumah tangga kami pulang kampung.

Pada dasarnya saya adalah seorang *introvert*. Waktu kecil, pada sore hari saya memang sering bermain bersama teman-teman sebaya. Namun, saya lebih banyak memanfaatkan waktu untuk membaca komik, mendengarkan serial sandiwara radio *Tutur Tinular*, atau menonton rekaman video betacam seri televisi *Dai Sentai Goggle-V* (1982), produksi Toei Company’s, sejenis *Power Rangers* pada masa sekarang.



Podcast dengan narasumber: Hilmar Farid Ph.D, Direktur Jenderal Kebudayaan

Akhir 1990an, ketika televisi swasta mulai bersiaran nasional, walau masih harus ditangkap dengan menggunakan *decoder*, saya mulai banyak menonton film melalui televisi. Untuk merasakan sensasi menonton film, selain dari TVRI, saya juga bertamu ke rumah teman untuk *nimbrung* menonton, karena saat itu belum banyak pemilik televisi yang menggunakan *decoder*. Seiring waktu, keluarga kami pun bisa menyaksikan film serial dari rumah sendiri, seperti *MacGyver*, *Tour of Duty*, atau *Miami Vice*. Sementara pengalaman menonton film di bioskop, sudah saya lakukan sejak masih di sekolah dasar, antara lain, menonton film-film *Warkop* dan *Saur Sepuh*.

Ihwal pendidikan, sebagian besar saya tempuh di Bekasi, Jawa Barat. Mulai dari Taman Kanak-kanak Maria Fransiska, SD dan SMP Strada Bhakti Wiyata, kemudian SMU Marsudirini. Baru saat menempuh S1 Hukum, saya kuliah di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.

Sejatinya, saya tidak pernah terpikir untuk mengambil ilmu hukum sebagai bidang kuliah saya. Karena sedari kecil saya justru bercita-cita ingin menjadi pastor. Bahkan, selulus dari SMP, saya sempat mendaftar ke sekolah seminari, sebelum akhirnya saya urungkan niat itu dan memutuskan melanjutkan ke SMU.

Masa kuliah saya, saya selesaikan dalam empat tahun, tepat pertengahan 2005. Sebelum mendapatkan pekerjaan sesuai ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah, saya sempat bergabung dengan perusahaan *trading* valas. Walau jam kerja saya dimulai pagi dan berakhir sore hari, namun malam hingga dini hari adalah



perjalanan panjang untuk menonton berita luar negeri. Mengingat akun yang saya pegang dalam mata uang US\$ Dollar, Swiss Franc, Yen Jepang dan Hongkong Dollar (HK\$), maka apa pun yang terjadi di tingkat global, akan sangat berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing itu.

Pada awal 2006 saya diterima bekerja sebagai *corporate legal* di stasiun televisi swasta TV7, yang merupakan anak perusahaan Kelompok Kompas Gramedia (KKG), sebelum kemudian diakuisisi Transcorp dan berganti nama menjadi TRANS7. Saya ingat betul, tugas pertama saya adalah membantu manajemen untuk mananggulangi robohnya salah satu menara pemancar televisi. Suatu tugas yang luar biasa mendebarkan bagi seseorang yang baru lulus kuliah.

Adapun pekerjaan rutin saya saat itu adalah mempersiapkan pelbagai perjanjian yang diperlukan perusahaan, seperti sewa alat, *sponsorship*, serta perjanjian *talent* (kontrak artis) yang tampil dalam tayangan televisi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, dan 7 (tujuh) jam seminggu. Termasuk pengurusan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) program, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dengan artis atau pihak ketiga, terkait tayangan televisi.

Terkadang saya sering tersenyum ketika melihat nama-nama artis besar yang dulu pernah saya buat perjanjian *talent*-nya. Sebut saja nama Sule, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, hingga band-band papan atas seperti Sheila On 7, Noah (sebelumnya: Peterpan) dan Dewa. Tidak hanya perjanjian dengan artis, sejumlah program juga dulu saya siapkan keperluan legalitasnya. Misalnya, *Bukan Empat Mata* (sebelumnya: *Empat Mata*), *OVJ*, *Jejak Petualang*, *Si Bolang*, hingga proses lahir kembalinya karakter si Unyil yang pernah berjaya pada 1980-an dalam program *Laptop si Unyil*. Salah satu pencapaian besar saya di TRANS7 adalah pada 2009, yakni ketika saya terpilih sebagai *The Best Employee of TRANS7*. Pada akhir 2011, saya pun menyelesaikan pengalaman kerja saya sebagai *Legal Supervisor* di TRANS7.

Perjalanan karir saya di dunia televisi berlanjut ke *iNewsTV* (sebelumnya *SunTV*, dan berubah menjadi *SindoTV*), sejak akhir 2011. *iNewsTV* menjadi salah satu televisi berita di bawah naungan MNC Group. Latar belakang keilmuan saya kembali bermanfaat, ketika saya diangkat sebagai Head of Government Relation and Regulatory Affair. Di situ, saya harus banyak belajar, tidak hanya tentang hukum pertelevisian, tetapi meliputi dunia pertelevisian dari sisi bisnisnya, serta peran televisi sebagai media massa elektronik dan corong kebudayaan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi, jaringan *iNewsTV* pun dikembangkan. Bila semula hanya memiliki jaringan sebanyak 26 stasiun televisi, pada akhir 2018 bertambah menjadi 62 jaringan di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan kapasitas diri, sambil bekerja di *iNewsTV*, saya mengambil Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) untuk mendapatkan izin beracara. Dan, saya mengakhiri karir di *iNewsTV* pada Mei 2020, setelah dilantik sebagai



Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia periode 2020-2024.

Sebelum itu, pada pertengahan 2019, saya mendapat informasi ihwal adanya seleksi penerimaan Anggota LSF. Saya mengenal lembaga ini tidak sekadar saat menonton bioskop, tetapi juga karena tugas keseharian saya di televisi. Salah satunya adalah memastikan setiap program yang akan tayang, mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) terlebih dulu dari LSF. Sedikit banyak, saya sudah mendapatkan informasi mengenai hal-hal terkait penyensoran, seperti prosedur, biaya, dan proses waktunya. Adanya keterkaitan antara pekerjaan saya dengan LSF itulah yang menjadi salah satu faktor pendukung bagi saya untuk berganti haluan. Dari sebelumnya bekerja di perusahaan swasta, kemudian beralih kerja ke sebuah lembaga negara yang independen.

Setiap tahapan dalam proses menuju LSF, bagi saya, merupakan pengalaman yang mendebarkan. Mulai dari pengumpulan berkas administratif, menjalani tes demi tes, dipanggil wawancara oleh panitia seleksi, hingga akhirnya melakukan *fit and proper test* di Komisi I DPR RI. Semua itu merupakan sesuatu yang baru buat saya. Apalagi ditambah masa tunggu yang cukup lama yakni, sejak hasil pengumuman hingga jadwal pelantikan. Jadwal itu tertunda akibat terjadinya pandemi Covid-19, yang dinyatakan berlaku nasional sejak Maret 2020. Masa darurat itu merupakan masa-masa penantian tersendiri bagi saya. Deg... deg... an...

Awal Mei 2020, datang jugalah surat undangan pelantikan itu. Saya, bersama 16 rekan lainnya, tepat pada 8 Mei 2020, dilantik oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, sebagai Anggota LSF periode 2020-2024. *And the another journey begin...*

Dilantik sebagai Anggota LSF di tengah pandemi, merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Kami berdiri berjarak, menggunakan *green screen* sebagai latar belakang, mengikuti rangkaian seremoni, hingga akhirnya dilanjutkan dengan pembacaan sumpah atau janji. Walau dilakukan secara *online* atau daring (dalam jejaring), dan tanpa disaksikan oleh keluarga secara langsung, acara pelantikan tersebut tidak berkurang kekhasyukannya. Selesai kegiatan pelantikan, kami lanjutkan dengan rapat pleno perdana untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Subkomisi. Sesuai tradisi, Sidang Pleno pertama itu dipimpin Anggota paling senior, yakni Noorca M. Massardi, dan Anggota paling yunior, yakni Mukayat Al Amin.

Di dalam organisasi LSF, saya kemudian dipercaya menjadi Ketua Subkomisi Promosi dan Apresiasi. Tugas utamanya adalah mengatur “kampanye” LSF di media televisi dan radio, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan *Anugerah LSF*, sebuah ajang pemberian penghargaan kepada film, program televisi, eksibitor (penyelenggara pertunjukan film) seperti bioskop, televisi dan OTT, dan penghargaan kepada tokoh yang memenuhi kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh LSF.

Penyelenggaraan *Anugerah LSF* yang ketiga, dilakukan pada 2021, di tengah masa pandemi Covid-19. Dan itu merupakan *Anugerah LSF* yang perdana. Tidak



Podcast dengan narasumber: Reza Rahadian dan Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto

hanya bagi saya, tapi juga bagi Anggota LSF Periode 2020-2024. Dengan keterbatasan tatap muka akibat adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai kebijakan pencegahan penyebaran virus Covid-19, *Anugerah LSF 2021* pun diselenggarakan secara *hybrid*. Tayangan dilakukan secara *live delay* di salah satu stasiun televisi nasional, namun dapat disaksikan secara *daring* melalui platform *youtube* dan *zoom*. Dan, itu tentu memberikan pengalaman tersendiri bagi saya. Seperti kata pepatah: “pengalaman adalah guru yang paling berharga,” maka demikianlah yang saya alami.

Anugerah LSF 2021 mengusung tema *Cerdas Memilah dan Memilih Tontonan*. Tema ini dipilih sebagai wujud implementasi dari Budaya Sensor Mandiri (BSM) yang sedang gencar disosialisasikan LSF, dan sekaligus diharapkan dapat memicu pola pikir positif masyarakat dalam mendukung BSM sehingga tercipta kesadaran masyarakat akan tontonan yang sesuai dengan penggolongan usia.

Dengan tema tersebut, *Anugerah Lembaga Sensor Film 2021* memberikan apresiasi bagi karya film, sinetron, iklan serta eksibitor yang memenuhi kriteria sensor mandiri dengan mengedepankan pendidikan, budaya, serta menjalankan fungsi, tujuan, asas film, dan memberi nilai tambah bagi film yang mendapatkan penghargaan. Selain itu, juga memberikan motivasi agar produksi perfilman semakin baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.



15 KATEGORI PENGHARGAAN ANUGERAH LSF 2021

Film Bioskop Semua Umur (SU)
 Film Bioskop 13 tahun ke atas (13+)
 Film Bioskop 17 tahun ke atas (17+)
 Film Animasi
 Sinetron
 Iklan Peduli Pandemi
 TV Peduli Pendidikan
 TV Peduli Kebudayaan
 TV Peduli Nasionalisme dan Kebangsaan
 TV Peduli Dokumenter Indonesia
 TV Peduli Sensor Mandiri
 Bioskop Peduli Sensor Mandiri
 Rumah Produksi Sadar Sensor
 TV Lokal Sadar Sensor
Lifetime Achievement

Pada *Anugerah LSF 2021* terdapat satu kategori tematik yang sesuai keadaan global saat itu, yaitu Kategori Iklan Peduli Pandemi. Melalui kategori itu, LSF memberikan penghargaan pada iklan yang secara masif dan menarik, memberikan sosialisasi mengenai prosedur kesehatan dalam menghadapi Covid-19.

Dalam kurun empat bulan sejak ditetapkan SK Kepanitiaan *Anugerah LSF 2021*, tim kurator yang terdiri dari Tenaga Sensor melakukan kurasi materi untuk menentukan nominasi peraih anugerah semua kategori. Penjurian dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah melakukan kurasi materi menjadi 5 (lima) *nominee* pada masing-masing kategori. Tahap kedua adalah penetapan peraih anugerah dari setiap kategori. Dalam melakukan penilaian, Juri *Anugerah LSF 2021* terdiri dari 17 Anggota LSF, dengan latar belakang masing-masing. Dengan demikian, perbedaan status, gender, pendidikan, pengalaman, bakat, dan profesi setiap anggota itu semakin memperkaya penilaian dalam menentukan peraih anugerah setiap kategori.

PERAIH ANUGERAH LSF 2021 PER KATEGORI

Film Bioskop SU: *Doremi & You* - Produksi PT Kerja Baik Kreatif
 Film Bioskop 13+: *Ati Raja* - Produksi PT Tujuh Delapan Enam
 Film Bioskop 17+ : *27 Steps of May* - Produksi Green Glow Pictures



Film Bioskop Animasi: *Riki Rhino* Produksi Batavia Pictures
 Iklan Peduli Pandemi: *ILM Korlantas Muter Dikit* Produksi PT Ratu Media Visual
 Sinetron: *Tukang Ojek Pengkolan* Produksi MNC Pictures
 TV Peduli Pendidikan: TRANSTV
 TV Peduli Kebudayaan: INDOSIAR
 TV Peduli Nasionalisme dan Kebangsaan: TVONE
 TV Peduli Dokumenter Indonesia: KOMPAS TV
 TV Peduli Sensor Mandiri: ANTV
 Bioskop Peduli Sensor Mandiri : 21 Cineplex (XXI)
 Rumah Produksi Peduli Sensor Mandiri: MNC Pictures
 TV Lokal Peduli Sensor Mandiri: DAAI TV
Lifetime Achievement: Christine Hakim

Berkat pengalaman bekerja di televisi dan banyak terlibat dalam penyelenggaraan *event on air* maupun *off air*, saya cukup memiliki bekal dalam persiapan *Anugerah LSF 2021*. Kerjasama yang sangat baik antara seluruh tim LSF dengan televisi penyelenggara, menghasilkan acara *Anugerah LSF 2021* yang sangat sukses. Bahkan mendapatkan *share* dua digit menurut perhitungan AC Nielsen, sebuah angka *share* yang terbilang tinggi untuk pelaksanaan acara serupa.

Saat tulisan ini dibuat, kami tengah melakukan pengumpulan materi, penjurian hingga proses penyusunan acara *Anugerah LSF 2023* (yang keempat). Pada *Anugerah LSF 2023* ini, selain kategori yang sudah ada, LSF menambahkan lima kategori baru sehingga totalnya menjadi 20 kategori.

LIMA KATEGORI BARU ANUGERAH LSF 2023

Iklan Komersial Bangga Budaya Bangsa
 TV Berjaringan Bermuatan Lokal
 OTT Peduli Sensor Mandiri
 FTV
 Kepala Daerah Peduli Sensor Mandiri

Lantas, apa yang menjadi rutinitas harian di LSF? Menyensor. Proses penyensoran film dan iklan film dilakukan oleh Kelompok Penyensor, yang terdiri dari Anggota dibantu Tenaga Sensor. Penyensoran selalu dilakukan pada jam kerja. Di sinilah letak kenikmatannya. Kami menjadi “penonton” perdana sebelum film dan iklan film itu ditayangkan ke khalayak umum. Baik di bioskop, di lembaga penyiaran televisi, maupun di jaringan informatika.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, LSF



Kunjungan ke Korea Media Rating Board

menentukan penggolongan atau klasifikasi usia dalam empat batasan umur. Pertama, semua umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+) dan 21 tahun ke atas (21+). Dan, selama periode ini, tidak pernah ada keraguan bagi kami dalam meneliti, menilai dan akhirnya memutuskan penggolongan usia tertentu, untuk setiap materi film dan iklan film yang disensor. Khususnya yang akan ditayangkan di bioskop.

Namun tidak demikian untuk tayangan film / iklan film yang akan dipertunjukkan di lembaga penyiaran televisi. Sebagai lembaga penyiaran, televisi tunduk pada Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 47 UU 32/2002 itu menyebutkan bahwa "Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang". Artinya, selain mengacu kepada Undang-undang tentang Penyiaran, stasiun televisi pun terikat pada tata cara dan persyaratan penyensoran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 33/2009 tentang Perfilman dan peraturan turunannya.



Dinamika dapat terjadi karena adanya perbedaan klasifikasi usia antara Undang-undang tentang Perfilman dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam Undang-undang tentang Perfilman, klasifikasi usia dewasa adalah 17+ (tujuh belas tahun ke atas) dan 21+ (dua puluh satu tahun ke atas). Sementara dalam P3SPS KPI, klasifikasi usia dewasa dimulai pada usia 18+ (delapan belas tahun ke atas).

Untuk mengatasi perbedaan klasifikasi usia tersebut, tentu diperlukan kesepahaman dan persamaan persepsi antara LSF, KPI dan pihak televisi, agar tidak menimbulkan kebingungan. Tidak hanya bagi pemilik materi film / iklan film, atau lembaga penyiaran televisi, tetapi juga bagi masyarakat pemirsa televisi.

Sebagai salah seorang Anggota LSF termuda (kelahiran 1983), saya tentu harus lebih mawas diri dan bijak dalam berinteraksi dengan sesama Anggota. Terlebih lagi rekan-rekan saya ini adalah para ahli di bidangnya, dengan latar belakang pendidikan yang tidak main-main. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka sudut pandang kami dalam menilai film / iklan film pun tentu berbeda. Memang dalam beberapa kesempatan, hal itu bisa menimbulkan dinamika yang menarik, namun seringkali perbedaan itu justru sangat memperkaya pandangan lembaga terhadap suatu film / iklan film yang disensor.

Saat ini, mungkin LSF adalah satu-satunya Lembaga Negara di Indonesia yang



LSF pada Broadcasting Expo 2022



Sosialisasi BSM di Kep. Bangka Belitung

paling banyak komisioner (anggota)-nya. *Fun fact*-nya dari kami bertujuh belas, lima orang berasal dari generasi milenial, dan 12 anggota lainnya, yang notabene lebih senior dari saya, ternyata juga tidak kalah “milenial”-nya. Yang menyenangkan, di LSF kami sepakat untuk berbusana dengan *style* yang lebih dekat dengan gaya para insan perfilman dan pertelevisian, agar terhindar dari kesan “terlalu birokratis”. Jadi, kami terbiasa menggunakan alas kaki *sneakers* yang dipadupadankan dengan celana jeans, atau atasan *turtle neck* ditambah *blazer* agar tetap terlihat formal sekaligus *smart casual*. Tentu saja di luar busana resmi batik, jas, atau seragam LSF.

Ihwal pengalaman berinteraksi satu sama lain, baik dengan sesama Anggota, dan Tenaga Sensor (TS) maupun dengan Sekretariat LSF, yang paling menarik adalah, di sela-sela selesai penyensoran dan rapat, kami selalu menyempatkan waktu untuk bercengkrama di ruang salah seorang anggota, Pak Kuat Prihatin, yang berasal dari unsur Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Ruangan itu kami beri nama “Warung Prihatin.” Mungkin ruangan Pak Kuat itu adalah ruang teramai dan terpenyusut, mengingat di situlah kami selalu berbincang hal ihwal yang sifatnya non formal dan non *jobdesc*. Pembicaraan makin hangat bila datang suguhan berupa kudapan jajan pasar yang hampir setiap hari dibawa Ibu Saptari



Naik angkot, siapa takut??



Novia Stri, Anggota yang juga berasal dari Kemendikbudristek, serta buah-buahan sehat dari “Mbak Wiwid” Setyaningsih, Anggota dari unsur masyarakat, ataupun oleh-oleh yang dibawa rekan-rekan kami yang kebetulan pulang dari perjalanan dinas. Intinya, “Kalau enggak ada Warung Prihatin *enggak* ramai...!”

Semakin mendalami tugas di LSF, saya kian bisa menikmati film sebagai karya seni. Sebelumnya, saya bukan orang yang *freak* untuk menyaksikan film-film yang baru rilis di bioskop. Dalam setahun, mungkin hanya dua hingga tiga kali saya menonton bioskop. Itu pun dengan *genre* tertentu: film perang dan film *action*, khususnya yang bertema mata-mata atau spionase. Saat itu saya hanya setia pada dua *genre* itu. Saya jenis orang yang setia menunggu suatu film ditayangkan di tv kabel atau di televisi, walau sudah tidak menjadi *trending topic* lagi. Dapat dibayangkan bahwa pihak televisi tentu baru akan membeli hak penayangannya setelah film itu tidak lagi ditayangkan di bioskop. Harganya pun pasti sudah lebih terjangkau bagi stasiun televisi.

Pola pikir dan kegemaran saya pun akhirnya berubah. Sejak bekerja di LSF, setiap hari kami meneliti dan menilai banyak film, program televisi, dan iklan yang



Menjadi salah satu peserta dialog pakar

disensorkan ke LSF, untuk memperoleh surat tanda lulus sensor (STLS), agar dapat ditayangkan ke khalayak umum. Itu adalah bagian dari pekerjaan kami sebagai anggota LSF. Sehingga, saya yang semula hanya menyukai *genre* perang dan spionase, lambat laun mulai tertarik pada *genre* komedi bahkan *horror* dan *thriller*. Sesuatu yang sebelumnya saya hindari. Sebab, dulu saya berpikir, *ngapain* mengeluarkan uang untuk menonton film dan membeli jajanan di bioskop, kalau hanya untuk ditakut-takuti. Kemudian, saya yang semula selalu setia menunggu film bioskop ditayangkan di televisi, akhirnya malah lebih sering menonton di bioskop. Setidaknya dua kali dalam sebulan saya menonton ke bioskop, baik



karena menghadiri undangan gala *premiere* film, maupun untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga.

Lain halnya dengan program televisi. Sebelumnya, hampir 15 tahun saya bekerja di televisi dengan fokus utama bukan pada program televisi, melainkan dalam aspek pendukung bisnis pertelevisiannya. Seperti dari sisi legal, *regulatory*, perizinan penyiaran, hingga *event* yang diselenggarakan stasiun televisi. Sejak di LSF, saya jadi semakin memperhatikan dan menghargai program televisi sebagai suatu karya seni. Ya, walaupun program televisi mungkin tidak sekompleks film, namun buat saya, itu adalah karya seni juga yang perlu diapresiasi. Saya yang sebelumnya hanya menonton program *hard news*, *soft news* dan *documentary*, sekarang jadi belajar untuk melihat, menikmati, sekaligus



Menjadi salah satu pemateri di Sosialisasi BSM

meneliti dan menilai sinetron, FTV, hingga program-program *reality show*. Sebagai informasi, semua program televisi memang disensorkan ke LSF, kecuali program jurnalistik dan tayangan *live*.

Salah satu *fun fact* lainnya di LSF, khususnya di dalam studio sensor adalah menjelang siang. Materi sensor yang selalu saya tunggu adalah program kuliner dari televisi. Menariknya, hampir setiap stasiun televisi memiliki program kulineran dengan gaya masing-masing. Nah, program tersebut selalu kami tunggu, karena dapat menggugah selera makan. Tampilan makanan dalam isi program itu menjadi rujukan bagi kami mau makan apa siang itu. Teng! Ketika jarum jam



Menyempatkan ikut beberapa race half marathon sebagai salah satu hobby.

Menunjukkan angka pukul 12.00, kami pun sudah tahu mau makan apa siang itu!

Saat ini kita melihat tontonan, khususnya film, yang begitu beragam. Baik *genre* maupun media penayangannya. Semula, kita hanya menonton film di bioskop, televisi dan cakram digital. Tapi sekarang, kita dapat menyaksikannya melalui layar komputer, telepon genggam, tablet, atau gawai lainnya, dengan kualitas layar dan suara yang terbilang sangat baik. Banyaknya variasi *genre* dan media penayangan film, itu telah memanjakan para penikmat film. Namun sayangnya, masih banyak penikmat film yang menonton film bajakan, baik melalui *link* internet maupun cakram digital bajakan.

Bagi saya, film adalah karya seni yang tidak dapat dihasilkan secara instan. Selain biayanya tidak murah, membuat film juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Baik dari ide, cerita, dan skenario, juga terkait honor para pemain, honor kru, anggaran produksi, bahkan biaya promosinya. Itulah sebabnya, kita harus lebih menghargai film, dengan tidak menonton film bajakan. Apapun *genre* filmnya. Apakah itu *action*, komedi, *thriller*, perang, maupun horror, semuanya layak untuk diapresiasi. Dengan menonton film yang orisinal, selain kita menghargai karya seni, juga merupakan bentuk apresiasi kita terhadap artis, sineas, dan insan film yang terlibat di dalamnya. Harapan saya, semoga penegakan hukum di Indonesia terhadap pelanggaran pembajakan film, dapat dilaksanakan secara lebih tajam dan lebih tegas.



Bersepeda dan lari olahraga yang saya gandrungi.

Salah satu tugas kami adalah melakukan sosialisasi tentang Budaya Sensor Mandiri (BSM), menginisiasi pembentukan Desa Sensor Mandiri, dan melakukan literasi tentang hukum mengenai pentingnya karya film / iklan film memiliki STLS (Surat Tanda Lulus Sensor). Kegiatan-kegiatan itu kami lakukan baik secara *daring* (dalam jaringan) melalui *webinar* maupun secara *luring* (luar jaringan), dengan melakukan kunjungan ke pelbagai kota yang memiliki komunitas perfilman dan televisi lokal.

Hal yang menarik adalah, bagaimana kesan pertama rekan-rekan yang kami temui di pelbagai kota di Indonesia, terhadap tugas fungsi dan keberadaan LSF. Banyak yang masih memiliki persepsi bahwa LSF adalah “tukang gunting” film. Tetapi setelah diskusi selama beberapa saat, akhirnya muncul pemahaman baru bahwa, LSF saat ini bukanlah “tukang gunting film” dan bukan pula sosok yang berada di tengah-tengah antara film dengan penonton, serta bukan merupakan lembaga yang menghalangi atau memasung kebebasan berkarya dan berekskpresi.

LSF dalam paradigma baru saat ini adalah sebuah lembaga yang hanya menggolongkan film sesuai klasifikasi umur (calon) penonton, mulai dari SU, 13+, 17+ sampai 21+. Kalaupun para pemilik film berkeberatan terhadap penggolongan usia yang telah ditetapkan LSF melalui penerbitan STLS (surat tanda lulus sensor), para pemilik film yang bersangkutan masih dapat melakukan “banding.” Pemilik film dapat mengajukan permohonan dialog, dan memberikan argumentasi serta menyampaikan keberatan terhadap rekomendasi atau



penggolongan usia yang telah ditetapkan LSF. Dengan demikian, dalam melakukan penyensoran, LSF selalu mengutamakan prinsip dialogis. Dan LSF sekarang, sebagai lembaga, sudah berada di samping, bahkan duduk bersama penonton, untuk memberikan tuntunan dalam menonton, serta membantu penonton dalam memilah dan memilih film sesuai klasifikasi usia.

Budaya Sensor Mandiri yang dikampanyekan secara nasional oleh LSF, sejatinya merupakan gerakan yang positif dan semestinya dapat berlanjut, bahkan pada era LSF berikutnya. Sebagai seorang ayah, saya tidak ingin anak saya menonton tayangan yang tidak sesuai dengan usianya. Pembatasan itu tentu tidak bisa dilakukan secara paksa, namun perlu ditumbuhkembangkan sebagai kesadaran individu dari dalam. Harapan saya, siapapun yang melanjutkan tongkat estafet keanggotaan LSF, dapat terus menggemakan gerakan ini, dengan disertai pembaruan sesuai perkembangan zaman.

Selain itu, mengingat perkembangan media massa dan media sosial yang demikian pesat saat ini dan ke depan, kata “sensor” mungkin merupakan kata yang dianggap “kurang ramah” pada era demokrasi. Kata “sensor” cenderung diartikan sebagai pengkekangan dan pembatasan kebebasan berekspresi. Saat berdialog dengan para pelaku perfilman dan komunitas perfilman, awalnya terkesan betapa rekan-rekan di dunia perfilman sangat berjarak dalam melihat keberadaan LSF. Seperti ada “jurang pemisah” yang tidak dapat terseberangi di antara kedua pihak. Apalagi, LSF merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 33/2009 tentang Perfilman, dan menggunakan kata “sensor” di dalamnya.

Sekalipun dalam setiap diskusi atau dialog tercipta pemahaman dari para pelaku dan pegiat perfilman tentang tugas dan wewenang LSF, yakni sudah menjadi lembaga penggolongan usia atas setiap materi tayangan yang disensor, tetap saja kata “sensor” dalam Lembaga *Sensor Film* itu tidak dapat dihilangkan. Sebab, demikianlah bunyi yang sudah tertulis dalam undang-undang. Sementara kita semua pasti paham, tentu butuh waktu yang tidak singkat untuk merevisi sebuah undang-undang.

Ke depannya, akan menarik apabila dalam revisi undang-undang tentang perfilman, itu dilakukan *exercise* untuk mengubah konsep “sensor” menjadi penggolongan / klasifikasi usia atas film. Akan tetapi, apakah setiap film yang masuk ke lembaga itu hanya akan langsung diberikan klasifikasi usia? Tentu tidak! Setiap materi yang disensor wajib diteliti dan dinilai. Mulai dari judul, tema, gambar, adegan visual, dialog/monolog, suara dan teks terjemahan, serta hal-hal lain yang terkait. Namun proses sensor itu bukan untuk melakukan revisi melainkan untuk menentukan kelayakan tayangnya di khalayak umum, dan untuk menetapkan klasifikasi usia penontonnya. Tentu hal ini akan berjalan maksimal bila diiringi peningkatan kesadaran dan budaya masyarakat, dalam memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.



JATI DIRI:

Nama lengkap:

Joseph Samuel Krishna Agung Aditya

Tempat / Tanggal Lahir:

Jakarta, 18 Mei 1983

Nama Orangtua: Nicklaus Soegito & Brenda A

Nama Istri: Yulianti Aina

Nama Anak: Gwen Honey Aditya

Medsos: IG: joshsamuelofficial

RIWAYAT PENDIDIKAN

1989: Taman Kanak-kanak Maria

Fransiska

1995: SD Strada Bhakti Wiyata

1998: SMP Strada Bhakti Wiyata

2001: SMU Marsudirini

2005: FH Universitas

Tarumanegara

Gelar: S1 Ilmu Hukum





SUMMARY

Joseph Manuel Krishna

Lahir di Jakarta, Rabu 18 Mei 1983, tumbuh besar di Bekasi, membuatnya biasa dipanggil “Ocep”, walau panggilan “Joseph / Josh” sedari kecil digunakan sejak sekolah. Ayah asli Magelang, sedangkan Ibu dari Jakarta. Anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara ini menjadi penikmat film sejak usia sebelum sekolah. Film yang masih menjadi kenangan hingga sekarang adalah serial televisi Dai Sentai Goggle-V (1982), produksi Toei Company's, sejenis Power Rangers pada masa sekarang. Seiring waktu, ketika decoder mulai diperkenalkan ke masyarakat, dan bertambahnya siaran televisi swasta nasional serta banyaknya bioskop di Jakarta, kian banyak tayangan yang hingga sekarang masih terekam di memori seperti Warkop, Saur Sepuh, MacGyver, Tour of Duty dan Miami Vice.

Menghabiskan waktu sekolah lebih banyak di Bekasi, mulai dari TK Maria Yashinta, SD dan SMP Strada Bhakti Wiyata hingga SMA Marsudirini, aktivitas di Jakarta baru dimulai ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Lulus sebagai sarjana hukum menjadi modal kerja sebagai legal officer di salah satu stasiun televisi besar di Jakarta, sebelum kemudian pindah ke grup stasiun televisi lain untuk menambah pengalaman dan mengembangkan diri. Menjabat sebagai Head of Government Relation and Regulatory Affair di stasiun televisi, membuat akrab dengan Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai salah satu stakeholder di bidang perfilman dan ptelevisian. Itulah awal mula ketertarikan pada LSF hingga pada 2019 ikut mendaftar seleksi anggota LSF periode 2020 – 2024. Puji Syukur, pada Mei 2020 dilantik menjadi Anggota LSF (2020-2024) dengan posisi sebagai Ketua Subkomisi Promosi dan Apresiasi LSF. Tugas utamanya adalah melakukan promosi lembaga di pelbagai media, khususnya televisi dan radio, serta menjadi penanggung jawab penyelenggaraan "Anugerah LSF" yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.



DARI BIROKRAT KE LEMBAGA SENSOR FILM

Kuat Prihatin
Ketua Subkomisi Penelitian
Dan Pengkajian

Saya lahir pada Ahad, 4 Mei 1969 di Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara. Krendetan adalah desa kecil di perlintasan jalan antara Purworejo – Jogjakarta, yang posisinya saat ini berjarak sekitar 10 kilometer dari dan ke Bandara Internasional Jogjakarta, Kulonprogo. Karena itulah dalam hati saya membatin, jangan-jangan bandara baru itu sejatinya memang khusus dibangun untuk masyarakat Purworejo, bukan untuk warga Jogjakarta he he he...

Nama saya Kuat Prihatin. Itu memang cukup unik. Karena tidak akan pernah ada orang lain yang punya paduan nama persis seperti nama saya. Bahkan bila diketik di mesin pencari *google* pun pasti tidak akan ketemu. Dan, yang lebih unik lagi adalah, saya sendiri baru tahu nama lengkap saya Kuat Prihatin, justru saat saya mau masuk sekolah dasar. Padahal, sampai saya berdiri di depan pintu sekolah, setahu saya, nama lengkap saya adalah Yatin Teguh Raharjo. Sehari-hari pun, sejak saya kecil, nama panggilan saya adalah Yatin. Rupanya, nama Kuat Prihatin itu pemberian dari Nenek saya, yang langsung dilaporkan ke Catatan Sipil Kantor Kelurahan. Sehingga, nama itulah yang kemudian tercatat di akte kelahiran, dan yang harus selalu tercantum dalam semua dokumen pribadi



Bangga dengan blangkon, di
Tokyo, Jepang, November 2022



Literasi dan Edukasi Hukum, di Kendari Mei 2023

maupun Negara. Sementara nama Yatin Teguh Raharjo, ternyata hanya pemberian dari paman saya. Mengingat, waktu saya lahir, Ayah kandung saya sudah meninggal dunia. Makanya sebagai doa, paman memberi nama Yatin Teguh Raharjo, yang artinya anak yatim yang prihatin, teguh, dan sejahtera. Namun, nama itu tidak pernah dicatatkan di dalam dokumen kelahiran. Kalah pamor sama nama pemberian Nenek, yang artinya juga hampir sama.

Jadi bisa dibayangkan, betapa *irked* atau aneh dan ganjilnya kejadian itu. Selama enam tahun saya menghirup udara di dunia desa, sampai hari saya berdiri di depan pintu sekolah, saya selalu menyangang nama Yatin Teguh Raharjo. Tapi begitu saya melangkah me-

lewati pintu itu, lalu saya diabsen, nama saya pun langsung berubah menjadi Kuat Prihatin. Dan, perubahan itu dilakukan tanpa sepengetahuan saya, juga bukan karena keinginan saya. Sehingga, bila sebelum masuk ruangan kelas itu saya adalah diri saya sendiri, namun begitu masuk dan berdiri di dalam ruang kelas, saya sudah bukan saya yang dulu lagi. Nama baru saya pun terasa menjadi *alien*, atau makhluk asing yang merasuk ke seluruh tubuh saya. Untung saat itu, *gen*, *DNA* dan *antibody* saya, tidak melakukan penolakan terhadap nama yang baru dicangkokkan itu. Saya seperti menikmati metamorfosa menjadi tokoh super Kuat di “Prihatin *verse*.” Kalau tidak, pasti saya akan mengalami demam tinggi, dan harus segera bikin

kenduri, upacara ganti nama, dengan bubur merah bubur putih he he he...

Dalam keseharian, saya memang suka bercanda dan ngebanyol. Dan banyolan itu sering kali keluar secara spontan. Bahkan saat saya sedang serius. Bagi saya, bercanda dan “*mbanyol*” itu merupakan ekspresi kegembiraan, sekaligus sebagai cara saya untuk bisa keluar dari suasana kaku, dan menjadi semacam “*ice breaker*”. Jadi, suatu kebahagiaan bagi saya, bila saya bisa membuat teman-teman tertawa. Walau sebenarnya saya juga bisa serius, apalagi ketika dihadapkan pada tenggat waktu penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, tetap saja suasana itu tidak menghilangkan selera bercanda saya. Sementara saya sendiri sebenarnya takut kalau sampai disebut lucu, karena kalau saya lucu nanti bisa dibeli orang. Kok bisa? Karena anak-anak gadis sekarang, sering membeli sesuatu hanya karena sesuatu itu mereka rasa atau mereka anggap lucu. Bukan karena sesuatu itu memang indah, bagus, atau murah...!

Karena lahir dan besar di desa, maka masa kecil saya pun dilalui dengan melakukan berbagai aktivitas sebagaimana anak-anak desa pada umumnya. Akrab dengan aneka permainan tradisional seperti *patil lele* (ada yang menamai bentic), petak umpet, ular naga, permainan dengan kartu bergambar wayang dan lain sebagainya. Termasuk tentu saja, bermain sepak bola di jalanan. Aktivitas khas anak desa lainnya yang saya lakukan adalah membantu pekerjaan orang tua di sawah. Membersihkan gulma yang disebut “*matun*”, menunggu padi, sampai bersama buruh melakukan “*derep*” atau memanen padi. Setiap aktivitas itu saya lakukan dengan riang gembira dan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Mungkin juga berkat pengaruh nama baru saya yang harus selalu kuat dalam keprihatinan.

Ada kebiasaan yang dilakukan warga saat panen padi di sawah. Tempat yang padinya sedang dipanen, akan didatangi para penjual makanan dan minuman, seperti gorengan dan dawet. Para penjual makanan itu pada umumnya melakukan praktik jual beli dengan sistem barter. Satu mangkok dawet bisa ditukar dengan satu ikat kecil padi. Proses itu disebut dengan “*ngurup*”. Belakangan baru saya tahu bahwa *ngurup* itu mungkin berasal dari kata “*corrupt*” atau korup, satu pengertian yang sama dengan korupsi pada saat ini, yakni mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sebab, padi yang ditukarkan itu sejatinya memang milik yang punya sawah dan bukan milik penderep/penggarap.

Melakukan *ngurup* saat itu biasanya sudah diketahui dan diizinkan para pemilik sawah. Bahkan tidak jarang pemilik sawah yang mengundang penjual dawet, agar berjualan di area sawahnya yang sedang dipanen. Sehingga, *ngurup* itu menjadi sah dan halal. Sementara, sistem pengupahan dari pemilik sawah kepada para penderep, dilakukan dengan mekanisme bagi hasil. Biasanya para penderep diberi seperenam dari total padi yang didapatkan. Tetapi hal itu juga tergantung dari

sikap pemilik sawahnya. Ada juga yang memberikan sepertujuh, bahkan seperdelapan. Pada saat ini, sebagian besar panen padi sudah dilakukan dengan mesin, tetapi melalui mekanisme bagi hasil atau borongan.

Aktivitas lain yang tidak kalah menggembirakan adalah mencari kayu bakar. Karena hal itu bisa dilakukan sambil bermain dan mencari buah-buahan, seperti jambu biji atau jambu mede. Untuk jambu mede, tidak hanya dagingnya yang dimakan, tetapi juga bijinya. Yang menjadi masalah adalah, getah atau minyak yang ada pada kulit biji jambu mede sangat keras dan bisa menimbulkan luka “dadak” apabila terkena kulit. Untuk menghilangkan getah pada kulit, jambu mede biasanya cukup diusapkan ke rambut atau telapak kaki, sehingga tidak jarang rambut anak-anak berbau getah kulit biji jambu mede.

Ada satu insiden yang pernah saya alami saat mencari kayu bakar. Ceritanya, pada waktu itu di suatu kebun, saya dan teman saya diizinkan mengambil pelepah kelapa kering, yang masih menempel di pohon kelapa. Setelah saya memanjat di ketinggian, mungkin karena capek atau lemas mengingat sedang berpuasa, terlepaslah tangan saya dari pegangan. Saya pun langsung jatuh dari pohon kelapa yang tingginya kurang lebih 10 meter itu. Gedubrak. Alhamdulillah, tidak ada cedera serius, meskipun saya kemudian harus dirawat lima hari di rumah sakit.

Perkenalan saya dengan tontonan di televisi dimulai sekitar 1974, saat ada tetangga yang membeli televisi hitam putih. Mulai saat itulah menonton acara televisi menjadi menu wajib setiap hari. Biasanya, kegiatan menonton televisi dilakukan sepulang dari mengaji atau pada hari Minggu pagi. Pada saat itu tidak ada pilihan acara atau pilihan stasiun televisi, karena hanya ada satu stasiun televisi publik yaitu TVRI (Televisi Republik Indonesia). Sehingga acara apapun yang ditayangkan, akan ditonton dan dinikmati, mulai dari warta berita, ramalan cuaca, maupun film. Semua anak di kampung saat itu sudah hapal jadwal acara televisi, jam berapa dan hari apa ditayangkan.

Acara televisi terfavorit pada masa itu antara lain: *Ayo Menyanyi* bersama Ibu Sud, *Ayo Menggambar* bersama Pak Tino Sidin, *Boneka Si Unyil*, acara musik *Aneka Ria Safari*, kuis *Berpacu dalam Melodi*, acara olah raga *Dari Gelanggang ke Gelanggang* dan sebagainya. Namun, ada satu acara yang sangat ditunggu seantero negeri, bahkan dunia, yaitu siaran langsung pertandingan akbar antara Juara Dunia Tinju Kelas Berat George Foreman versus penantang Muhammad Ali, pada 30 Oktober 1974.

Diselenggarakan di May Stadium, Kinshasa, ibukota Zaire (sekarang Kongo), Afrika Barat Daya, pertandingan yang dikenal sebagai “Gemuruh di Tengah Hutan” (*Rumble in the Jungle*) itu sangat fenomenal. Sebab, tiga tahun sebelumnya, Ali harus melepaskan gelar juara dunianya kepada petinju muda Joe Frazier, yang mengalahkannya di New York, Amerika Serikat, Maret 1971. Sementara pada



Bersama Tim LSF, dalam kunjungan ke EIRIN, LSF-nya Jepang, November 2022

1974 itu Ali sudah berusia 32 tahun sedangkan Foreman yang belum pernah terkalahkan, masih berusia 25 tahun. Suatu pertandingan tak seimbang yang secara teori sulit dimenangkan Ali. Namun berkat strategi *rope a dope* - bersandar pada tali - Ali terus bertahan mengandalkan tali pembatas, dan mau menerima pelbagai pukulan Foreman, sampai lawannya lelah kehabisan tenaga. Nah, pada detik-detik terakhir Ronde kedelapan, Ali akhirnya mampu menyalakan pukulan balasan yang sangat kuat, hingga Foreman jatuh dan KO (*Knockout*)! Maka mendengar dan membaca begitu terkenal nama Ali, saat itu, saya sempat mengira kalau Muhammad Ali itu adalah orang Indonesia, karena namanya terdengar begitu akrab dengan telinga.

Mengingat saat itu awal 1970-an, dan di desa belum ada aliran listrik, maka televisi hanya bisa dinyalakan dengan menggunakan baterai atau accu mobil yang harus di-charge setiap kali habis strum. Ada kalanya saat nonton strum accu habis, sehingga gambarnya mulai mengecil dan perlahan-lahan layar mati dan gelap. Menonton televisi di rumah orang lain tentu tidak sama dengan menonton di rumah sendiri, seperti saat ini. Kita tentu harus menjaga kesopanan dan etika serta perlu mengetahui bagaimana *mood* yang empunya rumah. Ada kalanya kita batal menonton, karena yang punya rumah *mood*-nya sedang tidak bagus. Itulah seninya menonton televisi pada masa itu.

Belakangan, karena semakin banyak tetangga yang memiliki televisi, maka pilihan tempat menonton acara televisi juga menjadi semakin banyak. Termasuk menonton televisi umum yang ada di kantor kecamatan. Demikian juga ketika listrik sudah masuk desa, maka menonton televisi tidak lagi menggunakan accu mobil. Mulai 1980-an, kita sudah bisa menikmati cerita-cerita film yang tersaji di



Bersama pengurus Diaspora Purworejo

layar kaca. Beberapa serial televisi yang terkenal pada masa itu antara lain *ACI (Aku Cinta Indonesia)*, serta Drama Seri *Losmen Bu Broto*, dan *Rumah Masa Depan*.

Saya masuk Sekolah Dasar Negeri Krendetan pada 1976 dan lulus pada 1982. Di sekolah pada masa itu masih banyak siswa yang belum mengenal sepatu. Saya sendiri baru memakai sepatu setelah duduk di kelas 5. Demikian juga dengan tas sekolah. Kecuali anak perempuan, jarang sekali ada siswa SD yang membawa buku dan perlengkapannya dengan tas sekolah. Karena jarak dari rumah saya ke sekolah sangat dekat, sekitar 300 meter, maka setiap pagi saya biasa ke sekolah pukul 06.00 wib. Sering kali bahkan saya datang lebih dulu dibanding penjaga sekolah. Sehingga, saya suka berinisiatif membuka semua pintu dan jendela, dari ruang kelas 1 sampai dengan ruang kelas 6. Dan, saya masuk sekolah melalui salah satu jendela yang tidak terkunci. Pada saat di SD itulah saya mulai mengenal seni peran. Bahkan sempat ditunjuk menjadi salah seorang pemeran dalam lomba drama antarsekolah dasar tingkat kecamatan, meskipun tidak mendapat juara.

Selepas sekolah dasar, saya masuk di SMP Negeri Bagelen pada 1982 dan lulus 1985. Kebetulan pula letak sekolahnya masih di Desa Krendetan yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari rumah. Selama masa SMP saya pernah ikut serta pementasan teater pada salah satu perayaan di sekolah. Saya bermain bersama Mas Toto Sugriwo, yang saat ini menjadi Sekretaris GPBSI (Gabungan Perusahaan Bioskop se-Indonesia), dan menjadi salah satu produser film nasional. Pada masa ini pula saya mulai naksir pada lawan jenis, kendati belum punya

keberanian untuk mengutarakannya langsung. Kegiatan lainnya saya lalui dengan biasa saja: belajar, olah raga, pramuka, tidak ada yang istimewa. Prestasi akademis pun biasa saja. Tidak menonjol, meskipun juga tidak mengecewakan. Terbukti saya berhasil masuk SMA Negeri Satu Purworejo, yang merupakan SMA favorite saat itu sampai sekarang.

Berbekal nilai Ebtanas yang sebenarnya paspasan, dengan nilai rata-rata 7, saya mendaftar ke sekolah menengah atas favorit SMAN 1 Purworejo dan diterima. Saya mulai belajar di sekolah yang lokasinya cukup jauh dari rumah, dan harus ditempuh dengan kendaraan umum. Dengan pertimbangan efisiensi waktu, tenaga dan biaya, maka diputuskan untuk kost di dekat sekolah dan pulang ke rumah setiap sabtu sore. Lalu saya kembali ke kost pada Senin pagi. Saat itu, saya selalu dibekali dua liter beras dan uang 600 rupiah, yang harus cukup untuk hidup selama satu minggu.

Aktivitas sehari-hari yang saya lakukan selain belajar di sekolah adalah mengikuti kegiatan ekstra kurikuler teater, main sepak bola, dan sesekali nonton film di salah satu gedung bioskop di kota Purworejo. Namun, setelah menjalani masa satu semester, tinggal di kost ternyata tidak memberikan dampak yang baik bagi saya di sekolah. Saya menduduki peringkat terakhir nilai rapor dari 46 siswa satu kelas. Karena itulah saya memutuskan untuk berhenti kost dan pergi pulang rumah-sekolah setiap hari. Sejak itu, secara perlahan nilai-nilai rapor saya pun mulai membaik.

Pada penjurusan program yang dilakukan di kelas 2, saya masuk ke jurusan Budaya atau A4, dan mulai menyukai semua mata pelajaran yang terkait kebudayaan. Antara lain, Sejarah Budaya, Sastra Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Jerman. Saya pun lulus SMA pada 1988.

Selulus SMA, tanpa menunggu lama, saya langsung berangkat ke Jakarta. Bukan untuk mendaftar kuliah tetapi merantau mencari pekerjaan. Saya adalah satu-satunya lulusan SMA yang ketika ditanya oleh wali kelas, menyatakan tidak akan melanjutkan kuliah, dan akan merantau mencari pekerjaan. Pilihan yang realistis waktu itu, karena mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga, meskipun keinginan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi, tetap saya pelihara dan tidak pernah padam. Di Jakarta saya tinggal bersama Kakak tertua, di daerah Karet Belakang, Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk sementara, saya membantu melaksanakan tugas-tugas domestik keluarga kakak saya.

Toh, semua liku kehidupan itu tetap saya lakukan dengan perasaan ringan dan gembira. Tidak menunggu lama, pada September 1988, ada pengumuman pendaftaran pegawai negeri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Setelah mendaftar dan mengikuti semua rangkaian penyaringan, akhirnya saya dinyatakan lulus seleksi. Dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989,

saya sah sebagai calon pegawai negeri sipil golongan II/a dan ditempatkan di Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berlokasi di Jl. Cilacap no. 4 Jakarta Pusat.

Bekerja sebagai pegawai negeri tidak menyurutkan keinginan saya untuk melanjutkan kuliah. Pada 1991, saya mendaftar kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Yappan Jakarta, di daerah Tanjung Barat, Pasar Minggu. (kini sudah tidak ada lagi) dan mengambil kelas karyawan, dengan waktu belajar sore sampai malam hari, sehingga tidak mengganggu jam kerja. Lulus pada 1996, saya langsung mengusulkan penyesuaian ijazah dan naik golongan ke III/a. Pada 1989 saya pindah ke Depok II Tengah dan tinggal bersama keluarga Paman saya.

Banyak pengalaman yang didapatkan selama bekerja sebagai pegawai negeri. Saya merupakan bagian dari generasi “baby boomer” mengalami berkali-kali peralihan teknologi. Cukup piawai menggunakan mesin ketik manual dan masih ingat beberapa merk mesin ketik seperti Olivetti, Royal dan Brother, beralih ke mesin ketik elektrik, akrab dengan berbagai tingkat program Word Star dari WS 4, WS 5, WS6, WS7, Lotus 123, meningkat ke Excel, kemudian berbagai tingkatan program windows. Pernah menggunakan kamera saku analog, kamera digital yang semakin tinggi tingkat kepadatan gambarnya, pelbagai macam media simpan, mulai dari diskets HD, DD, flash disk yang semakin besar daya tampungnya, dan peralatan komunikasi yang berkembang pesat. Mulai dari telepon manual, faksimili, pager, sampai dengan telepon genggam yang saat ini telah berkembang pesat menjadi gawai multiguna. Bertugas sebagai staf di bagian keuangan, juga memberikan pengalaman luar biasa. Saya mulai mengenal pelbagai wilayah di Indonesia, dan hampir semua provinsi sudah saya kunjungi. Kecuali beberapa provinsi yang baru terbentuk sebagai hasil pemekaran.

Pada 1990, secara tidak sengaja saya bertemu kembali dengan Sumarmi, teman perempuan yang pernah saya taksir semasa SMP. Kami bertemu di Kantor Depnaker di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, Sumarmi sedang mengurus suatu dokumen sementara saya datang ke kantor itu untuk menemui kawan yang bekerja di sana. Setelah pertemuan itu, beberapa waktu kemudian saya memberanikan diri menemui orang tua Sumarmi, dan langsung menyatakan keinginan untuk menikahi Sumarmi. Alhamdulillah, kedua orang tua Sumarmi merestui. Akhirnya, pada 1995 saya dan Sumarmi resmi menikah dengan perhelatan yang digelar sederhana.

Selanjutnya, kami memilih tempat tinggal di sebuah perkampungan di Beji, Depok. Dari pernikahan itu, kami dikaruniai tiga orang anak. Yang pertama perempuan lahir pada Juli 1996, kami beri nama Yulinsa Luthianur “Icha” Hanifa. Saat ini, Icha bekerja di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setelah lulus S1 Jurusan Matematika Universitas Indonesia. Yang kedua, laki-laki, Muhammad



Salah satu kegiatan Paguyuban Wayah Bagelen, Puworejo.

Hafizul Baihaqi, lahir pada 2000, dan kini tengah kuliah di jurusan Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jogjakarta. Dan yang ketiga, laki-laki, Haidar Alfianur Hakim kelahiran 2002, kini tengah kuliah di Jurusan Metalurgi, UPN Veteran Jogjakarta.

Adapun Sumarmi, istri saya, setelah kami menikah memutuskan mengundurkan diri dari tempatnya bekerja, di salah satu perusahaan otomotif di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan, setelah 10 tahun fokus mengurus keluarga, sejak 2006 sampai sekarang, istri saya mengajar di sekolah dasar, karena latar belakang pendidikannya adalah sekolah pendidikan guru. Dan, Alhamdulillah sudah diangkat menjadi pegawai negeri setelah lebih kurang 12 tahun mengabdikan diri sebagai guru honor.

Saya mulai meniti karir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat pengatur muda golongan II/a pada 1989. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana pada 1997, mendapatkan penyesuaian pangkat menjadi penata muda golongan III/a. Pada 2002, bersamaan dengan terbentuknya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), saya turut beralih tugas ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Saya bertugas di Biro Perencanaan sampai beberapa kali perubahan



Santai selepas bertugas bersama M Sanggupri Sekretaris LSF, dan Sofyan di Banjarmasin, 2022

organisasi kementerian. Pada 2007, saya pertama kali mendapat kepercayaan sebagai pejabat struktural, Kasubbag Perencanaan Program di Ditjen Nilai Budaya Seni dan Film, sebelum kemudian beralih tugas ke Subag Pemantauan dan Evaluasi.

Pada 2009, saya mendapatkan promosi jabatan ke Eselon III sebagai Kepala Bagian Umum di Ditjen yang sama, dan kemudian beralih tugas menjadi Kepala Bagian Keuangan pada 2010. Dengan kembalinya nomenklatur kebudayaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2012, saya menjadi Kepala Bagian Keuangan di Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan berkantor di Senayan lagi. Tidak lebih dua tahun menjabat Kepala Bagian Keuangan, pada 2013 saya menjadi Kepala Bagian Umum pada Unit Eselon I yang sama, di Ditjen Kebudayaan. Pada 2015, saya menjadi Kepala Sub Direktorat Program pada Direktorat Kesenian. Jabatan struktural Eselon III itu saya emban selama empat tahun hingga akhir 2019, ketika terjadi perampangan dan penyederhanaan organisasi kementerian, berupa pengurangan jabatan struktural eselon III dan IV. Sesuai arahan Presiden, saya beralih ke jabatan fungsional dan mendapatkan penyetaraan menjadi Perencana Ahli Madya.

Dengan adanya peralihan ke jabatan fungsional tersebut, maka usia pensiun saya bertambah dua tahun, dari semula 58 tahun, menjadi 60 tahun. Dengan

demikian, sesuai perhitungan, saya akan menyelesaikan pengabdian sebagai pegawai negeri sipil pada 2029 ketika usia saya mencapai 60 tahun.

Namun, pada 2020, perjalanan karir saya bergeser ke bidang yang lain, karena ditugasi pimpinan untuk ikut seleksi menjadi Anggota Lembaga Sensor Film (LSF). Setelah melalui tahap konsultasi (semacam *fit and proper test*) di Komisi I DPR RI, akhirnya saya dinyatakan lulus seleksi, dan pada Jumat, 8 Mei 2020, saya dilantik menjadi anggota Lembaga Sensor Film dari unsur Pemerintah, representasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sejak itulah saya secara resmi menjadi Anggota Lembaga Sensor Film periode 2020 - 2024. Tugasnya melakukan penelitian dan penilaian terhadap film dan iklan film yang akan dipertunjukkan ke masyarakat, melalui gedung bioskop, lembaga penyiaran televisi dan jaringan informatika. Sebagai konsekuensinya, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka untuk sementara status saya sebagai pegawai negeri dihentikan dan akan diaktifkan kembali setelah selesai bertugas sebagai anggota LSF.

Apabila dihitung sejak mulai berkerja sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 1 Januari 1989, sampai dengan jabatan terakhir sebelum beralih tugas menjadi anggota Lembaga Sensor Film pada 8 Mei 2020, maka saya sudah menjalani masa pengabdian selama 31 tahun 4 bulan dan 8 hari. Rentang waktu itu tentu merupakan perjalanan panjang dan banyak sekali kisah yang dialami. Misalnya, ihwal bagaimana sesungguhnya bentuk perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan kebudayaan selama ini, terutama ketika saya ikut terlibat di dalamnya, dalam pelbagai posisi dan jabatan sebagai ASN.

Menurut saya, pengelolaan kebudayaan tidak terlepas dari empat hal atau *kuadran* dalam satu lingkaran. *Kuadran* pertama adalah mengelola sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan, atau para pelaku kebudayaan. Antara lain, bagaimana meningkatkan kompetensi para pelaku agar profesinya diakui. Selanjutnya dibuat *data base* lengkap ihwal para pelaku kebudayaan tersebut. Bagaimana memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkarya, dan karyanya diapresiasi, sehingga para pelaku tersebut bisa mendapatkan kesejahteraan. Juga, bagaimana memberikan penghargaan dan advokasi kepada para pelaku kebudayaan itu.

Kuadran kedua adalah membangun apresiator. Sikap apresiatif dari masyarakat terhadap kebudayaan perlu dibangun, agar mampu menjadi pendorong bagi majunya kebudayaan. Tanpa adanya apresiasi, maka nyala api kebudayaan perlahan akan surut dan padam. Karena itulah, membangun sikap apresiatif terhadap kebudayaan perlu dilakukan sejak usia dini, dengan mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak sejak kecil. Dan, itu bisa dimulai dengan mengajarkan pelbagai macam kesenian, mengajak menyaksikan pameran,

menonton seni pertunjukan dan sebagainya. Diharapkan, sikap apresiatif tersebut bisa tumbuh dan berkembang, yang akan berdampak pada sikap mereka terhadap kebudayaan, saat mereka dewasa.

Kuadran ketiga adalah mengelola karya budaya, yang wilayahnya sangat luas, mencakup pelbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan karya budaya. Termasuk di dalam lingkup ini adalah bagaimana memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana diplomasi yang akan mendorong meningkatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. *Kuadran* keempat atau yang terakhir adalah pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana kebudayaan. Intinya adalah, bagaimana memenuhi kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan kebudayaan.

Apabila keempat *kuadran* dalam lingkaran tersebut bergerak bersama secara efektif, maka pemajuan kebudayaan akan tercapai. Sehingga sasaran utama terbangunnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin dapat tercipta. Hanya perlu diingat, tugas untuk menggerakkan roda tersebut bukan hanya pada Pemerintah, tetapi menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tentu memiliki peran yang sentral karena berperan sebagai *dirigent* dari orkestrasi pemajuan kebudayaan di Indonesia.

Beberapa kegiatan yang memberi kesan mendalam dan membanggakan bagi saya saat bekerja di lingkungan kebudayaan antara lain adalah, lahirnya *Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)*. Kegiatan itu dilatarbelakangi oleh terbatasnya guru kesenian di sekolah di satu sisi, dan di sisi yang lain, banyaknya seniman di pelbagai daerah yang dapat dioptimalkan perannya untuk terlibat dalam mengisi kekosongan itu. Melalui kegiatan GSMS tersebut, kekosongan guru seniman diisi dengan menerjunkan seniman-seniman setempat untuk mengajar di sekolah pada jalur ekstra kurikuler. Kegiatan GSMS yang melibatkan ribuan seniman tersebut masih berlangsung sampai saat ini.

Berikutnya ada kegiatan pentas ekspresi seniman jalanan. Konsep kegiatan yang dikerjasamakan dengan Institut Musik Jalanan (IMJ) itu adalah memberikan pelatihan kepada seniman (musik) jalanan yang sebelumnya telah diseleksi, untuk selanjutnya diselenggarakan pentas ekspresi, dan ditonton oleh undangan khusus yaitu, para pemilik mal di wilayah Jabodetabek. Hasilnya beberapa mal di Jabodetabek telah menyediakan tempat untuk tampil para seniman jalanan tersebut dan diapresiasi oleh masyarakat.

Ada satu lagi kegiatan yang saya rasa cukup penting yaitu *Bumbung Seni*. *Bumbung seni* adalah *platform* penyimpanan digital untuk konten audio visual seperti halnya “YouTube”. Melalui *platform* yang disediakan oleh Negara, maka Indonesia memiliki platform penyimpanan digital tersendiri, sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan karya rekam yang dibuatnya. Sebagai



Bersama keluarga, ledul Fitri 2023

bangsa multikultur dengan kekayaan budaya yang sangat besar, sudah sepatutnya Indonesia memiliki *platform* penyimpanan karya budaya sendiri, tidak mengandalkan platform dari negara lain. Sayangnya, saat ini *Bumbung Seni* yang sempat berubah nama menjadi *Bumbung Budaya* tersebut tidak dilanjutkan pengembangannya.

Sebagai Anggota Lembaga Sensor Film, saya ditugasi menjadi Ketua Subkomisi Pengkajian dan Penelitian di Komisi III LSF. Subkomisi ini memiliki tugas antara lain melakukan penelitian dan pengkajian pelbagai hal di masyarakat, untuk meningkatkan kinerja Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan penyensoran. Sejak awal bertugas pada 2020 sampai dengan saat ini, subkomisi saya sudah melaksanakan tiga kali penelitian. Pertama, survei digital mengenai persepsi masyarakat terhadap Lembaga Sensor Film (2020), Berdasarkan survei tersebut, dari 1.200 responden, sebanyak 95 persen mengenal Lembaga Sensor Film sebagai institusi yang bertugas dan berwenang melakukan penyensoran terhadap film sebelum dipertunjukkan ke khalayak umum. Kedua, melakukan survei nasional mengenai Kinerja Perfilman Nasional dan Budaya Sensor Mandiri pada 2021. Obyek penelitiannya mencakup tiga aspek yaitu, Tujuan Perfilman, Fungsi Perfilman, serta Konten dan Budaya Sensor Mandiri. Jumlah respondennya 1.220 orang yang tersebar di 34 Provinsi dengan metode wawancara langsung secara tatap muka.

Berdasarkan survei tersebut, ada beberapa hal yang cukup menarik. Antara lain,



Olahraga bersama isteri saat CFD di kawasan Senayan, Jakarta

patkan beberapa fakta antara lain, sebanyak 35 persen responden mengaku tidak diawasi oleh orang tua dalam hal menggunakan gawai dan bermedia sosial. Sebanyak 78 persen siswa mengakses media di ruang pribadi (kamar). Ihwal apakah responden pernah atau tidak pernah membuka konten yang tidak sesuai

televisi masih menempati posisi tertinggi sebagai media yang digunakan untuk menonton film (74,3 persen) dibanding media sosial (12,4 persen), media online (7 persen), dan platform digital (1,3 persen). Kemudian, *genre* film yang paling sering ditonton adalah drama. Mungkin itu terkait dengan banyaknya drama seri yang disajikan di televisi, baik produk nasional berupa sinetron maupun produk impor seperti film seri India. Tentang kepemilikan gawai pintar (*smart phone*), data yang didapat menggambarkan bahwa 62 persen responden memiliki gawai cerdas, yang dapat digunakan untuk menonton film.

Ketiga, adalah survei yang dilakukan di Jabodetabek untuk memotret persepsi remaja terhadap kriteria penyensoran (2022). Dari survei yang dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi (Uhamka Jakarta), dida-

dengan klasifikasi usianya, sebanyak 54 persen siswa (didominasi siswa SMA/SMK) mengaku pernah membuka konten yang tidak sesuai dengan usianya. Ihwal apa yang responden lakukan setelah tidak sengaja membuka konten yang tidak sesuai usia tersebut, sebanyak 85 persen siswa segera menutupnya (didominasi siswa SD), dan 15 persen meneruskan menonton.

Penelitian terakhir yang tengah dilakukan adalah dalam format campuran (*mixed*) antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan sebagai kelanjutan dan pendalaman dari penelitian sebelumnya. Metode kualitatif dilakukan agar dapat tergalai secara mendalam bagaimana dan mengapanya.

Selama mengabdikan sebagai Anggota LSF (2020-2024), pada satu sisi, saya melihat LSF adalah lembaga negara yang bertugas memastikan agar film yang beredar dan dikonsumsi masyarakat adalah film yang layak tonton, dan menjaga agar film tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat (baca : penontonnya); namun di sisi yang lain, LSF juga harus turut menjadi bagian dari instrumen negara untuk memajukan perfilman nasional.

Karena posisinya yang demikian itulah maka dalam melaksanakan tugasnya, LSF harus selalu mempertimbangkan kedua hal tersebut secara seimbang. Dengan kata lain, peran LSF sebagai “penjaga” tidak lantas menjadi penghambat bagi kemajuan perfilman di Indonesia. Karena itulah, menjadi anggota LSF bagi saya merupakan suatu kehormatan sekaligus tantangan, karena bisa ikut terlibat secara langsung dalam proses penentuan kelayakan film untuk dinikmati penonton sesuai klasifikasi usia

Sebagai anggota LSF representasi dari Kemendikbudristek, saya berharap agar Budaya Sensor Mandiri dapat disebarluaskan melalui kurikulum pendidikan dan masuk sebagai muatan yang dititipkan dalam mata pelajaran yang relevan. Budaya Sensor Mandiri adalah bagian tidak terpisahkan dari kecerdasan literasi media atau literasi digital, yang sangat penting dimiliki siswa di semua jenjang pendidikan. Terlebih, dengan kian pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi milenial dan Generasi X, Y, Z, yang belum dapat diimbangi dengan instrumen pengawasan yang memadai,

Akhirnya, di sela-sela kesibukan sebagai ASN sekaligus Anggota Lembaga Sensor Film, alhamdulillah saya masih bisa aktif di organisasi sosial kemasyarakatan. Saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Umum Paguyuban Wayah Bagelen, yaitu paguyuban yang anggotanya putra-putri dari Bagelen, wilayah budaya di Jawa Tengah, yang kini menjadi wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tujuan pendirian paguyuban ini, selain untuk menjaga tali silaturahmi antarsesama wayah Bagelen di pelbagai daerah, juga untuk ikut serta terlibat dalam

memajukan wilayah Bagelen, melalui jalur kebudayaan, sosial, dan perekonomian. Selain itu, saya juga menjadi pengurus paguyuban sejenis dengan lingkup kabupaten Purworejo, yaitu Paguyuban Diaspora Purworejo, dan Paguyuban Pakuwojo, Keduanya memiliki tujuan yang kurang lebih sama dengan Paguyuban Wayah Bagelen. Di kedua Paguyuban tersebut saya duduk sebagai Ketua Bidang Seni Budaya.



Selepas tugas, di Taman Nasional Baluran, Jatim, 2021

JATI DIRI:

Nama Lengkap : Kuat Prihatin
Tempat & Tanggal Lahir : Purworejo, 04 Mei 1969
Nama Orang Tua : Atmo Sumarto
Nama Istri : Sumarmi
Nama Anak : 1. Yulinsa Luthfianur Hanifa
2. Muhammad Hafizul Baihaqi
3. Haidar Alfianur Hakim
Medsos : fb: Kuat Prihatin
IG: @Kuat Prihatin

RIWAYAT PENDIDIKAN

1976 : SD Negeri Krendetan, Bagelen, Purworejo
1982: SMP Negeri Bagelen, Purworejo
1986 : SMA Negeri I, Purworejo
1996: STIA YAPANN, Jakarta - S1
2011 : STIA Ipwija, Jakarta - S2
Gelar : S.Sos. M.M

KONTRIBUSI UNTUK PERFILMAN DAN MASYARAKAT

Mukayat Al Amin Sekretaris Komisi III

Lahir di desa Kalen, Kedungpring, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu, 16 November 1983, saya sulung dari dua bersaudara. Bapak dan Ibu kami berasal dari keluarga petani tulen dan merupakan pasangan pekerja keras. Tak jarang Bapak dan Ibu kami pergi ke sawah dua kali dalam sehari. Berangkat pagi hingga istirahat pulang untuk sholat duhur dan makan siang, lalu petang harinya harus kembali lagi ke ke sawah.

Selain bertani, keluarga kami juga beternak ayam, kambing dan sapi. Bagi petani kampung seperti kami, ternak itu adalah "*Raja Kaya*" atau rajanya kekayaan. Karena selain bisa untuk dijual, kotorannya pun dimanfaatkan untuk pupuk tanaman dan di sawah. Alhamdulillah, hingga saat ini Bapak dan Ibu masih sehat dan terus bertani, meski usia mereka tidak muda lagi. Namun, bila dulu mereka bertani sebagai mata pencaharian utama, sekarang sebagai hiburan masa tua. Dan, karena tubuh mereka terus bergerak dan selalu tersiram cahaya matahari, maka kesehatan mereka pun terus terjaga. Semoga beliau berdua sehat dan bahagia selalu.

Kedua orangtua saya adalah orang hebat meskipun mereka tidak lulus SD / Sekolah Rakyat dan tidak punya satu helai pun ijazah. Namun beliau berdua punya tekad yang kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Mereka tidak ingin anak-anaknya merasakan susah dan





Bersama Presiden Jokowi di Istana Negara

pahitnya menjadi petani, yang harus selaluu bekerja keras, kasar, panas dengan pendapatan tidak menentu. Belum lagi bila hama datang merusak tanaman. Mulai dari belalang, siput, tikus sampai wereng. Kekeringan juga seringkali membuat kami gagal panen. Kesimpulannya: *“Sungguh berat menjadi petani di Indonesia.”*

Karena komitmen keras kedua orang tua untuk men-sukseskan pendidikan kami hingga sarjana, maka selulus Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) setingkat SD pada 1966, saya kemudian bersekolah di desa dan wilayah lain. Yakni, Madrasah Tsanawiyah Negeri Babat. Lulus pada 1999 saya melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Babat. Sembari sekolah itu saya memperdalam ilmu agama alias *“nyantri”* mondok di Pesantren Muhammadiyah Al-Aqsho, Babat, asuhan K.H. Muhlis Sulaiman. Di

situ saya ditempa selama enam tahun (1996-2002). Banyak pengalaman yang saya dapatkan saat mondok. Antara lain, memperoleh bekal bagi kemandirian, keberanian, kedewasaan berpikir, meluaskan pergaulan, kedalaman ilmu beragama, serta kecakapan berorganisasi. Saya dididik, digembleng di pondok, hingga saya semakin matang dan mantab untuk meneruskan pendidikan ke tahap selanjutnya.

Selulus dari MAN Babat pada 2002, saya pindah ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah S1 di Institut Agama Islam (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya. Saya mengambil Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam (PMI). Jurusan itu

relatif baru, dan di Indonesia baru diadakan di tiga universitas atau perguruan tinggi. Selain IAIN Sunan Ampel, Surabaya adalah di IAIN Sunan Kalijaga, Jogja, dan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain kuliah saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yakni di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), KNPI dan Pemuda Muhammadiyah.

Pendidikan S1 saya tempuh selama empat tahun dan lulus pada 2006. Setelah lulus saya bekerja di sebuah program pemerintah dari Kementerian PU, untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Namanya PNPM P2KP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan / PNPM Mandiri Perkotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan). Sambil bekerja, pada 2008 saya melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus pada 2010. Tiga tahun kemudian (2013) saya mengajar di Fakultas Agama Islam UM SBY. Dan, pada 2018 saya melanjutkan S3 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, yang ketika saya menulis ini, tengah dalam proses penyelesaian Disertasi.

Saya pertama kali mengenai film dan menonton bioskop ketika masih duduk di Madrasah/SD di Kedungpring, Lamongan. Pada awal 1990-an bioskop sangat marak di Jawa Timur. Demikian pula di Kabupaten Lamongan. Hampir di setiap Kecamatan ada bioskop, termasuk di Kecamatan Kedungpring yang letaknya di sebelah Pasar Kecamatan. Pada suatu malam saya diajak sepupu saya yang sedang patah hati, karena baru bertikai dengan istrinya dan katanya diusir dari rumah. Untuk pelipur lara, ia mengajak saya menonton film di bioskop. Itulah perkenalan pertama saya dengan film bioskop.

Di masyarakat desa kami, ada beberapa media pemutar film. Selain melalui stasiun TV, dan bioskop, yang paling seru adalah menonton layar tancap. Layar tancap sebagai wahana pertunjukan umum seringkali diadakan di kampung kami. Penontonnya tidak hanya warga kampung kami, tapi juga warga dari pelbagai kampung lain. Tidak hanya penonton, para pedagang keliling pun berdatangan dari pelbagai penjuru. Waktu itu, layar tancap adalah hiburan yang sangat istimewa bagi warga desa kami. Pelbagai judul film diputar. Antara lain, *Brama Kumbara*, *Si Buta dari Gua Hantu*, dan *Saur Sepuh*.

Selain film-film besar tersebut, saya sangat tertarik pada film anak-anak yang diputar pada Minggu pagi. Yang paling disukai zaman itu adalah film *Si Unyil* yang ditayangkan di TVRI Pusat. Namun, di desa kami saat itu belum banyak yang punya TV. Meskipun masih TV hitam putih, kami selalu menonton beramai-ramai di rumah tetangga yang punya TV.

Seiring waktu, pada 2007, sebagai aktivis kampus, saya resah ketika melihat tontonan film yang kian hari makin tidak produktif. Banyak sinetron yang kami





anggap nilai edukasinya rendah. Oleh karena itu, saya dan teman-teman mahasiswa se-Surabaya, membuat gerakan tolak sinetron dan tayangan tv yang tidak edukatif. Beberapa kali kami melakukan aksi demonstrasi, mengingatkan kepada pemerintah selaku pembuat dan pengatur regulasi, untuk menekan pihak stasiun televisi, agar mereka menayangkan tontonan yang lebih bagus, berkualitas, dan edukatif.

Ketika pada 2017 LSF Perwakilan Provinsi Jawa Timur dibuka di Surabaya, beberapa teman dekat saya mendaftar dan diterima sebagai Tenaga Sensor (TS). Saat itulah saya mulai mengenal eksistensi serta tugas fungsi dan wewenang LSF. Sehingga, saat pendaftaran calon Anggota LSF dan Tenaga Sensor periode baru diumumkan pada 2019, saya melihat, inilah peluang dan waktunya bagi saya untuk memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap persoalan perfilman di Indonesia.

Ketertarikan saya pada LSF dimulai ketika secara pribadi saya merasa tontonan yang dihadirkan di ruang publik, tidak terlalu berkualitas, dan lebih mengutamakan profit dan kepentingan perusahaan semata. Oleh karena itu, saya merasa harus berkontribusi terhadap persoalan perfilman di Indonesia. Mulai dari berkontribusi terhadap hadirnya tontonan yang layak, dan berusaha menyadarkan masyarakat akan pentingnya memilih tontonan yang tepat.

Bekerja di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya. Pertama, LSF memberikan pengalaman luar biasa kepada saya. Kita bisa bertemu dan bekerjasama dengan banyak kalangan, yang memiliki dasar keilmuan dan latar belakang yang beragam, untuk menilai dan memutuskan kelayakan tayangnya sebuah film. Kedua, kita bisa berkontribusi dalam menjaga pengaruh atau dampak negatif film kepada masyarakat Indonesia, dengan menetapkan klasifikasi usia penonton film. Lalu, mengkampanyekan Budaya Sensor Mandiri (BSM) agar masyarakat menonton film sesuai klasifikasi usia. Di situ saya melihat kita telah berkontribusi terhadap moralitas anak bangsa.

Film sebagai karya seni budaya, memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Sebagai media komunikasi massa, film juga sangat berguna sebagai sarana mencerdaskan bangsa, mengembangkan potensi diri, membentuk akhlak mulia, dan sarana untuk promosi budaya.

Menurut saya, film sangat efektif untuk pemajuan kebudayaan. Melalui film terjadi penetrasi budaya bangsa, sehingga memberi pengaruh pada masyarakat yang hidup di wilayah budaya lain, seperti gaya berpakaian, gaya berbicara atau istilah-istilah yang terkandung dalam suatu film yang diadopsi masyarakat. Bila individu dan masyarakat tidak siap, maka film juga memiliki dampak negatif, terutama jika film ditonton oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya.



Untuk memastikan bahwa film yang diedarkan untuk dikonsumsi masyarakat adalah film yang layak dan sesuai dengan budaya bangsa, serta tidak mengandung unsur-unsur yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu ada mekanisme sensor terhadap film yang akan diedarkan. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh film yang bermutu.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, tentu berpengaruh besar terhadap peredaran dan pertunjukan film. Sebab, saat ini film tidak hanya dapat disaksikan melalui layar bioskop dan televisi, namun juga dapat diakses melalui media baru berbasis internet, platform digital dan media sosial. Sehingga, akses



Bersama Panglima TNI (Periode 2017-2021) Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P

masyarakat terhadap film semakin mudah. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, masyarakat memiliki potensi untuk mengakses konten perfilman yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya.

Film tentu akan memberikan dampak negatif, bila ditonton tidak sesuai dengan klasifikasi usianya. Film yang diperuntukkan bagi orang dewasa, misalnya, tidak akan cocok bila ditonton anak-anak. Film yang mengandung pornografi, kekerasan, perjudian, pelecehan, perendahan terhadap harkat dan martabat, serta penodaan terhadap agama dan kemanusiaan, tentu akan berdampak pada kelompok rentan bila film tersebut ditayangkan tanpa melalui proses filtrasi yang baik.



Bersama Gubernur Jawa Timur (Periode 2019-2024) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si

Mekanisme penyensoran film merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Setiap film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan, wajib mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF). Namun LSF menyadari bahwa saat ini, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif film, tidak hanya cukup dengan kebijakan pemberian STLS. Masyarakat dan publik perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan terhadap film, melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya.

Lembaga Sensor Film mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab yang besar. Dan saya, pada periode 2020-2024 ini, berada di dalamnya. Tentu saya sangat bersyukur bisa berkontribusi konstruktif dengan mendedikasikan pengabdian di LSF bagi bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia.

Ada beberapa pengalaman yang cukup menarik dalam proses kerjasama dengan Anggota dan Tenaga Sensor (TS). Hampir setiap hari kita duduk di studio, untuk menilai dan memutuskan klasifikasi film yang sudah kita lihat bersama-sama. Semua berpendapat sesuai kompetensinya masing-masing. Baik Anggota maupun TS, selalu menyampaikan pendapat terkait film tersebut. Dan Anggota yang hadir di studio tersebut akan memutuskan klasifikasi film yang telah kita nilai. Menurut saya, pengalaman yang menarik dari kerjasama ini adalah, dibutuhkan kerjasama yang baik antara Anggota dan TS, dalam menilai sebuah film, agar film yang kita



Bersama Ketua KPU (Periode 2017-2022) Arif Budiman

nilai tepat, dan aman dan nyaman dilihat serta dinikmati masyarakat.

Kadang, ada beberapa film yang disensor, sangat berat untuk dinilai. Karena film yang disensor tersebut, terkadang mengandung banyak adegan kekerasan yang sangat keras dan berlangsung dalam waktu cukup panjang. Sesekali juga ada adegan penuh kekerasan disertai dengan adegan seksual yang tampak jelas / atau adegan LGBT, dengan intensitas yang panjang. Melihat film-film dengan adegan kekerasan disertai seksualitas itulah, yang membuat kita harus sangat cermat dan berhati-hati, dalam menilai dan menentukan klasifikasi usia film, serta adegan mana saja yang kita rekomendasikan untuk direvisi kepada pemilik film. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelian dalam menentukan kalsifikasi usia film.

Seringkali Anggota dan TS berbeda pendapat terkait penilaian film. Karena setiap Anggota punya latar belakang dan pengetahuan berbeda. Sehingga, dibutuhkan diskusi cukup panjang untuk menentukan klasifikasi usia film yang tepat. Menurut saya, proses pengamatan dan diskusi menentukan klasifikasi film dalam studio, adalah sebuah pengalaman luar biasa, karena kita harus berdebat, dan berargumentasi untuk menentukan yang terbaik.

Genre film itu banyak sekali macamnya. Terlebih lagi, hampir semua orang sangat menyukai film, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. *Genre* film adalah kategori yang digunakan untuk mengelompokkan film berdasarkan tema, gaya, dan respons emosional terhadap film tersebut. Dalam dunia perfilman, *genre* film dapat digambarkan dengan elemen-elemen seperti konvensi, ikonografi, latar,



narasi, karakter, dan aktor, seperti yang ditemukan dalam teori kritik genre sastra. Kita dapat mengklasifikasikan film berdasarkan berbagai aspek seperti nada, topik/tema, suasana hati, format, sasaran audiens, atau anggaran. Karakteristik ini paling jelas terlihat pada film ber-genre, yang umumnya memiliki pengulangan kisah yang sudah dikenal, dengan karakter dan situasi tertentu dalam genre yang sama.

Genre film juga berpengaruh pada penggunaan teknik dan gaya dalam pembuatan film, seperti kilas balik dan pencahayaan rendah pada film noir, dan penggunaan bingkai pada film horor, atau jenis huruf yang terlihat seperti batang kayu yang dipahat kasar untuk judul-judul film Barat. Selain itu, genre film berpengaruh pada jenis musik dan scoring yang terkait, seperti orkestra dawai yang merdu pada film melodrama romantis atau musik elektronik pada film fiksi ilmiah. Genre film juga mempengaruhi



Literasi dan Edukasi Hukum Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto

bagaimana film ditayangkan di televisi, diiklankan, dan sebagainya.

Genre film tidak bersifat tetap. Genre dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Beberapa di antaranya mungkin menghilang, misalnya genre melodrama. Ekspektasi penonton terhadap sebuah film, juga memiliki peran penting dalam pengaruh dan bentuk genre film, serta wacana institusional yang menciptakan struktur umum. Genre film sudah mengalami banyak perkembangan dan pembaruan. Terutama berkat perkembangan industri film yang semakin pesat. Dengan bantuan Computer-Generated Imagery (CGI), film yang hanya dapat tercipta di dalam imajinasi, dapat divisualisasikan. Hal itu juga membantu



perluasan genre, di mana terdapat sebuah cerita atau karakter yang sepenuhnya berasal dari ciptaan CGI. Yang jelas genre film adalah kategori yang digunakan untuk mengelompokkan film berdasarkan tema, gaya, dan respons emosional terhadap film tersebut.

Karena film sebagai karya seni budaya memiliki peran yang strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, maka saran dan harapan saya terhadap film sebagai karya seni budaya, industri, dan hiburan adalah sebagai berikut.

Pertama; film harus lebih banyak memberikan sentuhan edukasi sehingga film juga dapat dijadikan media untuk mendidik anak-anak kita. Kedua; film harus lebih banyak memberikan sentuhan ketahanan nasional dan semangat nasionalisme



Kunjungan Ke Net.TV Bersama Jajaran Direksi Net TV dan Ketua LSF Rommy Febri Hardianto Beserta TIM LSF

yang tinggi sehingga rasa nasionalisme yang mulai terkikis pada anak-anak generasi terakhir ini bisa membara kembali. Ketiga; harus digalakkan lagi pembuatan film-film untuk usia semua umur atau film untuk anak-anak, sehingga anak-anak kita mendapatkan tontonan yang layak.

Keempat; jangan terlalu banyak memproduksi film-film horor. Coba gali kembali potensi budaya kita yang melimpah selain horor. Karena menurut saya, produksi film horor di Indonesia sangat melimpah namun miskin film untuk anak-anak. Kelima; harus ada desain besar / peta jalan pemajuan industri perfilman nasional, agar industri perfilman kita bisa berkembang dan bersaing dengan industri film negara lain seperti Korea dengan drakor-nya, India dengan



Bersama Metri Agama (Periode 2014-2019) Dr. K.H. Lukman Hakim Saifuddin

LSF melalui penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), untuk setiap tontonan yang ditayangkan baik di bioskop, televisi, maupun di jaringan informatika.

Sedangkan Program Desa Sensor Mandiri adalah program pembentukan dan penguatan perilaku masyarakat agar secara sadar dapat memilah dan memilih tontonan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan terkait secara berkesinambungan. Khususnya di wilayah Desa / Kelurahan terpilih, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mampu melakukan *self-censorship*. Desa terpilih diberikan program-program terkait penguatan BSM, yang ditentukan melalui mekanisme yang terdapat di dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh LSF.

Desa Sensor Mandiri diharapkan dapat memberikan penguatan literasi bagi segenap lapisan masyarakat, agar dapat membentengi diri dari dampak negatif film, serta menjaga adat istiadat dan budaya daerah agar tetap terjaga dan lestari. Selain itu, sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, LSF ditugaskan untuk membantu masyarakat agar dapat memilah dan menikmati pertunjukan film yang bermutu, serta memahami pengaruh film dan iklan film. Dengan demikian, selain masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai film-film yang bermutu, masyarakat juga memahami Budaya Sensor Mandiri. Sehingga masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif film dan iklan film. Masyarakat yang cerdas harus memiliki kemampuan untuk

Bollywood-nya, dan Amerika dengan Hollywood-nya. Mereka bisa berkembang karena dikonsept dengan baik. Demikian juga dengan industri perfilman nasional. Kalau mau berkembang harus ada peta jalan menuju industri perfilman yang maju.

Program Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) yang dikampanyekan LSF, bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan sensor mandiri. Baik untuk kepentingan pribadi maupun, dan terutama, untuk keluarga. Masyarakat diajak untuk secara bijak, mampu memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi atau penggolongan usia. Baik untuk film, iklan film, maupun program televisi. Klasifikasi usia penonton itu ditetapkan



Menghadiri Piala Citra 2020 Bersama Reza Rahardian salah satu Aktor Peraih Piala Citra 2020

memilah dan memilih tontonan yang pantas untuk dikonsumsi, pada semua jenis film yang beredar, karena adanya perkembangan dan perubahan teknologi.

Telah banyak program sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dan Desa Sensor Mandiri yang dilakukan LSF dalam tiga tahun terakhir ini. Dan, hampir di seluruh provinsi di Indonesia, sudah pernah dilakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa catatan untuk dijadikan evaluasi dalam program ini. *Pertama*; Budaya Sensor Mandiri adalah program yang bagus sehingga perlu diperluas dan diperbanyak lagi program-programnya. *Kedua*; penambahan anggaran agar program Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ini semakin banyak dan semakin tersosialisasikan kepada masyarakat luas. *Ketiga*; perlu melibatkan organisasi-organisasi lain untuk terlibat dalam Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri agar segmentasinya semakin meluas.

Banyak pengalaman menarik setiap kami melaksanakan tugas luar kota. *Pertama*; di setiap kegiatan selalu ada pengalaman dan ilmu baru yang kami dapatkan. *Kedua*; kita semakin banyak mendapatkan masukan dari masyarakat terkait kemajuan perfilman Indonesia dan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. *Ketiga*; hampir di setiap kunjungan ke daerah, kita selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru

tentang perfilman saat ini. Mulai dari banyaknya film yang tayang tanpa sensor, sampai adanya media-media baru yang dapat menayangkan film.

Ada salah satu pengalaman menarik ketika kita sedang melakukan Sosialisasi Desa Sensor Mandiri di Malang, tepatnya di desa Glanggang. Usai acara, saya diajak berdiskusi dengan beberapa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang kami undang. Mereka secara panjang lebar bercerita terkait keresahan mereka sebagai generasi muda, akan bahayanya film-film yang mengandung kekerasan, adegan seksual yang vulgar, serta adanya muatan LGBT di film yang ditayangkan di platform digital berbayar. Mereka setengah memprotes, ihwal banyaknya tayangan yang tidak disensor, namun ditayangkan di platform digital berbayar tersebut. Mereka juga memprotes tentang klasifikasi usia yang ada. Menurut mereka, ada sebuah judul film yang adegan dan muatannya seharusnya diklasifikasikan untuk penonton usia 17 tahun ke atas, namun mengapa LSF mengklasifikasikannya untuk penonton usia 13 tahun ke atas.

Tentu dengan adanya kritik dan masukan yang diberikan, itu saya sangat berterima kasih. Dan, kami telah memperbaiki kinerja kelembagaan yang ada. Sebagai penyelenggara negara yang bertugas di bidang penyensoran, tentu apapun kritik dan saran, amat ditunggu untuk perbaikan kinerja LSF. Apalagi, peran LSF sangat signifikan dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif film yang muncul. Oleh karena itu, agar eksistensi LSF ke depan terus berjalan dengan baik, maka ada beberapa saran saya untuk LSF ke depan:

Pertama: Lembaga Sensor Film jangan sampai berpuas diri dengan semua capaian yang ada. LSF harus terus meningkatkan kinerja kelembagaannya, agar kinerja LSF semakin baik, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. *Kedua;* Lembaga Sensor Film harus meningkatkan layanannya, baik untuk penyensoran, pemantauan, pengaduan, literasi dan edukasi hukum, serta dalam hubungan antar lembaga. Dan tentu saja Budaya Sensor Mandiri. *Ketiga;* Lembaga Sensor Film harus meningkatkan jumlah orang yang terpapar Budaya Sensor Mandiri, dengan cara semakin memperbanyak jumlah dan strategi BSM. Sehingga, masyarakat yang terliterasi BSM jadi semakin banyak.

Keempat: Lembaga Sensor Film terus meningkatkan *channeling program* dengan pelbagai elemen masyarakat, sehingga program-program kerja LSF bisa termanfaatkan dan tersosialisasikan lebih luas. *Kelima;* waktu terus berjalan dan zaman semakin bergerak maju. Dengan adanya revolusi industri 4.0 tentu banyak perubahan yang terjadi pada industri perfilman kita. Oleh karena itu, agar undang-undang perfilman saat ini dapat bergerak atau berlaku secara maksimal, perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2009. Hal ini penting dilakukan, agar Lembaga Sensor Film sebagai lembaga negara yang independen, dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



JATI DIRI:

Nama	: Mukayat Al Amin,
Tempat & Tanggal Lahir	: Lamongan, 16 November 1983
Nama Istri	: Anisa Herawati
Nama Anak	: Aisyah, Hafidz dan Alicya
Nama Orang Tua	: H. Saduri & Hj. Siti
Medsos	: mukayatalamin821@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1996 : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kalen
- 1999 : Madrasah Tsanawiyah Negeri, Babat
- 2002 : Madrasah Aliyah Negeri, Babat
- 2006 : IAIN Sunan Ampel, Surabaya
- 2010 : Universitas Airlangga, Surabaya
- 2018 : Proses Study S3 Universitas Airlangga, Surabaya